

**ETNISITAS, PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL *dan*
Potensi Perdagangan Internasional
Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA REGIONAL
(PSDR-LIPI)
JAKARTA
2008**

© 2009 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)*

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Etnisitas, Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan Kalimantan Timur/I Ketut Ardhana dkk. – Jakarta : LIPI Press, 2009.

xi + 206 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-386-3

1. Wilayah perbatasan 2. Etnisitas 3. Perdagangan Internasional

320.12

Penerbit : **LIPI Press, anggota Ikapi**



LIPI

*Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. 1
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710
Telp. : 021-5265152
Fax. : 021-5265152

KATA PENGANTAR

Tulisan yang berjudul “Etnisitas, Pengembangan Sumberdaya Lokal dan Potensi Perdagangan Internasional Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nunukan Kalimantan Timur” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh tim peneliti perbatasan pada Pusat Penelitian Sumberdaya Regional dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yang dilaksanakan di Nunukan Kalimantan Timur pada bulan Mei 2008. Laporan ini merupakan laporan akhir tahun 2008 yang disusun setelah studi literatur atau bahan-bahan yang diadakan sebelumnya dan disusun berdasarkan atas temuan-temuan lapangan.

Penelitian lapangan di Nunukan sudah dilakukan pada bulan April 2008. Penelitian kuantitatif berupa penyebaran kuesioner dan kualitatif berupa penggalan data melalui wawancara mendalam dilakukan di kecamatan Nunukan. Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ulama, aktifis LSM dan masyarakat biasa. Penelitian ini menyajikan informasi mengenai bagaimana kesiapan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam menyongsong era perdagangan yang lebih luas (bebas) di Nunukan. Analisis penelitian ini dipusatkan pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah kabupaten Nunukan dalam mengembangkan pembangunan di wilayah perbatasan.

Atas bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga laporan akhir tahun 2008 ini dapat diselesaikan maka disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diantara mereka adalah bapak Bupati Nunukan, Kepala Bappeda Nunukan, Kepala Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Camat, tokoh masyarakat, Bapak lurah Nunukan Tengah beserta staf dan pihak-pihak lain yang tidak semuanya dapat kami sebutkan satu persatu.

Jakarta, 30 Desember 2008

Prof. Dr. Rochadi Abdulhadi

ABSTRAK

Wilayah Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur) yang berbatasan dengan Tawau-Sabah Malaysia Timur dianggap memiliki potensi pengembangan di masa depan, terutama untuk pengembangan perdagangan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, perkembangan di daerah kawasan itu yang terutama menghadap Samudra Pasifik diduga turut berpengaruh terhadap dinamika wilayah perbatasan, karena kawasan Samudra Pasifik mempunyai perkembangan yang dinamis tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang. Perkembangan ini dianggap menjanjikan sekaligus penuh tantangan terutama bagi pengembangan wilayah Indonesia di bagian timur. Dengan intensitas pembangunan yang cepat yang diikuti dengan proses migrasi penduduk yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya menyebabkan terbentuknya masyarakat yang multietnik dan multibudaya. Hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan pekerjaan seiring perkembangan kawasan perbatasan dalam aspek perdagangan dan ekonomi. Kehidupan masyarakat yang multietnik ini bukan menjadi penghalang namun menjadi perekat dan pendukung yang dapat ditingkatkan kesadarannya akan keIndonesian di wilayah perbatasan, yang sebenarnya sangat rawan akibat munculnya berbagai kepentingan terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan munculnya keinginan untuk membentuk satu kekuatan yang terintegrasi yang sampai sekarang mengalami masa pasang surut. Oleh karena itu, perlu upaya memberdayakan kehidupan masyarakat di daerah perbatasan yang seringkali terpinggirkan dan/atau tertinggal menjadi wilayah yang potensinya dapat dikembangkan baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Aset sosial budaya yang terdapat pada masyarakat di perbatasan ini dapat dilestarikan menjadi benteng penguatan nasionalisme yang selanjutnya memperkuat nilai-nilai persatuan dalam kaitannya dengan persoalan kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan itu.

Selain itu, keragaman etnis yang hidup secara harmoni di dalam suatu wilayah merupakan modal sosial yang cukup penting untuk dikembangkan sebagai sumber daya lokal yang mampu mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Dengan sumber daya manusia yang memadai diharapkan mampu membangun kerjasama perdagangan internasional dengan negara tetangga yang selama ini memang sudah dilaksanakan secara tradisional, tetapi tampaknya belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kajian tentang etnisitas dan pengembangan sumber daya ini diperlukan untuk menggali potensi sumber daya lokal, aktivitas perdagangan internasional dalam konteks pembangunan kawasan regional yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan nasional (*national resilience*) dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Kata kunci: etnisitas, wilayah perbatasan, pengembangan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, perdagangan perbatasan, perdagangan internasional, kesejahteraan masyarakat, dan Nunukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Diagram	x
Daftar Gambar	xi

1. PENDAHULUAN

I Ketut Ardhana, Yekti Maunati dan Dundin Zaenuddin

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran	10
1.4 Kerangka Teoritis	11
1.5 Metodologi.....	24
1.6. Hipotesis	25
Daftar Pustaka	26

2. PULAU NUNUKAN:

DARI “POHON BERINGIN” HINGGA TANJUNG HARAPAN

I Ketut Ardhana

2.1 Pendahuluan	31
2.2 Tinjauan Geografis	34
2.3 Sejarah Pulau Nunukan: Dari “Pohon Beringin” Hingga Tanjung Harapan	35
2.4 Simpulan	52
Daftar Pustaka	53

3. ETNISITAS DI NUNUKAN

Yekti Maunati

3.1 Pendahuluan: Studi Etnisitas	57
3.2 Sekilas Potret Orang Dayak Tidung	66
3.3 Perjalanan Mencari 'Gula': Kisah-kisah Kedatangan Kelompok Etnik ke Nunukan	72
3.4 Dinamika hubungan antar etnik: menuju kedewasaan hubungan	77
3.5 Nunukan sebagai Identitas Baru?	89
3.6 Nasionalisme dan NKRI	94
3.6.1. Malaysia negeri pembanding	95
3.6.2. NKRI: Tantangan dan Peluang di Perbatasan	99
3.7 Simpulan	100
Daftar Pustaka	101

4. MODAL SOSIAL, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PREVENSI KONFLIK

Dundin Zaenuddin

4.1 Modal Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ..	107
4.2 Prevensi Konflik	122
4.2.1. Kondisi Ekonomi	125
4.2.2. Modal Sosial	130
4.2.3 Fungsi norma dan Aturan sosial	133
4.2.4 Kepercayaan, Resiprositas dan Hubungan Sosial	136
4.2.5 Pemerintahan	138
4.2.6 Konflik Sosial	142
4.2.7 Tindakan Kolektif (<i>Collective Behaviour</i>)	144
4.3 Simpulan	148
Daftar Pustaka	151

**5. NUNUKAN: DI TENGAH-TENGAH KAWASAN ‘THE
GOLDEN TRIANGLE’ ANTARA SURABAYA, MAKASSAR
DAN TAWAU**

I Ketut Ardhana

5.1 Pendahuluan	155
5.2 Posisi Strategis Nunukan di Tengah-tengah Kawasan “ <i>the Golden Triangle</i> ”	158
5.3 Arah Pengembangan Kebijakan Perbatasan: Masyarakat Nunukan dalam Perdagangan Lintas Batas (Internasional)	186
5.4 Simpulan	
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Konflik selalu dapat didamaikan.....	43
Tabel 2.2	Suku Bangsa.....	44
Tabel 2.3	Suku yang paling tinggi tingkat ekonominya.....	46
Tabel 3.1	Di wilayah Anda dihuni oleh beberapa kelompok etnik	80
Tabel 3.2	Pimpinan Pemda dan Afiliasi Etnik.....	84
Tabel 3.3	Suku yang paling tinggi tingkat ekonominya.....	87
Tabel 4.1	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Kondisi Ekonomi Setelah Nunukan menjadi Kabupaten (dalam persentase).....	129
Tabel 4.2	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang menyangkut Moral, Norma dan Hukum (dalam persentase).....	134
Tabel 4.3	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Kepercayaan, Resiprositas dan Hubungan Sosia (dalam persentase)	137
Tabel 4.4	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Partisipasi Sosial (dalam persentase).....	138
Tabel 4.5	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Governance (dalam persentase).....	140
Tabel 4.6	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang Menyangkut Percaya (<i>Trust</i>) (dalam persentase).....	141
Tabel 4.6	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah tentang Konflik Sosial (dalam persentase).....	
Tabel 4.7	Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang Berkorelasi dengan Tindakan Kolekif (dalam persentase).....	143
Tabel 5.1	Bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan (Indonesia).	160
Tabel 5.2	Perbedaan upah antara Indonesia dan Malaysia.....	161
Tabel 5.3	Beberapa alasan mengapa mencari pekerjaan ke Malaysia	
Tabel 5.5	Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia.	162
Tabel 5.6	Alur perdagangan yang Anda ketahui.	167
Tabel 5.7	Keterangan Penumpang Yang Datang Tahun 2007	169

Tabel 5.8	Pemulangan TKI Tahun 2007	171
Tabel 5.9	Lalu Lintas Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Tahun 2008	173
Tabel 5.10	Lalu Lintas Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Tahun 2008	173
Tabel 5.11	Jumlah perusahaan/ usaha menurut kategori lapangan usaha dan lokasi tempat usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006	
Tabel 5.12	Perusahaan atau usaha menurut kecamatan dan lapangan usaha Sensus Ekonomi Tahun 2006	179
Tabel 5.13	Jumlah tenaga kerja menurut kecamatan dan lapangan usaha Hasil Sensus Tahun 2006	180
Table 5.14	Perencanaan pembangunan di Nunukan telah mempertimbangkan pendapat dan harapan masyarakat	181
Tabel 5.15	Perkembangan IPM dan Komponen Indikatornya Kabupaten Nunukan Tahun 2004—2006	181
Tabel 5.16	Daftar Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Nunukan-Tawau Tahun 1999-2000 (s.d Desember)	
Tabel 5. 17	Rekapitulasi Antar Pulau Kabupaten Nunukan Tahun 2007	
Tabel 5.18	Laporan Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Bulan Maret 2007	183
Tabel 5.19	Laporan Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Bulan April 2007	185
Tabel 5.20	Jumlah TKI Per PJTKI (Dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2007)	188
Tabel 5.21	TKI Menurut Daerah Asal Tahun 2007 (Data ini dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2007 di Nunukan).	190
Tabel 5.22	TKI Ke Sabah Tahun 2007	191
Tabel 5.23	Keterlibatan tokoh dan masyarakat dalam program pembangunan.	194
Tabel 5.24	Jumlah unit penangkapan perikanan laut menurut jenis alat tangkap per kecamatan tahun 2005, 2006, dan 2007 .	197
Tabel 5.25	Realisasi Pengapalan Tahun 2005	198
Tabel 5.26	Realisasi Pengapalan dan Negara Tujuan Pemasaran Tahun 2006	199
Tabel 5.27	Peningkatan ekonomi di Nunukan perlu ditingkatkan sehingga orang Indonesia tidak perlu bekerja ke Malaysia.	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Keadaan Suku Bangsa Responden	79
Diagram 3.2 Pemisahan Kelompok Etnik	80
Diagram 3.3 Pendatang lebih berhasil secara ekonomi	86
Diagram 3.4 Terjadi kesenjangan ekonomi berdasarkan kelompok etnik.	
Diagram 3.5 Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia.	96
Diagram 3.6 Peningkatan ekonomi di Nunukan perlu ditingkatkan sehingga orang Indonesia tidak perlu bekerja ke Malaysia	
Diagram 3.7 Bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan (Indonesia)	97
Diagram 5.1 Perkembangan di Malaysia berpengaruh terhadap perkembangan Nunukan sebagai pusat perkembangan perdagangan internasional	159
Diagram 5.2 Pelaksanaan kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi sudah lebih baik.	175
Diagram 5.3 Masyarakat di kabupaten ini telah mendapatkan kesejahteraan di negeri ini	182
Diagram 5.4 Kegiatan perekonomian masyarakat Nunukan sudah lebih baik	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keadaan alam di Pulau Nunukan	34
Gambar 2.2 Kawasan Wisata di Nunukan	37
Gambar 2.3 Pemeliharaan kawasan wisata	39
Gambar 2.4 Aturan kunjungan ke kawasan wisata	41
Gambar 2.5 Kafe di kawasan wisata	42
Gambar 3.1 Tempat Pemujaan	68
Gambar 3.2 Lembaga Adat	69
Gambar 3.3 Mushola	69
Gambar 3.4 Pasar	69
Gambar 3.5 Gerbang Wisata	69
Gambar 3.6 Kampung Tator	82
Gambar 3.7 Jalan Tembus	82
Gambar 3.8 Kampung Timor	83
Gambar 3.9 Papan acara Hut Kab. Nunukan	93
Gambar 4.1 Bangunan baru Bandara Udara Nunukan	109
Gambar 4.2 Kondisi jalan lingkar di desa Tanjung Harapan, Nunukan Selatan	113
Gambar 4.3 Kantor Bupati Nunukan	123
Gambar 5.1 Peternakan sapi di Pulau Nunukan	161
Gambar 5.2 Kapal-kapal Penangkap Ikan di Pulau Nunukan	163
Gambar 5.3 Gas yang berasal dari Malaysia dipasarkan di Pulau Nunukan	165
Gambar 5.4 Perdagangan lintas Pulau di Pulau Nunukan	168
Gambar 5.5 Produk minuman dan makanan yang sebagian dari Malaysia	
Gambar 5.6 Penjualan produk Malaysia di Pulau Nunukan	174
Gambar 5.7 Media mengcover perkembangan di Nunukan	175
Gambar 5.8 Perairan Pulau Nunukan	187
Gambar 5.9 Kondisi jalan di pedalaman Pulau Nunukan	195

1

PENDAHULUAN

I Ketut Ardhana, Yekti Maunati dan Dundin Zaenuddin

1.1 Latar Belakang

Pulau Kalimantan yang memiliki luas 750.000 km² tercakup dalam tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Propinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah perbatasan di sebelah utara dengan negara bagian Sabah (Malaysia Timur), sedangkan di sebelah barat dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia Timur). Sementara itu, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Wilayah di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia membentang sepanjang 1.032 kilometer. Luas wilayah perbatasan sekitar 57.731,64 km² atau 23,54% dari wilayah Kalimantan Timur. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur ini berada di kawasan pantai di kecamatan Sebatik, Nunukan dan Sebuku. Kondisi topografinya sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, rawa dan dataran rendah. Letak wilayah perbatasan Kalimantan Timur ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah negara Asia Tenggara dan diapit oleh jalur pelayaran internasional, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi/Sulu (Kementerian PDT dan SESKOAD, 2006: 92, lihat juga: Tirtosudarmo, 2005). Kondisi semacam ini merupakan potensi penting dalam menyambut datangnya Abad Perkembangan Wilayah Asia Pasifik di masa depan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang potensial di Kalimantan Timur. Luas kawasan hutan di Kalimantan Timur mencapai 21.155 juta hektar. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan, peruntukannya adalah sebagai berikut: Hutan Suaka Alam (1.968.600 ha); Hutan Lindung (3.626.300 ha); Hutan Produksi Terbatas (4.826.100 ha); Hutan Produksi Tetap (5.513.060 ha); Hutan Konversi (5.192.380 ha); lain lain (17.500 ha). Potensi hutan ini mengundang banyak investor untuk melakukan eksploitasi hutan. Kini pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Kalimantan Timur mencapai 108 perusahaan dengan total luas areal konsesi 12.093.500 ha atau rata-rata 111.976,85 hektar per HPH. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1971, Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola, mengusahakan, mengolah dan memasarkan minyak bumi dan gas alam. Dengan demikian, Pertamina menguasai seluruh sumber minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur. Di tingkat operasional, Pertamina memiliki Unit Eksplorasi Produksi (UEP) yang melingkupi Kalimantan dan Sulawesi dengan pusatnya di Balikpapan. Selain sumber daya alam yang berupa hutan, wilayah perbatasan Kalimantan Timur juga memiliki keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan sumber dana bagi daerah. Keindahan alam perbatasan ini dapat dikembangkan untuk wisata alam yang dapat dipadukan dengan wisata budaya. Wisata budaya di wilayah perbatasan Kalimantan Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan mengingat keragaman etnis yang ada di wilayah tersebut.

Penduduk Kalimantan Timur cukup beragam, antara lain Suku Dayak, Kutai, Tidung, Banjar dan Bugis. Secara mayoritas mereka menghuni wilayah pedalaman dan perbatasan yang memiliki intensitas dinamika yang cukup tinggi. Penduduk yang beraneka ragam etnis tersebut juga memiliki keragaman, budaya dan agama. Keragaman ini merupakan kekayaan yang sangat berharga dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, keragaman tersebut

juga memiliki potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Tarakan, Nunukan dan Tawau dapat dilihat sebagai daerah yang memiliki potensi konflik sekaligus kerjasama jika hubungan etnisitas antara yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan baik. Orang Bugis memainkan peranan dalam bidang perdagangan dan ekonomi sebagai pedagang, nelayan dan supir taxi. Masyarakat ini meskipun berada jauh dari tempat kelahirannya, namun mempunyai ikatan sejarah yang kuat didasari atas keindonesiannya yang sudah tertanam sejak dahulu. Mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat di tanah perantauan. Mereka sebenarnya tidak hanya berasal dari Bugis saja tetapi juga berasal dari berbagai wilayah Indonesia lainnya seperti dari Goa, Mandar, Minahasa, orang Tator (Tanah Toraja) bahkan yang berasal dari Jawa dan Sumatra pun sering dikategorikan sebagai orang Bugis. Di wilayah ini selain etnis Bugis juga terdapat etnik Bajau yang tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi dari wilayah Filipina dan Malaysia. Mereka dikatakan telah bermigrasi dalam kurun waktu yang lama dan telah menempati *enklave-enklave* baru di sekitar perairan di Kalimantan Timur (sebagai referensi lihat: Moses, 2006). Tidak sama halnya dengan Sarawak di mana etnik Cina mendominasi pembangunan ekonomi di sana, di Sabah peran ekonomi itu diambil alih oleh orang Bugis yang memiliki basis ekonominya di Sandakan dan Tawau. Di Sabah orang Cina hanya menguasai beberapa sektor. Kedua etnis ini memiliki akar-akar sejarah yang panjang di negeri Malaysia. Di Sabah banyak dapat dilihat banjirnya barang-barang yang merupakan produk dari Cina. Sementara di Tawau dapat dilihat banjirnya barang-barang yang berasal dari Indonesia. Barang-barang terkenal seperti sepatu, pakaian, tas juga berasal dari luar. Walaupun demikian, suasana damai sangat dipertahankan di Sabah dengan mengedepankan konsep "*Rakyat cemerlang, negara terbilang*". Ini menjadi konsep yang penting karena dengan konsep ini maka perhatian tidak hanya diberikan bagi rakyat yang berada di sentra-sentra pemerintahan di kota-kota yang dikenal dengan "*pekan, bandar dan bandar raya*", tetapi juga bagi kelompok masyarakat yang menghuni di wilayah perbatasan.

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur selain kabupaten Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Brau, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Penajem Paser Utara dan Pasir dan empat kota yaitu Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur hingga barat sepanjang 1038 km dengan perincian luas sebagai berikut. Luas kabupaten Nunukan 12.128 km² (4,95% dari luas provinsi), sementara kabupaten Kutai Barat 6.911,1 km² (3,6%) dan kabupaten Malinau 36.692,54 km² (14,96%). Wilayah perbatasan Kaltim terdiri dari 11 kecamatan dan jumlah desa perbatasan 562 desa (Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan, 2006:93). Wilayah di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik Timur (induk) di Kabupaten Nunukan. Dua kecamatan ini terletak di Pulau Sebatik yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah Malaysia. Sebatik Indonesia ini berada di mempunyai luas wilayah sebesar 246,61 km². Secara administratif, wilayah Sebatik Indonesia terdiri dari 8 desa, yaitu Sungai Nyamuk, Sungai Pancang, Tanjung Aru, Tanjung Karang, Stabu, Liang Bunyu, Binalawan dan Aji Kuning (Latifa, dkk, 2006: 35).

Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang diwarnai oleh ciri struktur etnik yang didominasi pendatang dari provinsi lainnya di Indonesia, membuat penduduk asli menjadi minoritas. Perkembangan wilayah perbatasan sebagai akibat dari “boom” eksploitasi minyak bumi dan hutan, memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi penyebab masuknya penduduk dari etnik lain di kawasan itu. Hal ini berakibat semakin meningkatnya jumlah penduduk pendatang sehingga pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 5,8% per tahun. Menurut data statistik tahun 1996, jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai 2. 599. 165 jiwa. Dari catatan statistik itu dapat dikatakan bahwa kelompok migran yang masuk ke Kalimantan Timur paling banyak berasal dari Jawa Timur (35%), kemudian Sulawesi Selatan (25,2%), Kalimantan

Selatan (11,8%) dan Jawa Tengah (11,9%). Namun demikian, perlu dicatat bahwa selain kelompok etnik tersebut masih terdapat kelompok migran lainnya dalam jumlah yang lebih kecil yaitu berasal dari Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku dan Sumatera Utara. Mereka menggunakan uang ringgit dan sebagian uang rupiah untuk bertransaksi di wilayah perbatasan. Karena adanya pembangunan kawasan yang tidak seimbang antara Malaysia dan Indonesia, menyebabkan 90% penduduk Kalimantan Timur berkiblat ke Malaysia. Pulau Sebatik sekarang terdiri atas dua kecamatan yang di dalamnya terdapat delapan desa yaitu Pancang, Sungai Nyamuk, Tanjung Aru, Tanjung Karang, Setabu, Liang Bunyu, Binalawan dan Aji Kuning dengan jumlah penduduk tahun 27.993 pada tahun 2004 (Latifa dkk, 2006: 47). Kepadatan penduduknya 1, 24 jiwa/km². Mayoritas penduduk adalah etnik Bugis yaitu sekitar 90 %. Etnik lainnya yaitu Jawa 7 % dan kelompok etnik lainnya sekitar 3 %.

Seperti halnya kecamatan-kecamatan terluar lainnya, Kecamatan Sebatik di kabupaten Nunukan misalnya termasuk tertinggal baik dalam hal pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berhadapan langsung dengan negara tetangga. Posisi ini memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat Sebatik selain aktivitas melaut, berkebun dan bertani. Aktivitas perdagangan internasional cenderung dilakukan secara tradisional sehingga hasil yang diperoleh belum mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan secara politis belum memberikan kontribusi terhadap daerah (Karim "Sebatik, Wilayah Perbatasan yang dilupakan", 11 Juli 2007 dalam www.kaltimpost.web/id).

Sebagai wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik di kabupaten Nunukan juga rawan terhadap permasalahan kedaulatan negara mengingat wilayah perbatasan cenderung kurang diperhatikan oleh pemerintah dan

cenderung dijadikan jalur teroris transnasional, perdagangan manusia maupun *undocumented migrants* yang merugikan kedua negara yang bertetangga. Kondisi ini perlu segera diatasi agar keutuhan NKRI selalu terjaga. Oleh karena itu, pembangunan perbatasan perlu memperhatikan tidak hanya masalah keamanan dan pertahanan tetapi juga dengan memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan perdagangan internasional yang memiliki potensi strategis. Selama ini aktivitas perdagangan selain dilakukan secara konvensional juga cenderung terfokus di Tawau, Sabah, Malaysia. Hal ini merupakan sebuah ironi karena hanya menguntungkan pihak Tawau, Malaysia terutama karena peredaran uang ada di sana (Karim, 11 Juli 2007, www.kaltimpost.web/id). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah perlu menciptakan aktivitas ekonomi yang kondusif antara lain dengan penciptaan sarana pasar modern, bank, *duty free shops*, hotel dan biro perjalanan. Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme penyaluran dan peningkatan kualitas komoditi yang diperdagangkan. Bahkan, apabila memungkinkan pemerintah Indonesia perlu mengundang investor untuk mengolah sumber daya alam yang ada dengan memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana terjadi di Asia Tenggara pada umumnya persoalan perbatasan menjadi topik yang penting. Wilayah perbatasan itu seringkali dianggap seolah-olah sebagai “*magnet*” bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Antara wilayah perbatasan Thailand dan Laos misalnya tidak hanya penting dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial dan kestabilan politik yang relevan pada jaringan transportasi lintas batas (*the transboundary transportation network*), atau sebagai *corridor growth*, *border bonanza*, *Asia growth circle* dan sebagainya. Misalnya,

Thailand dan Laos menganggap wilayah perbatasan sebagai *entry point* atau *gate way* untuk masuk ke negara masing-masing. Oleh karena itu, tiap-tiap negara itu menjaga bagaimana wilayah perbatasan harus menampilkan pesona sebagai sebuah “halaman depan” (*frontyard*) dari sebuah negara. Dengan demikian, wilayah pintu masuk perbatasan dibangun sedemikian modern dengan sistem yang lebih maju. Akan tetapi, wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Timur dengan Tawau Sabah-Malaysia tampaknya masih diperlakukan sebagai “halaman belakang” (*backyard*) dari wilayah negerinya.

Dalam perjalanan sejarahnya permasalahan perbatasan seringkali menyangkut aspek kerjasama dan konflik di antara penduduk lokal atau penduduk asli yang mendiami wilayah tersebut. Memang dahulu sebelum terbentuknya negara modern belumlah terdapat batas-batas yang jelas antara satu negara dengan negara lainnya. Penduduk asli yang sebenarnya mempunyai hubungan etnisitas yang sama, kemudian tampaknya membedakan diri mereka antara yang berada di satu wilayah dengan mereka yang berada di wilayah lainnya akibat munculnya negara-negara modern itu (Ardhana 2007a dan 2007b). Dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari terutama dalam kaitannya dengan persoalan ekonomi bahkan mereka saling membantu. Namun, ketika terbentuknya negara-negara moderen, ketika ditentukan batas yang jelas antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, persoalan baru muncul. Mereka baru menyadari bahwa mereka sekarang telah tidak dapat bebas seperti dahulu bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya secara bebas, karena masing-masing negara sudah membuat patokan batas negara yang jelas. Hal ini memberikan implikasi pula bahwa tiap-tiap negara mempunyai persepsi dan interpretasinya sendiri-sendiri, meskipun sebenarnya mereka sudah mempunyai persetujuan bersama tentang perbatasan itu. Lebih-lebih ketika di suatu negara mengalami perkembangan ekonomi yang lebih maju, tentu akan berpengaruh terhadap wilayah perbatasan lainnya. Di satu sisi ada hal-hal yang mendorong munculnya harmoni tetapi di

pihak yang lainnya seringkali memunculkan persoalan konflik di antara mereka (Goldscheider, 1995: 7). Bahkan, tidak mengherankan pula karena adanya ketimpangan-ketimpangan perkembangan di wilayah perbatasan menyebabkan wilayah tersebut sering dianggap sebagai “ancaman” terhadap wilayah lainnya (lihat misalnya: Tagliacozzo, 2007: 160. Dengan adanya kondisi seperti ini tidak mengherankan apabila ada kekhawatiran-kekhawatiran terhadap wacana yang berkembang tersebut. Namun demikian, tidaklah selalu wilayah perbatasan itu mengandung potensi konflik, karena di sekitar wilayah tersebut kadang-kadang muncul suasana harmoni yang memang diciptakan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, seperti hubungan kekeluargaan dan kerjasama sektor ekonomi. Dengan kata lain, dianggap harmoni karena mereka sebenarnya berasal dari suku yang sama sehingga hidup mereka saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam masalah perdagangan. Contoh yang jelas dapat dilihat dari aktifitas ekonomi atau perdagangan yang dilakukan mereka sebenarnya berbasiskan hubungan kekeluargaan yang sudah dirasakan sejak lama dalam perjalanan sejarah etnisitas di wilayah itu.

Meskipun kita masih menghadapi berbagai persoalan di perbatasan, tapi akhir-akhir ini angin ke arah perbaikan tampaknya sudah mulai dilakukan meskipun masih berlangsung persoalan-persoalan keamanan di beberapa daerah. Hal itu tidak hanya dalam skala makro atau nasional, dalam skala mikro pun seperti antara provinsi, kabupaten, desa sampai terkontaminasi dengan masalah perbatasan. Di masa lalu penduduk lokal menganggap bahwa mereka tidak mempunyai masalah ke mana pun mereka bermigrasi lalu menetap hidup di sana dan mengupayakan lapangan pekerjaan baru terutama dalam aktifitas perdagangan. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di mana saja tidak terlepas dari persoalan apakah wilayah itu menjadi bagian negara modern (*modern state*). Mengapa wilayah perbatasan yang di masa lalu tidak tersentuh dari wacana publik, tiba-tiba mencuat ke permukaan? Siapa sebenarnya

yang mempunyai otoritas dalam menangani masalah perdagangan di wilayah perbatasan? Bagaimana peran masyarakat lokal dalam aktifitas perdagangan di wilayah perbatasan? Bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan masalah perdagangan itu mestinya dibuat dan bagaimana mengaplikasikannya? Karena kondisi perbatasan yang jauh dari pusat dan koordinasi yang lemah antar berbagai institusi yang menangani masalah perbatasan dalam kaitannya dengan masalah perdagangan, maka tidak mengherankan pula, bahwa banyak kesalahmengertian yang terjadi antara apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merekapun saling melemparkan tanggung jawab, bahwa persoalan perbatasan bukanlah persoalan pemerintah daerah, tetapi persoalan pemerintah pusat atau sebaliknya.

Selain itu signifikannya persoalannya dapat dilihat pada masalah antara lain kedaulatan negara dan kejahatan internasional (*international crime*) yang muncul akhir-akhir ini. Dengan angin baru reformasi dengan dikedepankannya paradigma yang bergerak dari yang tersentralisasi ke desentralisasi, tampaknya hal ini akan memberi harapan terhadap kondisi perbatasan yang seolah-olah terlupakan dalam dinamika sejarah Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa kondisi yang memungkinkan kurangnya perhatian terhadap wilayah perbatasan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga tampak kurangnya penanganan persoalan-persoalan itu secara menyeluruh dan tuntas yang pada akhirnya memunculkan ketegangan, kekerasan dan konflik di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa persoalan itu jarang dimunculkan dan terkesan kurang memainkan peranan penting dalam dinamika sejarah Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dahulu ada wacana yang berkembang bahwa kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan kelompok etnik yang menghuni perbatasan itu dianggap sebagai kelompok minoritas, masyarakat yang termarginalisasi, terpinggirkan bahkan dianggap sebagai daerah-daerah yang tertinggal yang mengakibatkan munculnya perasaan ketidakadilan

dibandingkan dengan kelompok masyarakat Indonesia yang berada di pusat-pusat perkotaan. Hal ini tentu saja tidak dapat lepas dari persoalan dinamika historis masyarakat Indonesia di masa-masa sebelumnya yang cenderung menganggap wilayah perbatasan sebagai wilayah yang terkesan tidak terlalu berperan dalam dinamika historis masyarakat Indonesia. Ketika kita memasuki masa reformasi yang kita harapkan akan memberikan harapan baru, bagaimana hal ini bergeser dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik pemerintah pusat dan daerah? Hal ini menuntut pelaksanaan kebijakan dan pembangunan perbatasan dilakukan secara lebih sinergi, terpadu dan terkoordinasi. Pembangunan wilayah perbatasan harus dianggap sebagai urusan pemerintah pusat dan sekaligus pemerintah daerah agar pembangunan lebih dapat dirasakan masyarakat setempat. Inilah beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Didasari atas permasalahan tersebut di atas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara etnisitas, pengembangan sumber daya lokal dan aktivitas perdagangan internasional di wilayah perbatasan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan khusus:

1. Memahami persoalan etnisitas di wilayah perbatasan dari aspek *ethno-history*
2. Mengkaji modal sosial masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan nasional.
3. Menganalisis pengembangan sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun manusia dan aktivitas perdagangan internasional
4. Mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat wilayah perbatasan khususnya tentang pengembangan sumber daya lokal dan aktivitas perdagangan internasional.

Sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

- Tersedianya data genealogis dari kelompok etnis yang tinggal di wilayah perbatasan dan ikatan kekeluargaannya.
- Tersedianya data dan informasi mengenai modal sosial masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan nasional
- Tersedianya data tentang potensi sumber daya alam dan manusia di wilayah perbatasan
- Tersedianya data tentang aktivitas perdagangan internasional di wilayah perbatasan
- Tersedianya rumusan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk penyusunan MoU bidang perdagangan

1.4. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang etnisitas seringkali dikaitkan dengan masalah kebudayaan, akan tetapi hubungan antara kebudayaan dan etnisitas adalah sesuatu yang tidak melekat pasti “*unfixed*”. Misalnya Eller berpendapat bahwa: *‘not all culturally distinct groups are ethnic groups precisely, and (in an odd paradox) not all ethnic groups are culturally distinct groups’* (Eller 1999: 8). Dalam kaitan ini Eller menyarankan bahwa etnisitas dan kebudayaan ‘culture’ tidak selalu memiliki suatu hubungan yang ideal. Kalau kita melihat orang Melayu sekarang di Kalimantan yang mana mereka dikenal sebagai orang Malaysia, mereka mempunyai kebudayaan yang sama sebagaimana halnya dengan kelompok etnik Dayak, karena banyak diantaranya yang sudah memeluk agama Islam dan seringkali dipertimbangkan sebagai orang Melayu (Coomans, 1987). Kriteria yang mana individu dinominasikan sebagai orang Dayak atau Malayu dapat bertukar sesuai dengan perjalanan waktu (Maunati, 2000). Mengutip pendapat De Vos, Eller menjelaskan bahwa etnisitas adalah

penggunaan simbolik dari berbagai aspek kebudayaan untuk membuat perbedaan antara mereka dengan kelompok yang lainnya. Eller menambahkan bahwa etnisitas adalah kesadaran akan perbedaan *'ethnicity is consciousness of difference and the subjective salience of that difference'* (Eller, 1999: 9). Kelompok-kelompok etnik biasanya memanfaatkan semua aspek dari kebudayaan mereka tentang sejarah sebagai penanda identitas mereka. Selain memang beberapa elemen dari kebudayaan mereka dibentuk oleh kelompok-kelompok lain yang menyebabkan kesulitan dalam membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Daerah abu-abu "*Grey areas*" dicatat oleh beberapa ahli berkaitan dengan identitas budaya (Kahn 1995). Penggunaan penanda-penanda identitas tertentu memiliki kecenderungan berubah pula. Misalnya Eller mencatat bahwa suatu kelompok etnik yang memilih agama di satu tahapan dapat berubah ke bagian atau kelas yang lain dari kebudayaan yang dimilikinya (1999: 9). Satu ciri yang lainnya adalah bahwa suatu kelompok etnisitas yang meluas merupakan label yang dapat dibuat dan dibuat kembali "*made and remade*" (Eller 1999: 10). Eller mengupayakan sebuah contoh dari identitas yang berubah dari Black ke *African American* di Amerika Serikat yang pada dasarnya tidak mengubah keanggotaannya tetapi mentransformasikan penanda etnisitas dari warna kulit ke asal nenek moyang dalam pengertian yang paling luas (1999: 10-11).

Sama halnya seperti, King dan Wilder berpendapat bahwa mempelajari etnisitas adalah berkaitan dengan proses sosial dan budaya serta aspek yang mempengaruhi kesamaan dan perbedaan dan mengerti konstruksi dan transformasi identitas sosial budaya dengan mengelompokkan orang (2003: 196-197). Dalam kaitan ini, banyak ahli berpendapat bahwa batas-batas "*boundaries*" itu dikonstruksikan (King dan Wilder 2003; Kahn 1995; etc.). Barth (1969) berpendapat bahwa formasi kelompok etnik melibatkan proses sosial dari eksklusion dan inkorporasi dan seleksi aspek sosial budaya yang dipertimbangkan relevan pada konstruksi identitas dan perbatasan.

Telah diakui bahwa identitas budaya dikonstruksikan (King 1982; Vickers 1989; Hall 1992; Eriksen 1993; Kipp 1993; Kahn 1993; Kahn 1995; Picard 1997; Wood, 1998; and King and Wilder, 2003). King dan Wilder lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

Ethnicity is obviously expressed as a product of the past, evoking common origins, social linkages and shared cultural values and traits like language and religion. However, the historical dimension of identity also demonstrates that rather than identities being fixed, constant and immutable, they frequently change and can be acquired (2003: 198).

Para ahli membedakan tingkatan yang mana konstruksi identitas budaya dikaitkan dengan proses tertentu dan pengalaman sejarah yang berbeda sebagaimana kita lihat mengenai masalah ini di perbatasan antara Nunukan Indonesia dan Tawau Sabah Malaysia.

Ide mengenai identitas budaya sebagaimana dikonstruksikan sebagaimana secara jelas berkaitan dengan set yang berkaitan dari masalah kepercayaan sekitar konsep kebudayaan. Secara khusus sebagaimana Kahn (1995) dan yang lainnya berpendapat bahwa, kebudayaan itu kurang organik dan terikat daripada dari pada yang sering diklaim. Dalam mendiskusikan perbedaan kebudayaan Kahn berpendapat bahwa kebudayaan itu sendiri adalah sebuah konstruksi budaya. Ia menyarankan sebagai berikut:

There are, in fact, two problems with the image of a culturally diverse world that lead us to its discursive dimensions. The first, the question which most attention has focused, arises from the fact that the project of, variously, describing, translating or interpreting 'other cultures' contains a fatal flaw in so far as it can never genuinely succeed in locating these cultures except in relation to, and hence within the culture of, the person doing the

interpreting. The argument that the western texts that purport to describe the 'culture' of this or that group of people are cultural artefacts of 'the West' and hence have little to do with otherness at all is by now a relatively standard one - in part a consequence of a poststructuralist revolution in the treatment of anthropological texts, and in part the result of a postcolonial critique of western discourses (1995:128).

Dalam pemikiran Kahn suara dari “yang lain” adalah suara dari pengarang itu (1995:129). Ia menggarisbawahi sebuah permasalahan lebih lanjut dengan mengatakan:

But there is here a second problem, less often discussed in current debates over who is and should be authorised to speak about other cultures, for it will be noted that the conclusion about postmodern poetics does little to undermine the assumption that these other cultures are still 'out there', that the modern world is still a cultural mosaic - it is only that now individuals can never hope to escape the boundaries of their own particular corner of it (1995: 129).

Kebudayaan dipandang sebagai produk dari proses yang lebih awal dan terbuka untuk penginterpretasian kembali dan ide baru sebagaimana komponen lama. Ini berkaitan dengan konseptualisasi kebudayaan dan Kahn berpendapat bahwa identitas kebudayaan secara sama dikonstruksikan dan memiliki sifat yang kontekstual.

Secara sama, konsep identitas dan sebenarnya identitas itu sendiri dipandang secara meningkat sebagai hasil dinamika antara konteks sejarah dan konstruksinya.. Eriksen (1993) telah mendemonstrasikan beberapa proses yang melibatkan konstruksi sejarah dari identitas etnik yang berkaitan dengan orang Indian yang bermigrasi ke Mauritius dan Trinidad. Dalam setiap kasus, identitas itu selanjutnya berbeda dan bekerja melawan ide bentuk ‘essential’ dari ke “Indianness”.

...it would be misleading to start from an assumption of 'primordial characteristics' of groups or categories. The formation of different categories of 'Indians' in Mauritius and Trinidad, respectively, clearly shows this. Not only are the ethnic subdivisions within the 'Indian' category different in the two societies, but so are the stereotypical assumptions about 'Indian culture'. Indians in Mauritius, where they are in a majority and dominate the state bureaucracy, often complain that they are good politicians but 'have no talent for business'. In Trinidad, Indians have a smaller stake in the state bureaucracy and many Indians have gone into business (Eriksen 1993: 84-85).

Secara sama hakekat dinamika tentang konstruksi identitas budaya adalah bukti dari kasus yang terjadi di Indonesia (Vickers 1989; Picard 1997; Kahn 1993; Kipp 1993; dan Maunati 2000). Selanjutnya Eriksen menekankan:

from the Barthian emphasis on boundary processes and later studies of identity boundaries, we also know that the selection of boundary markers is arbitrary in the sense that only some features of culture are singled out and defined as crucial in boundary processes (1993:117).

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa '...ideologi selalu memilih dan menginterpretasikan kembali aspek-aspek budaya dan sejarah yang cukup mapan masuk ke dalam legitimasi konstelasi suatu kekuasaan yang khusus (1993:118). Winzeler (1997) jua mencatat bahwa dalam upaya "to lessen the unity of powerless groups," pemerintah sering memanipulasi identitas budaya. Eriksen (1993), Kahn (1995) sebagaimana halnya dengan Picard (1997) secara sama berpendapat bahwa identitas etnik dikonstruksikan sesuai dengan situasi. Eriksen menjelaskan: '...identitas adalah "negotiable dan situational' (1993:117). Ia juga berpendapat bahwa

identitas etnik diciptakan dalam kaitannya dengan yang lainnya (1993: 111), dengan mencatat sebagai berikut:

Groups and collectivities are always constituted in relation to others. A shared European identity, for example, would have to define itself in contrast to Muslim, Middle Eastern or Arab identity, possibly also in relation to African, East Asian and North American identities - depending on the social situation (1993:62).

Lebih jauh King mencatat bahwa proses pertukaran budaya atau dalam istilah yang lebih luas adalah sebuah proses asimilasi yang terjadi antara kelompok etnik yang hidup berdampingan (1982: 25). Konstruksi dari identitas budaya adalah secara terpisah cukup kompleks karena ia merupakan produk sejarah. Identitas budaya sendiri dapat ditukar tergantung pada konteks dan kekuasaan. Secara terpisah dari aspek budaya, seseorang butuh mempertimbangkan kemunculan negara bangsa modern di Asia Tenggara (*modern nation-state in Southeast Asia*) yang membawa penguatan pada identitas nasional. Adalah penting untuk menghubungkan antara persoalan-persoalan nasionalisme dan kemunculan identitas itu. Mengkonstruksi identitas dapat saja terjadi suatu saat sebagaimana kita lihat pada kaitan antara identitas nasional dan identitas lokal (*the national identity jeopardy the local identity*).

Perbedaan kelompok etnis juga sering terkait dengan kondisi sosial ekonomi dari masing-masing kelompok. Kelas sosial juga terkait dengan perbedaan kelompok etnik (Goldscheider, 1995:9). Kelompok etnik yang dianggap sebagai penduduk asli sering terpinggirkan secara ekonomi, terutama ketika dominasi ekonomi berada ditangan pendatang. Di Kalimantan misalnya, orang-orang Dayak sebagai penduduk asli memiliki posisi yang marginal secara ekonomi (lihat Djuweng, 1996). Baik secara ekonomi maupun politik, masyarakat Dayak masih berada pada posisi

bawah. Mereka mendapatkan peluang ketika otonomi daerah digulirkan di mana mereka yang menganggap sebagai putra daerah memiliki peluang yang lebih besar. Namun ketimpangan ekonomi masih tetap terjadi di mana para pendatang memiliki posisi yang lebih baik. Hal ini tidak mengherankan mengingat pendatang memiliki ketangguhan yang lebih tinggi karena mereka harus berjuang untuk hidup di wilayah baru, sedangkan penduduk asli sudah dimanjakan oleh alam. Di wilayah perbatasan ketika kesempatan ekonomi terbuka, artinya adanya kesempatan dalam hal perdagangan internasional, setiap kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Di Sebatik kabupaten Nunukan, penduduk asli adalah orang Tidung, tetapi orang Tidung sendiri secara tradisi bergerak di bidang perikanan. Misalnya saja orang-orang Bugis banyak bergerak di bidang jasa, seperti jasa transportasi, selain banyak juga sebagai petani dan nelayan. Sedangkan orang-orang Bajau banyak yang menjadi pedagang informal (Latifa dkk.: 2006) mencatat adanya lalu lintas perdagangan yang semakin pesat antara Nunukan dan Tawau.

Perlu diketahui bahwa masyarakat lokal di perbatasan melakukan transaksi ekonomi di pasar dengan menggunakan Rupiah maupun Ringgit Malaysia (RM). Masyarakat di perbatasan yang berada di wilayah Indonesia menukar Rupiah dengan Ringgit ketika mereka membeli barang-barang di Malaysia. Hal ini menjadi peluang bagi para pedagang valuta asing di mana dapat dilihat munculnya "*money changer berjalan*". Ketika orang-orang naik kapal mereka juga dapat menukarkan uangnya di dalam kapal karena banyak pedagang valuta asing. Dalam pasar masyarakat perbatasan, barang-barang dari Malaysia mendominasi pasar, seperti sembako, makanan, elektronik, barang pertanian dan barang otomotif. Sebagian dari barang tersebut tidak ada "bandrol" yang artinya barang-barang tersebut tidak terkena cukai. Barang-barang tersebut sangat digemari oleh masyarakat perbatasan karena barang-barang Malaysia dianggap memiliki kualitas tinggi, murah dan mudah di dapat. Sementara barang dari Indonesia dianggap memiliki kualitas rendah, mahal dan

sulit diperoleh (lihat Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan, 2006: 106). Hal ini selaras dengan teori ketergantungan pada umumnya yang mengatakan bahwa di mana pinggirannya (*periphery*) memiliki ketergantungan pada pusatnya (*centre*) yang dalam hal ini adalah Tawau, Sabah sebagai pusatnya, sementara wilayah perbatasan Indonesia sebagai wilayah pinggirannya. Ini tampaknya juga terkait dengan kondisi dimana “*periphery*” menyediakan bahan mentah sementara “*centre*” yang mengolahnya dan menjual lagi ke daerah pinggirannya dengan harga tinggi karena sudah melalui proses panjang.

Perbedaan wilayah perbatasan di Indonesia dan Malaysia perlu dilihat dari sisi sejarahnya yang memang berbeda. Cukup menarik untuk mengkaji kembali bagaimana dari aspek historisnya dengan melihat 47 tahun setelah perjanjian antara Belanda dan Inggris 1915, perjanjian dasar (*Basic Agreement*) antara pemerintah Indonesia dan Inggris ditandatangani pada 26 Mei 1967. Perjanjian itu menempatkan prosedur prinsip untuk lintas batas negara dengan pengertian bahwa kalau seseorang ingin menyeberang masuk ke wilayah negara lain atau keluar dari negara lain yang hidup di dalam apa yang kemudian disebut “*the Border Area-the Malaysian Border Area in East Malaysia, and the Indonesian Border Area in Kalimantan*”. Di bawah sistem seperti ini, seorang warga Malaysia atau Indonesia diminta menunjukkan kartu identitasnya (*Border Pass for endorsement at the Border Control Post if he/she passes the cross border*).

Selanjutnya sejak berakhirnya era Perang Dingin, maka bipolarisasi kekuasaan negara-negara Barat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pun berakhir. Kondisi ini memungkinkan terciptanya kekuasaan Barat yang menyatu pada satu sumber kekuatan yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Dahulu adanya konflik antara komunis dan non komunis, sekarang muncul ancaman yang sering dikelompokkan sebagai gerakan teroris (di Malaysia disebut *pengganas*). Isu yang

dikedepankan pun akhirnya difokuskan sebagai gerakan melawan terorisme. Dengan demikian melalui isu ini pun akhirnya diupayakan mewujudkan adanya wacana baru berkaitan dengan apa yang disebut dengan struktur politik dunia yang baru terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat menjelang bangkitnya kekuatan baru di Eropa seperti Jerman di Eropa dan kekuatan Cina dan Jepang di benua Asia. Dalam kaitan ini ada dua pilihan yaitu “*follow me or against me*”. Di Amerika Serikat, pembenaran peran melawan terorisme ini terjadi setelah peristiwa 11 September 2004, di mana kelompok Al-Qaidah pimpinan Usama bin Laden di anggap sebagai kelompok teroris di balik penyerangan menara kembar WTO.

Upaya pengatas-namaan penumpasan teroris juga dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam skenario Amerika, yang dalam berbagai kasus menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal antara negara tetangga. Konflik muncul, yang kemudian menjalar ke kawasan-kawasan baru yang tidak pernah terjadi konflik. Dapat disebutkan sebagai contoh misalnya munculnya konflik antara Thailand Selatan dan Malaysia bagian utara (Chongkittavon, 2003: 181), konflik di wilayah Filipina Selatan antara warga etnik Moro dengan Manila. Konflik tersebut tidak terlepas dari isu separatisme dan terorisme yang mendapat angin baru, terutama setelah melihat bagaimana kekuasaan Uni Sovyet yang kuat menjadi runtuh di era berakhirnya Perang Dingin. Selain itu, konflik juga dapat terjadi jika ada usaha mengkristenkan orang Melayu. Hal itu karena dalam konsep menjadi orang Melayu “*becoming Malays*” setidaknya seperti terjadi di Malaysia, munculnya ketentuan untuk memeluk agama Islam, bercakap bahasa Melayu dan agama Islam adalah agama bangsa. Dinamika politik seperti ini akhirnya mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, keamanan dan sebagainya yang berlangsung di beberapa kawasan yang disebut dengan perbatasan itu, yang sebelum berakhirnya era Perang Dingin tidak muncul di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, perang melawan terorisme juga gencar dilakukan setelah terjadi peristiwa bom Bali yang membunuh lebih dari 200 orang pada September 2004.

Berbagai isu dan masalah akan dibahas di sini mengapa, bagaimana dan apa yang menjadi masalah di kawasan perbatasan itu. Tambahan pula penting melihat kondisi yang berbeda antara di Sebatik, Tawau dalam perkembangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di Malaysia tidak seperti masa lalu, sekarang ini kekuatan sosial politik di Sabah sudah menjadi bagian dari Barisan Nasional. Implikasinya adalah kalau dahulu mereka relatif sulit mendapat bantuan dari pemerintahan di Semenanjung. Ketika sebelum menerima kehadiran Barisan Nasional, kelompok Lun Dayeh di Tawau sulit dalam menjalankan program pembangunannya. Akibatnya posisi kelompok Lun Dayeh di Tawau Sabah yang berada di wilayah perbatasan, terpinggirkan.

Pembangunan sarana dan prasarana memang tampak lebih pesat terjadi di wilayah Malaysia. Hal ini dapat dimengerti apabila diperhatikan bahwa proses dekolonisasi antara Indonesia dan Malaysia memang berbeda. Indonesia merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Belanda dengan cara revolusi sementara Malaysia meraih kemerdekaannya dengan cara damai dari kekuasaan Inggris. Dengan demikian, ketika Indonesia masih berkonsentrasi dalam menjaga kemerdekaannya, Malaysia lebih dapat memfokuskan dirinya dalam pembangunan infrastruktur. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi di Malaysia sebagaimana terjadi juga di Sabah dan Serawak, dua negara bagian yang berada di pulau Kalimantan itu, tampak lebih maju. Sebagaimana diketahui bahwa paska-kemerdekaan Malaysia dari pemerintahan Inggris, banyak fasilitas diberikan kepada masyarakat Malaysia. Mereka diberikan pendidikan seperti melanjutkan sekolah ke Inggris, adanya perbaikan infrastruktur. Ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, setelah era kemerdekaannya masih berlangsung era revolusi yang berlangsung tahun 1945-1950. Lepasnya Indonesia dari kuku penjajahan Belanda tidak dapat dilakukan secara damai. Sementara di Malaysia karena mereka lepas dengan damai banyak konsentrasi diberikan mengenai bagaimana menangani keadaan masyarakat yang baru

lepas dari kekuasaan Inggris. Era paska-kemerdekaan itu (setelah September tahun 1957), Malaysia ikut menghadiri pertemuan *Anglo Malaysia Defence Agreement*. (AMDA). Ini merupakan justifikasi bagaimana program pembangunan perbatasan dapat dilanjutkan sementara di Indonesia dalam periode yang sama masih bergolak dan konsentrasi masih lebih banyak pada perhatian pada persoalan politik dalam negeri. Misalnya munculnya pergolakan PRRI, PERMESTA yang sering banyak menghabiskan konsentrasi pada masalah administrasi pemerintahan. Banyak anggaran yang dicurahkan untuk program pertahanan melawan kekuasaan Belanda seperti perlawanan merebut Irian Barat dalam pembelian peralatan senjata sampai ke Uni Sovyet dan Cina. Meskipun demikian, Soekarno masih mampu menyelesaikan persoalan yang mengarah ke isu separatisme yang berlangsung saat itu. Bertitik tolak dengan latar belakang historis itu dapat dikatakan telah tercipta kondisi yang tentu berbeda dengan di Malaysia yang lebih banyak mempunyai waktu dalam perencanaan program pembangunannya. Di Malaysia banyak pebisnis muncul yang pro SEATO yang tampaknya berbeda dengan kondisi di daerah bekas kekuasaan Belanda. Di Sabah Malaysia, untuk menunjang program pembangunan pemerintah di wilayah perbatasan maka dibentuk Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

Perkembangan sosial ekonomi di perbatasan perlu mendapat perhatian karena ketergantungan masyarakat perbatasan kepada “*negeri jiran*” (Malaysia). Secara ekonomi, masyarakat perbatasan memang tergantung kepada negeri jiran tersebut baik untuk menjual hasil pertanian maupun untuk mencari pekerjaan. Bahkan terdapat ungkapan bahwa Malaysia adalah “bapak pertiwi” mereka, suatu ungkapan yang menggarisbawahi pentingnya Malaysia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, betapapun rasa nasionalisme mereka sebagai warga bangsa tetap dipertahankan. Dalam situasi seperti ini, modal sosial masyarakat perbatasan baik intra warga Indonesia maupun antar warga negara

menjadi entitas penting baik untuk kelangsungan kehidupan sosial ekonomi maupun keberlanjutan mereka sebagai warga bangsa. Persistensi modal sosial, misalnya, dapat berfungsi ganda dalam menjalin hubungan baik masyarakat perbatasan tersebut secara intern dan eksternal.

Apabila dilihat catatan sejarah dapat dikatakan bahwa hubungan sosial ekonomi antara Tawau Sabah dan Kalimantan Timur sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Namun secara formal baru diperkuat sejak tahun 1994 melalui program SOSEK-MALINDO, antara Provinsi Kalimantan Timur dan negara bagian Sabah-Malaysia. Meskipun diadakan pertemuan reguler setiap tahunnya, program-program kerja SOSEK-MALINDO, khususnya di bidang perdagangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adanya latar belakang historis yang berbeda memberikan pemahaman kepada kita bagaimana wilayah perbatasan itu dikelola secara berbeda pula. Tampaknya Malaysia sudah memiliki persepsi yang lebih baik dalam mengelola perbatasannya, meskipun di perbatasan Indonesia pemerintah juga mulai memberikan perhatian dengan adanya Kementerian Daerah Tertinggal (KDT) yang menangani masalah-masalah daerah tertinggal yang mencakup pula daerah-daerah di wilayah perbatasan. Bagi pemerintah Malaysia perbatasan itu sudah disadari untuk dibina dalam kurun waktu yang cukup lama setelah diraihnya kemerdekaan negaranya. Dewasa ini perbatasan itu dikembangkan sebagai pusat-pusat perkebunan coklat dan juga dikembangkan sebagai pusat perkembangan wisata baik yang menyangkut pariwisata budaya dan pariwisata lingkungan. Untuk hal ini dapat dilihat bagaimana wilayah perbatasan di perairan seperti Sipadan dan Ligitan dikembangkan untuk kawasan wisata lingkungan sementara di perbatasan pedalaman dikembangkan kawasan wisata budaya meskipun di beberapa tempat di Long Pasia (Ardhana *et al.* 2006) juga dikembangkan kawasan wisata lingkungan dengan adanya penanaman anggrek, tanaman langka atau

tanaman obat-obatan yang dikelola oleh masyarakat kampung dengan bantuan pemerintah kerajaan di Kuala Lumpur.

Bertitik tolak dengan pembahasan di atas akan dikaji dalam penelitian ini bagaimana permasalahan-permasalahan muncul di wilayah perbatasan antara Sebatik dan Tawau dimana hidup kelompok etnik group yang sama kemudian menjadi berbeda karena bangkitnya negara-negara modern. Dikaji pula bagaimana sikap mereka ketika muncul persoalan-persoalan perbatasan, apakah ada perekat di antara mereka sehingga masalah-masalah yang muncul diharapkan diselesaikan dengan baik. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka karena secara ekonomi mereka ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan pembahasan masalah etnisitas, masalah sumber daya manusia dan alam, modal sosial serta perdagangan internasional diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitan ketiga isu tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat di daerah perbatasan antara Sebatik, Kalimantan Timur, Indonesia dengan Tawau, Sabah, Malaysia.

Konsep dan Definisi

Etnisitas: dinyatakan sebagai produk masa lalu yang mencakup asal yang sama, hubungan sosial, nilai sosial budaya yang didukung secara bersama yang berkaitan dengan bahasa dan agama.

Pengembangan sumber daya lokal: peningkatan hasil komoditi lokal termasuk distribusi pemasarannya.

Perdagangan internasional: perdagangan lintas batas yang melibatkan dua negara atau lebih.

Dinamika identitas etnik: perubahan etnis dilihat dari besaran, komposisi, dan ikatan kekeluargaan, jati diri, karakteristik, negara-bangsa, nasionalisme dari kelompok etnik yang ada di wilayah perbatasan.

Kondisi sosial demografi: gambaran penduduk yang dilihat dari jumlah, komposisi, persebaran, serta tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, maupun status kesehatannya.

Modal sosial: ‘agregat sumber-sumber daya potensial dan aktual yang berhubungan dengan kepemilikan dan jaringan yang berlangsung lama karena adanya hubungan yang terinstitusionalisasi dan saling mengakui’. Komponen pentingnya meliputi saling percaya, norma resiprositas, jaringan sosial, toleransi dan kerjasama kolektif.

Kerjasama kawasan regional: kerjasama kolaboratif dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan di daerah perbatasan.

1.5. Metodologi

Penelitian dilaksanakan di kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

- **Penelitian tahun pertama (2008)** membahas masalah persoalan etnisitas di daerah perbatasan. Pembahasan masalah etnisitas ini dianggap penting mengingat etnisitas sebagai sumber konflik yang seringkali muncul ke permukaan. Oleh karena itu perlunya pemahaman konsep mayoritas dan minoritas terhadap masyarakat di perbatasan. Masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri, nelayan pedagang, dan birokrat perlu memahami peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, juga dibahas mengenai aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan penduduk di wilayah perbatasan. Komoditi yang diperdagangkan tidak hanya ikan, tetapi juga coklat. Perkebunan coklat dikembangkan di kabupaten Nunukan seperti di kecamatan Sebatik, yang hasilnya dijual ke Sabah Malaysia. Di Sabah, coklat tersebut diolah dalam bentuk bentuk bahan minuman bermerk milo yang tidak hanya dipasarkan di daerah itu, tetapi kembali lagi ke Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan di Provinsi

Kalimantan Timur. Selain itu, juga dibahas pembahasan potensi wilayah perbatasan yang diharapkan mampu membangun sarana dan prasarana untuk kawasan wisata.

- **Penelitian tahun kedua (2009)** akan dilaksanakan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Penelitian ini mengkaji masalah modal sosial dengan melihat pada jaringan sosial (*social network*), rasa saling percaya (*reciprocal trust*) dan pranata sosial dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional. Adapun fokus yang dibahas adalah bagaimana potensi-potensi sumber daya manusia yang ada dapat dibangkitkan dan dibentuk menjadi modal sosial yang mampu mensinergikan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pengenalan modal sosial diharapkan mampu membangkitkan semangat membangun daerah dalam kaitannya dengan kohesifitas sosial dan mengurangi potensi-potensi konflik di masyarakat yang cenderung menjadi bencana sosial (*social disaster*).
- **Penelitian tahun ketiga (2010)** akan menyusun model atau sistem peringatan sosial dini (*social early warning system*). Konsep ini akan dikaitkan dengan nasionalisme dan ketahanan nasional yang perlu dilakukan terhadap masyarakat di perbatasan yang cenderung menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar karena munculnya berbagai kepentingan global.

1.6 Hipotesis

Keragaman etnis yang dikelola dengan baik merupakan modal sosial yang penting untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam upaya memajukan perdagangan internasional sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut, Yekti Maunati, Lamijo dan Taufik Abdullah, 2004a. *Trade Contacts in the Cross Border-Areas between Thailand and Burma 1900-2002* (Jakarta: Research Center for Regional Resources, LIPI).
- Ardhana, I Ketut. 2004b. "Ethnic Minority in East Kalimantan, Indonesia: Encountering Globalization". Makalah dipresentasikan pada *the IFFSO Workshop at the Naresuan University*. Bangkok-Thailand, November 19-20.
- Ardhana, I Ketut, Jayl Langub dan Daniel Chew 2004c. *Border of Kinship and Ethnicity: Cross Border Relations between the Kelalan Valley Sarawak and the Bawan Valley, East Kalimantan*. Dalam *Borneo Research Bulletin*, Vol 35. Helsinki-Finland: University of Helsinki.
- Ardhana, I Ketut, Yekti Maunati, Dundin Zaenuddin dan Sunarti Purwaningsih, 2006. *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi Pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur: Studi Kasus Wilayah Krayan dan Long Pasiah*". Dana kompetitif LIPI tahun 2006 yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Regional (PSDR).
- Ardhana, I Ketut. 2007a. "Trade Contacts in the Cross Border Areas between Cambodia and Thailand". Makalah dipresentasikan pada Konferensi ASEAN ke-40 "The ASEAN in Its Fortieth Year Looking Back and Looking Forward". Hanoi-Vietnam: Faculty of Social Sciences and Humanities- Vietnam National University, 19 Juli.

- Ardhana, I Ketut. 2007b. "People, Trade Contact and Globalization in the Border Area Between Thailand and Laos". Makalah dipresentasikan pada "The 5th International Convention of Asia Scholars (ICAS 5)" di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC). Kuala Lumpur-Malaysia dari tanggal 2 sampai dengan 5 Agustus.
- Barth, Fredrik (1969). "Introduction", dalam Fredrik Barth (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget. London: George Allen & Unwin.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Chongkittavon, Kavi. "Evaluating Western Media Perceptions of Thailand after the Bali Bombing", dalam Kumar Ramakhrisna dan See Seng Tan. *After Bali: the Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore: World Scientific, 2003.
- Eller, Jack David *from Culture to Ethnicity to Conflict: An Anthropological Perspective on International Ethnic Conflict*, the University of Michigan Press, the United States of America, 1999
- Eriksen, Thomas Hylland 1993. *Ethnicity & Nationalism: Anthropological Perspectives*. London and Boulder, Colorado: Pluto Press
- Goldscheider, Calvin. "Population, Ethnicity, and Nation-Building: Themes, Issues, and Guidelines", dalam *Population, Ethnicity, and Nation Building*. Oxford: Westview Press, 1995.
- Hall, Stuart 1992. "The Question of Cultural Identity", dalam Stuart Hall, David Held, dan Tony McGrew (eds.), *Modernity and its Future*. Cambridge: Polity Press in association with Open University.

- Hall, Stuart, Held, David dan McLennan, Gregor (1992), "Introduction", dalam Stuart Hall, David Held, dan Tony McGrew (eds.), *Modernity and its Future*. Cambridge: Polity Press in association with Open University.
- Karim, M. Kasman. "Sebatik, Wilayah Perbatasan yang dilupakan", 11 Juli 2007 dalam www.kaltimpost.web/id
- Kahn, Joel S. 1993. *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. Providence/Oxford: BERG
- Kahn, Joel S. 1994. "Subalternity and the Construction of Malay Identity", dalam Alberto Gomes (ed.), *Modernity and Identity: Asian Illustrations*. Comparative Asian Studies Series, Bundoora, Victoria Australia: La Trobe University Press.
- Kahn, Joel S. 1995. *Culture, Multiculture, Postculture*. London, Thousand Oaks, and New Delhi: SAGE Publications
- Kahn, Joel S. 1997. Culturalizing Malaysia: Globalism, Tourism, Heritage, and the City in Georgetown. dalam Michel Picard & Robert E. Wood (eds.), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Kahn, Joel S. 1998. "Southeast Asian Identities: Introduction", dalam Joel S Kahn (ed.), *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*. Singapore: ISEAS.
- Kerjasama Kementerian PDT dengan SESKOAD, *Laporan Akhir Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan Ditinjau Dari Aspek Kesejahteraan dan Keamanan* (Bandung: Desember 2006).
- King, Victor T. 1993. *The Peoples of Borneo*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.

- King, Victor T. 1978. "The Maloh", dalam Victor T. King (ed.), *Essays on Borneo Societies*. Oxford: Oxford University Press published for the University of Hull, Hull Monographs on South-East Asia No 7.
- Kipp, Rita Smith. 1993. *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. The United States of America: The University of Michigan Press.
- Laporan Akhir Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan Ditinjau Dari Aspek Kesejahteraan dan Keamanan*. Bandung: Kerjasama Kementerian PDT dengan SESKOAD, Desember 2006.
- Latifa, Ade (dkk). *Penduduk dan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan Provinsi Suloawesi Utara dan Kalimantan Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006.
- Maunati, Yekti. 2000. *Contesting Dayak Identity: Commodification and the Cultural Politics of Identity in East Kalimantan*. Ph.D. Dissertation, Latrobe University, Melbourne, Australia.
- Maunati, Yekti. 2003. "The Formation of Cultural Identity: The Dayak in East Kalimantan", Makalah dipresentasikan pada Workshop tentang "*Ethnic Minorities in Southeast Asia*", Universities Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia, 29-30 Maret 2003.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Maunati, Yekti. 2005. "Sharing the Fruit of Forestry Products: Indigenous People and Their Incomes in the Forestry Sector in East Kalimantan, Indonesia", dalam *Asian Development Bank Institute* (ADBI) Research Paper (www.adbi.org).

Moses, Jonathan W. 2006. *International Migration*. London & New York: ZED Books.

Sabah Secara Ringkas In Brief (Perpustakaan UMS).

Sabah: Malaysian Borneo Diving (Brosur).

Tagliacozzo, Eric. 2007. *Secret Trades, Porous Borders: Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915*. Singapore: NUS Press.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2005. "Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21". Sebuah Pengantar", dalam *Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan, Malaysia Timur (Sarawak-Sabah)*. Jakarta: Sinar Harapan.

Toyota, Mika. 2004. "Who Are the "Illegal Migrants" at the Thai-Myanmar Border". Makalah dipresentasikan pada *2nd SEASREP Workshop on "Borders and Borderlands in Southeast Asia"*, PSDR-LIPI, SEASREP dan the Toyota Foundation, Jakarta, 25-26 Maret.

Winzeler, Robert L. 1997. "Modern Bidayah Ethnicity and the politics of Culture in Sarawak", dalam Robert L. Winzeler (ed.), *Indigenous Peoples and the State: Politics, Land, and Ethnicity in the Malayan Peninsula and Borneo*. New Have, Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, Monograph 46/Yale Southeast Asia Studies

Winzeler, Robert L. 1997, "Introduction", dalam Robert L. Winzeler (ed.), *Indigenous Peoples and the State: Politics, Land, and Ethnicity in the Malayan Peninsula and Borneo*. New Haven, Connecticut: Yale University Southeast Asia Studies, Monograph 46/Yale Southeast Asia Studies.

2

PULAU NUNUKAN: DARI “POHON BERINGIN” HINGGA TANJUNG HARAPAN

I Ketut Ardhana

2.1. Pendahuluan

Pulau Nunukan berada di lini terdepan dan paling utara di antara kabupaten di Indonesia, sehingga kabupaten ini dijuluki sebagai kabupaten terdepan di Indonesia. Kabupaten ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak pintu masuk dan keluar manusia dan barang dari Indonesia ke Malaysia. Namun jalur ini belum dikembangkan secara maksimal dalam konteks pengembangan bidang perdagangan dan perekonomiannya. Tidak hanya itu, bahkan ada anggapan bahwa jalur ini cukup sensitif karena ditengarai pernah dimanfaatkan kelompok teroris menuju ke Mindanao wilayah Filipina Selatan. Dengan posisi terdepan itu mengandung makna bahwa kawasan itu dipertimbangkan sebagai kawasan strategis yang dimiliki oleh Nunukan yang menyebabkan bahwa posisi ini diharapkan dapat diberikan perhatian lebih banyak tidak hanya oleh pemerintah Indonesia saja, namun juga oleh pemerintah Malaysia dan Filipina dalam kaitannya dengan potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan yang dimilikinya. Terlebih-lebih bahwa masa depan adalah masa “Abad Samudra Pasifik” yang memegang peranan penting tidak hanya bagi negara-negara itu saja, tetapi juga menjadi berbagai kepentingan seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, Taiwan dan negara-negara di sekitarnya. Semua potensi ini dapat dijadikan sebagai “mesin pertumbuhan” (*engine of growth*) dalam mengalekserasikan program pembangunan dan peningkatan daya saing

(*competitiveness*) masyarakat perbatasan yang terletak di Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Nunukan sendiri hingga kini masih terdapat ketimpangan kemajuan pembangunan antarwilayah yang cukup signifikan. Kendala yang dihadapi itu terjadi antara wilayah timur/pesisir (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik), wilayah daratan bagian tengah (Nunukan Daratan, Sembakung, Lumbis, dan Sebuku), dan wilayah daratan bagian barat (Krayan). Stagnasi sebagai hambatan dalam program pembangunan ini perlu dicarikan solusinya melalui berbagai kebijakan lintas sektoral atau antar departemen agar tidak menghambat proses pembangunan Kabupaten Nunukan menuju pusat perdagangan internasional, khususnya di kawasan ASEAN bagian timur. Selain kerjasama di tingkat regional, kerjasama di tingkat nasional dan lokalpun diupayakan misalnya Kabupaten Nunukan dapat pula bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya termasuk kota-kota seperti Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur, dan bahkan dengan kota-kota besar lainnya seperti Makassar di Sulawesi Selatan dan Surabaya di Jawa Timur.

Masyarakat di Pulau Nunukan yang mendiami wilayah Indonesia yang paling berada di bagian utara ini berkeinginan secara aktif untuk terlibat dalam peredaran dinamika kemajuan regional di kawasan ini, lebih-lebih di masa yang akan datang diwujudkan dengan Abad Pasifik (sebagai referensi lihat: Nohd. Noor Yazid, 2000: 3). Selain sebagai kabupaten terdepan, masyarakat yang berada di Kabupaten Nunukan ini diharapkan mampu memainkan peranan penting sebagai pintu gerbang internasional Indonesia di lintang utara bagian tengah. Hal ini dapat dimengerti karena Kabupaten Nunukan ini berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak dan Negara Bagian Sabah (Malaysia). Jalur Nunukan merupakan jalur terbesar di bagian timur dan mempunyai keunikan karena Nunukan sebagai sebuah pulau yang berfungsi sebagai tempat transit di kawasan perbatasan (Tirtosudarmo, 2002: 11).

Dilihat dari intensitas pembangunan fisik yang dikembangkan di wilayah perbatasan daratan antara dua negara ini dapat dikatakan bahwa Malaysia lebih berkembang seperti yang dapat dilihat di perbatasan Indonesia Sarawak di Ba Kelalan dibandingkan dengan wilayah Krayan Kalimantan Timur di Indonesia. Demikian pula apabila dilihat perkembangan perbatasan perairan laut dapat dikatakan bahwa pembangunan di Tawau Sabah di Malaysia, jauh lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur Indonesia (Ardhana, 2007). Namun demikian dapat dikatakan bahwa bagaimana pun juga kawasan perbatasan itu banyak dikunjungi pendatang, karena kawasan itu dapat dianggap sebagai ‘magnet’ yang mampu memberi daya tarik bagi pengembangan masa depan sehingga mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat Nunukan yang menyangkut masalah komposisi penduduk, pekerjaan, tata ruang, sumber daya alam, dan sebagainya (Haba, 2000: 196).

Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana awal perdagangan dan perkembangan ekonomi yang digerakkan oleh mereka dan suku yang lain sehingga mereka tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tetapi juga di bidang politik yang diharapkan mampu membawa perkembangan Nunukan yang lebih maju terutama ke arah terbentuknya perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia. Dengan analisis dinamika sosial ekonomi di awal perkembangannya (sebagai referensi lihat misalnya Haba, 2002:—9), diharapkan dapat dipahami bagaimana kontribusi mereka di masa lalu, untuk memahami perkembangan kekinian di Nunukan dalam memberikan kontribusi ke arah pemahaman peran Nunukan dalam perdagangan internasional di kawasan perbatasan di masa depan.

2.2. Tinjauan Geografis

Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak antara 115.33' sampai dengan 118.3' Bujur Timur dan 3.15'00" sampai dengan 4.24'.55" Lintang Utara. Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia Timur, mempunyai luas wilayah 14.263,7 Km². Nunukan merupakan wilayah paling utara di Kalimantan Timur yang mempunyai iklim panas dengan rata-rata suhu 31°C, suhu terendah 22°C terjadi pada bulan Januari dan September. Sementara suhu tertinggi 32,1°C terjadi pada bulan Mei.



Gambar 2.1 Keadaan alam di Pulau Nunukan

Kabupaten Nunukan ini dibentuk tahun 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Kondisi alam bergunung dan dipenuhi dengan deretan perbukitan yang variatif dan memiliki 10 sungai diantaranya Sungai Sembakung dengan panjang 278 km, sementara Sungai Tabut sebagai sungai terpendek dengan panjang 30km. Kabupaten Nunukan ini juga memiliki 17 pulau (Lihat: *Kabupaten Nunukan Dalam Angka (Nunukan Regency in Figures*, Nunukan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, 2007), hal. 3). Dalam

Lintasan Sejarah Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bulungan berdasarkan UU No.47 thn 1999, yang diubah menjadi UU No 7 thn 2000, dengan luas wilayah 14.263,68 km² terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Sebatik, Lumbis, Sembakung dan Krayan. Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (2004).

Adanya posisi geografis yang strategis inilah Kabupaten Nunukan dipertimbangkan memiliki harapan di masa depan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia khususnya Sarawak dan Sabah. Dicatat bahwa wilayah Pulau Nunukan ini khususnya dalam konteks Kabupaten Nunukan ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan Sabah (Malaysia Timur), di sebelah timur dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah barat dengan Sarawak (Malaysia Timur).

2.3. Sejarah Pulau Nunukan:

Dari “Pohon Beringin” Hingga Tanjung Harapan

Menurut cerita tradisi lisan (*oral tradition*) dikatakan bahwa Pulau Nunukan “ditemukan” oleh suku Tidung, atau Tirun atau Tidung dalam dialek Sulu atau Tausug. Mereka dipercaya berasal dari kerajaan Tidung, juga kemungkinan pula oleh etnis Tidung yang berasal dari kesultanan Bulungan. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan-perdebatan sekitar asal muasal Orang Tidung ini. Dipertanyakan apakah Orang Tidung itu merupakan kelompok etnik yang berbahasa Kayan, atau tidak? Apakah etnonim Tidung berasal dari *tideng* atau *tidong* yang berarti gunung atau lembah gunung? (www.kuis.ac.jp).

Dipercaya pula bahwa Orang Tidung adalah orang lokal yang bergerak ke daerah pantai dan memainkan peranan penting dalam perdagangan kawasan luar daratan sebagai pengaruh dari kekuasaan Brunei. Di masa lalu Brunei dikatakan mengekspansi ke Borneo timur laut sampai ke Kepulauan Sulu. Namun reaksi diberikan oleh Orang Sulu yang menyerang kembali Orang Tidung dalam kaitannya dengan pengakuan supremasi kekuasaan Sulu dan mengumpulkan upeti. Akan tetapi, pada akhir abad ke-18, Orang Tidung dicatat telah mengalami penurunan masa kejayaannya dan kehilangan jaringan perdagangan dan kembali ke wilayah daratan sebagai petani-petani lokal dan pengumpul hasil hutan. Tampaknya dalam kaitan ini migrasi Orang Tidung mulai menyebar ke wilayah-wilayah Kalimantan Timur lainnya di masa-masa berikutnya (www.kuis.ac.jp). Akibat proses ini menyebabkan terjadinya perubahan kepercayaan masyarakat dari animisme yang massal menjadi penganut Islam yang terjadi antara akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19.

Tampaknya hubungan pelayaran di masa lalu telah terjadi di antara penduduk yang mendiami pulau tersebut dalam masa yang cukup panjang. Dalam kaitannya dengan perjalanan sejarah itu tampaknya beberapa elit Tidung bergerak ke pusat-pusat pemerintahan politik yang lebih jauh di pedalaman. Mereka dikatakan berhasil memonopoli sumber-sumber produk hutan yang bernilai tinggi seperti sarang burung walet. Diantara pemerintahan yang paling sukses dalam kaitannya dengan peran yang dimainkan oleh Orang Tidung ini adalah dengan berkembangnya Kerajaan Bulungan itu, yang beraliansi dengan penduduk pedalaman, khususnya dengan suku Kayan (*the Kayanic*) yang dikenal sebagai pemburu kepala manusia itu (*headhunters*). Beberapa Orang Tidung ini pun secara lambat laun lebih dikenal sebagai Orang Bulungan. Sementara itu, beberapa kelompok etnik Tidung lainnya melanjutkan aktifitas kehidupan mereka dan bahkan tampak menentang aturan baru. Merekapun kemudian ditekan sehingga disebut sebagai perompak, tidak hanya oleh Orang Melayu pinggiran dalam kaitannya dengan kekuasaan

Sebatik dan sebagainya. Awalnya sungai itu tidak dikenal memiliki nama. Di tepi sungai itu dikisahkan ada sebuah pohon beringin yang mempunyai makna khusus bagi kebanyakan penduduk yang mengunjunginya di kala datang dari berlayar mencari ikan. Dikisahkan bahwa dalam pelayarannya ke laut lepas, para nelayan mengunjungi tempat yang ada sungainya itu. Berlayar berkelompok dengan perahu-perahu kayu mereka dari Sebuku itu sampai ke laut lepas dan akhirnya di siang hari mereka tertarik beristirahat di sungai itu. Di tepi sungai itu, terdapat pohon beringin dan di bawah pohon beringin itulah mereka sering singgah dan beristirahat sambil berkomunikasi tentang kehidupan mereka sehari-hari. Di tempat itu mereka bertemu dan sering menyebut nama pohon beringin itu yang dalam bahasa Tidung artinya “*Nunuk*”. Hingga sekarang kata Nunuk itu berarti pohon beringin dan sungai yang sering dikunjungi itu pun kemudian dikenal sebagai Sungai Nunuk. Tempat itu selanjutnya dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air untuk keperluan mereka sehari-hari. Hingga sekarang wilayah itu masih dikenang oleh penduduk setempat. Dengan demikian terjadilah penyebaran kata Nunuk itu menjadi Nunukan sejalan dengan perkembangan migrasi penduduk ke wilayah itu. Sampai sekarang pula nama Nunukan itu menjadi nama untuk menyebut keseluruhan wilayah di pulau itu.

Bagaimana sebenarnya kisah awal tentang eksistensi etnik Tidung ini? Menurut tradisi sejarah lisan, nenek moyang orang Tidung awalnya mendiami Kinabatangan basin dan sebagian di Sipitang (Sabah Barat), Talisayan (Mindanao), dan Morotai (Halmahera). Migrasi ini dipercaya telah berlangsung ketika di masa-masa awal Orang Tidung masih memainkan peranan signifikan di peranan pusat dalam perdagangan maritim Brunei dengan kerajaan Sulu, Sulawesi dan kepulauan Maluku. Dikatakan bahwa Brunei menggunakan untuk mengorganisasikan orang pantai di pantai barat Kalimantan (Borneo), Bisaya untuk mengabdikan diri mereka sebagai kekuatan maritim mereka untuk melindungi wilayah mereka sejauh pulau-pulau Filipina bagian barat. Mereka bahkan

dianggap telah dijadikan tentara untuk wilayah bagian timur. Saat itu mereka masih menguasai perairan laut yang cukup luas ke Sulu, Balambangan, dan Labuan pada akhir abad ke-18, bahkan setelah jatuhnya hegemoni Tidung sepanjang pantai tenggara Kalimantan. Pada waktu itu mereka sudah menganut Islam, dan masih bisa berkomunikasi dengan kelompok tetangga mereka yang bukan Islam di dataran tinggi, khususnya dengan Orang Murut seperti halnya dengan Tenggalan (Tegala:n, Tengan), Tagal (Tagel, Tagol) dan Bulusu (Belusu, Berusu) di Kalimantan Timur atau dengan Orang Idahan dan orang sungai seperti Tembanua, Tombonuwo di Sabah. Mereka juga dikenal sebagai aliansi lama dengan seperti Orang Bajau, Basap (Lebu), dan orang Kayan, dengan siapa suatu saat membantu Orang Tidung mengontrol perdagangan dalam produk lokal. Orang Tidung bercampur dengan kelompok ini untuk membentuk pemerintahan pantai bersama. Dewasa ini, mereka lebih menyukai mengawini wanita tetangga yang Muslim seperti halnya dengan Orang Sulu, Brunei dan Arab sebagaimana halnya dengan Orang Melayu lokal (www.kuis.ac.jp).



Gambar 2.3. Pemeliharaan kawasan wisata

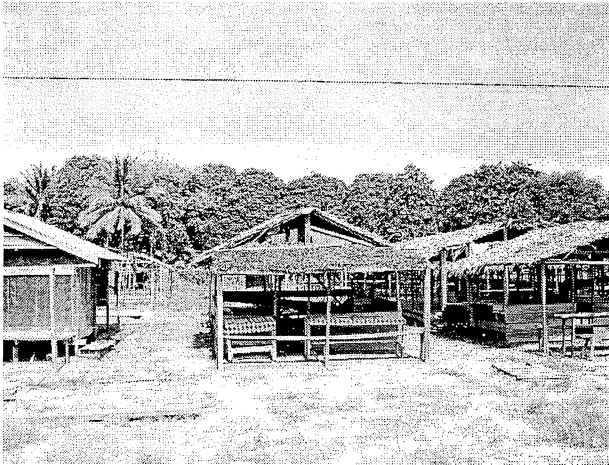
Haba (2002: 5) menyebutkan bahwa dari data-data sejarah disebutkan bahwa gelombang masuknya para pendatang dari wilayah ini ke Malaysia terutama ke Sabah telah berlangsung cukup lama, yaitu sebelum mengalirnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Nunukan untuk bekerja di sana sebagai pekerja perkebunan di kelapa sawit, rumah tangga dan jasa lainnya. Ia menambahkan bahwa ada berbagai penyebab yang menyebabkan migrasi tersebut. Diantaranya disebutkan bahwa ekspansi kolonialisme Spanyol terhadap Filipina yang menyebabkan migrasi berkelanjutan terutama terhadap Orang Bajau dan Suluk/ Tausug yang bermigrasi ke Sabah pada abad ke-15. Persebaran atau migrasi penduduk lainnya dari Kalimantan seperti etnik Banjar terutama setelah terjadinya perang Banjar melawan Belanda pada abad ke-19 dan juga mungkin sebagai akibat perang Goa terhadap Belanda menyebabkan terjadi migrasi penduduk ke dua etnik itu ke Kalimantan Timur, dan ke Nunukan pada khususnya. Disebutkan pula adanya migrasi gelombang kedua yang berkaitan dengan pembrontakan Mindanao pada tahun 1970—1977 yang diikuti dengan migrasi gelombang ketiga yang berkaitan dengan aspek ekonomi seperti adanya industri perkayuan (*logging industry*) di Sabah dan selanjutnya yang diikuti migrasi pencari kerja ke Sabah pada tahun 1978. Ini berarti bahwa pembangunan Nunukan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh yang kuat dari perkembangan pembangunan di Tawau (Sabah) (Tirtosudarmo, 2002: 11). Bahkan Haba (2002) menyebutkan bahwa adanya migrasi pendatang ke Sabah itu terutama bagi pendatang ilegal dari Indonesia yang datang secara transit di Kabupaten Nunukan dianggap menjadi “duri dalam daging” untuk relasi kedua negara antara Indonesia dan Malaysia (Haba, 2002: 5). Sementara itu, kelompok pendatang lainnya adalah kelompok Bugis, Jawa, Flores yang ikut memperkaya khazanah multikulturalisme di Nunukan itu. Memang muncul gesekan-gesekan sosial sebagai dinamika perkembangan ekonomi wilayah, namun perlu dicatat bahwa perbedaan etnik di kalangan mereka tampaknya menjadi daya kuat untuk memperkokoh tradisi masyarakat multi budaya di daerah tersebut.



Gambar 2.4. Aturan kunjungan ke kawasan wisata

Dewasa ini, Orang Tidung umumnya mendiami wilayah bagian utara Kalimantan Timur, yaitu dari Kabupaten Bulungan hingga ke Kabupaten Nunukan, dan sepanjang dari pantai timur Sabah, yaitu dari distrik Sandakan ke Tawau. Jumlah Orang Tidung ini diperkirakan sebanyak 70.000 hingga 80.000 orang. Mereka ini dikatakan telah bermigrasi dan kebanyakan diantara mereka tidak menggunakan bahasa nenek moyang mereka, hidup di pantai dan daratan Berau, Kutai atau Kutai Lama, Sangkulilang, Sangata, dan Pulau Anggana. Tambahan pula ada yang bermigrasi hingga pulau-pulau Sulu bagian selatan, Pulau Tidung Besar dan Kecil atau pulau-pulau Sulu bagian selatan seperti Sibutu, Simunul, Bangao, Sanga-sanga dan sebagainya. Tidak hanya di wilayah perbatasan Indonesia, di Sabah Barat bagian Malaysia juga dipercaya bahwa terdapat sekelompok orang yang disebut Murut dari Kuala Penyu, yang dikenal dengan Orang Tenggara atau Tenggara yang mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Tidung yang belum memeluk agama Islam. Kenyataannya bahwa bahasa yang dipergunakan juga dekat dengan bahasa Tarakan. Orang Tidung Tarakan masih ingat bahwa dahulu

pulau itu disebut dengan Tenggara atau Desa dari Raja Tara (k) setelah berdirinya kerajaan. Oleh karena itu tampaknya jumlah penduduk Tidung diperkirakan 100.000 kalau Bulungan juga dimasukkan dalam kelompok ini yang bercampur dengan Orang Kayan sebagaimana juga dengan Orang Melayu yang tidak lagi menganggap diri mereka sebagai orang Tidung.



Gambar 2.5. Kafe di kawasan wisata

Diakui bahwa suku Dayak Tidung yang merupakan penduduk asli di Pulau Nunukan Kalimantan dapat hidup secara damai dengan etnik lainnya yang berasal dari dunia kepulauan Indonesia lainnya.

Tabel 2.1 Konflik selalu dapat didamaikan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar sekali	32	32.0	32.3	32.3
	Benar	54	54.0	54.5	86.9
	Kurang benar	9	9.0	9.1	96.0
	Tidak benar	1	1.0	1.0	97.0
	Samasekali tidak benar	3	3.0	3.0	100.0
	Total	99	99.0	100.0	
Missing	System	1	1.0		
Total		100	100.0		

Kemajuan di bidang perdagangan dan ekonomi dengan negara tetangga tampak diperankan oleh suku Bugis yang dikenal sejak dulu mempunyai reputasi baik dalam dunia perdagangan atau juga sebagai pedagang perantara diantara penduduk di Indonesia hingga dewasa ini. Peran pebisnis dari Sulawesi Selatan ini berupaya bagaimana memanfaatkan potensi alam. Tirtosudarmo (2002:8) mencatat bahwa 60% penduduk berasal dari Sulawesi Selatan yang menguasai pasar di Lamejong, dapat dikatakan bahwa peranan yang dimainkan oleh mereka sangat signifikan.

Di kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur umumnya konsentrasi penduduk terjadi di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik. Pola Persebaran penduduk yang tidak merata kurang menguntungkan bagi pengembangan daerah terutama akan menimbulkan kesenjangan antar daerah juga berpengaruh terhadap daya akses terhadap pelayanan kesehatan yang ada. Seiring dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan jumlah penduduk mengalami perkembangan yang cukup pesat . Pada akhir 2005 jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan mencapai 115.210 jiwa dengan laju pertumbuhan 5,19 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini lebih banyak disebabkan karena letak strategis Nunukan yang terletak di jalur perdagangan (perbatasan) dan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang menarik minat orang luar datang

ke Nunukan. Pada tahun 2006 berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan sudah mencapai 122.772 jiwa. Sementara laju pertumbuhan penduduk 5,19 persen. Dapat dikatakan bahwa dengan tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk lebih banyak disebabkan karena banyaknya penduduk pendatang dari wilayah lain yang akan bekerja di Negara Sebelah (Malaysia). Apabila dilihat sebagai perbandingan maka dapat dilihat komposisi etnik Bugis ini dibandingkan dengan etnik yang lainnya pada tahun 2000 sebagai berikut.

Tabel 2.2 SUKU BANGSA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Banjar	7	7.0	7.4	7.4
	Tidung	9	9.0	9.6	17.0
	Bugis	46	46.0	48.9	66.0
	Jawa	14	14.0	14.9	80.9
	Lainnya	18	18.0	19.1	100.0
	Total	94	94.0	100.0	
Missing	System	6	6.0		
Total		100	100.0		

Dapat dikatakan bahwa dengan posisi Pulau Nunukan itu di perbatasan wilayah Kalimantan Timur, kondisi tiap kecamatan yang bervariasi menyebabkan penyebaran penduduk di Kabupaten Nunukan tidak merata. Kesulitan dalam ekspor barang-barang perdagangan yang diperoleh dari produk lokal mereka di masa lalu menyebabkan terciptanya kondisi yang menciptakan mereka ketergantungan dengan perkembangan ekonomi negara tetangga.

Dengan adanya heterogenitas penduduk maka Nunukan dapat dipertimbangkan sebagai masyarakat multi budaya. Meskipun konsep masyarakat multibudaya masih problematik secara umum masyarakat multibudaya sebuah kumpulan dari beraneka ragam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang exist satu sama lain diatas suatu wilayah dalam hal ini sebuah negara (Hoffmann-Nowotny 1996: 106). Hoffmann-Nowotny menekankan bahwa suatu masyarakat adalah multi budaya apabila sedikit saja sebuah atau lebih kelompok masyarakat dalam suatu jangkauan dari mayoritas dipisahkan. Namun demikian Hoffmann-Nowotny menyatakan bahwa kesadaran akan perasaan kebersamaan dan identitas menyeluruh kehidupan bersama dan membentuk suatu perasaan bersama akan ketentraman dan keamanan. Pengertian suatu masyarakat adalah masyarakat multi budaya apabila mayoritas dari etnis yang beranekaragam itu juga menunjukkan suatu struktur etnis yang multi, etnis yang beranekaragam itu menawarkan kontak-kontak mereka untuk semua pihak untuk menemukan pemecahan masalah yang diharapkan, menjamin integrasi etnis. Dilihat dari kategori yang ditawarkan ini memang tampak bahwa masyarakat Nunukan yang terdiri dari berbagai etnis itu memang menunjukkan struktur etnis yang multi. Tambahan pula bahwa diantara etnik yang beraneka ragam itu telah menawarkan kontak-kontak sebagaimana ketika terjadi konflik entik antara etnik Bugis dan etnik Dayak mereka pun menawarkan solusi secara bersama-sama yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak untuk tidak terulangnya kembali kasus konflik yang serupa. Hal ini mencerminkan pula adanya integrasi etnis yang memiliki kesempatan yang sama di antara etnik yang ada di Kabupaten Nunukan itu. Selain itu, dapat ditekankan pula bahwa konflik-konflik yang muncul di masa lalu telah dapat diselesaikan secara damai antara pimpinan masyarakat Bugis dan juga pimpinan masyarakat Dayak yang saat terjadinya konflik khusus didatangkan dari Kalimantan Tengah. Berdasarkan kesepakatan damai yang dapat diwujudkan itu mencirikan bahwa masyarakat Nunukan merupakan masyarakat yang multietnis dan multibudaya.

Tabel 2.3 Suku yang paling tinggi tingkat ekonominya.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bugis	96	96.0	97.0	97.0
Jawa	1	1.0	1.0	98.0
Lainnya	2	2.0	2.0	100.0
Total	99	99.0	100.0	
System	1	1.0		
Total	100	100.0		

Menarik untuk melihat bagaimana proses kemunculan masyarakat multibudaya di Nunukan ini yang tidak saja hidup dalam suasana harmonis namun riak-riak sosial juga tampak terjadi. Hal serupa, apabila dilihat terbentuknya masyarakat multibudaya di wilayah yang lain, juga mengalami hal yang serupa.¹ Tipologi ini menekankan bahwa Nunukan Kalimantan Timur yang termasuk Indonesia dan bagian dari Asia Tenggara mendapat pengaruh-pengaruh besarnya dari India, Cina dan daerah-daerah lainnya dari Asia Tenggara. Persebaran pengaruh kebudayaan besar itu tampaknya sangat berpengaruh terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat di Nunukan ini, dimana penduduk aslinya dianggap dari tradisi budaya Orang Tidung bagian dari sub-etnik Dayak. Orang Dayak pada umumnya menganggap bahwa nenek moyang mereka berasal dari Cina.

Di era selanjutnya sebagaimana telah terjadi di beberapa bagian wilayah Kalimantan misalnya terjadi *resettlement* penduduk yang mengharap

¹ Misalnya saja dalam konteks global dalam upaya memahami terbentuknya masyarakat multibudaya di Nunukan Kalimantan Timur ini sebenarnya termasuk kelompok yang menyatakan bahwa “masyarakat multibudaya dan multietnis di luar Eropa di Asia Tengah dan Asia Tenggara seperti India, Malaysia dan Indonesia. Di wilayah sub-kontinent India ini bertemu berbagai ras satu sama lain. India selalu melihat kemungkinan untuk menemukan sebuah modus kebudayaan bersama dalam kehidupan suku yang berbeda”.

mereka turun gunung dan mendiami berkelompok di dataran seperti terjadi di wilayah hulu Kalimantan misalnya di Krayan wilayah Nunukan Kalimantan Daratan (Ardhana, 2004) pada tahun 1970-an, ini juga terjadi di wilayah hilir terutama di wilayah pesisir pulau Kalimantan seperti di Pulau Nunukan ini. Di Pulau Nunukan ini misalnya dapat dikatakan adanya pembagian tanah yang dilakukan tahun 1960-an kepada penduduk untuk dapat diusahakan dalam bidang pertanian. Pada saat itu, wilayah ini disebut Mamolo yang berada paling selatan di Pulau Nunukan itu. Namun karena wilayah itu berhasil dikembangkan kemudian diberi nama Tanjung Harapan dimana sebagian besar penduduknya adalah etnis Bugis yang beragama Islam. Selain Bugis juga terdapat etnis lainnya seperti Jawa, Timor dan sebagainya. Etnis Jawa misalnya sejak dahulu sudah mengadakan kontak perdagangan di wilayah Pulau Nunukan pada khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya. Menurut tradisi lisan yang ada bahwa memang mereka dikatakan ada yang berasal dari penyebaran program transmigrasi yang dilakukan pemerintah di tahun 1980-an khususnya di daratan Kalimantan yaitu di wilayah Simanggaris dan Sebuku. Mereka dikatakan di sana diberikan lahan pertanian dan ada bahkan yang berhasil. Di pihak ada yang lain yang tidak berhasil ada yang menjual lahan yang diberikan lalu balik kembali ke Jawa, namun ada juga yang bermigrasi ke wilayah lainnya di Kalimantan diantaranya ada yang sampai ke Pulau Nunukan. Di sinilah mereka mengembangkan usaha baru. Tidak diketahui pasti ada atau berapa yang bermigrasi sampai ke Tawau Malaysia. Akan tetapi yang jelas bahwa penduduk Tawau hampir delapan puluh persen adalah dulunya orang Indonesia yang mempunyai etnis Bugis, Jawa, Timor dan sebagainya. Etnis Jawa sudah mulai mendatangi daerah ini sebagai imbas dari program transmigrasi tahun 1980-an dan sebagai dampak krisis tahun 1997/1998 yang menyebabkan orang Jawa mendatangi wilayah ini pada tahun 1998.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh R. A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan. Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi dua kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan **Kabupaten Nunukan**, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan. Pada tanggal 17 Juli 2007, dalam Sidang Paripurna DPR RI telah disetujui pembentukan kabupaten baru yaitu Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan pemekaran dari wilayah **Nunukan** dan Bulungan. Dari **Nunukan**, kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

Di masa lalu Nunukan hanya dikenal sebagai sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan. Namun sejak tahun 1999 Nunukan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan. Dengan rentangan waktu yang panjang Nunukan telah tampil sebagai sebuah kabupaten yang memberi kontribusi besar dalam pembangunan di Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan posisi strategis yang dimilikinya yang memungkinkan berkembang sebagai pusat perkembangan perdagangan dan ekonomi dalam peta lalu lintas antar negara khususnya menuju pusat perdagangan lintas batas dan ke arah terbentuknya

perdagangan internasional di kawasan ini. Pembentukan Kabupaten Nunukan ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Setelah melalui masa persiapan sekitar satu tahun, pada tanggal 11 April 2001 dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nunukan periode 2001-2006 dalam sidang paripurna DPRD kabupaten Nunukan. Dalam sidang yang berjalan penuh dinamika dan semangat demokrasi, akhirnya terpilih pasangan H. Abdul Hafid Ahmad sebagai Bupati dan Drs. Kasmir Foret, MM sebagai wakil Bupati Nunukan dan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur Suwarna AF pada tanggal 30 Mei 2001.

Pada tahun 2002 Kabupaten Nunukan banyak menjadi perhatian Nasional akibat terjadinya pemulangan TKI besar-besaran dari Malaysia. Tak pelak, wakil presiden Hamza Haz, beberapa menteri termasuk Menko Kesra Yusuf Kalla, dan sederetan artis ibu kota berkunjung ke Nunukan. Atas kesigapan pemerintah Daerah dan dukungan pemerintah propinsi dan pusat, akhirnya masalah TKI ini dapat diselesaikan. Sebagai Wilayah perbatasan, Kabupaten Nunukan juga menghadapi ancaman keamanan terutama kekayaan hutan, laut dan pulau-pulau perbatasan. Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di kecamatan Sebatik, akhirnya lepas dari pangkuan ibu Pertiwi, setelah Malaysia memenangkan sengketa kepemilikan atas kedua pulau itu di pengadilan Internasional, Den Haag, Negeri Belanda.

Sebagaimana diketahui bahwa jalur pelayaran internasional yang melewati kabupaten ini merupakan jalur laut kepulauan Indonesia yang memiliki aksesibilitas ke Asia Pasifik. Saat ini dianggap bahwa Kabupaten Nunukan memainkan peranan penting dalam upaya memperkecil kesenjangan kemajuan pembangunan antara wilayah bagian selatan dan wilayah bagian utara di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan di Kalimantan Timur bagian selatan (Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Samarinda, Kota

Balikpapan, Kota Bontang) saat ini jauh meninggalkan laju pembangunan di Kalimantan Timur bagian utara (Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kota Tarakan). Akan tetapi, Kabupaten Nunukan yang memiliki berbagai potensi di sektor agroindustri (khususnya industri hasil perkebunan dan kehutanan), kelautan, perdagangan internasional, jasa pelabuhan, dan pariwisata perlu dikembangkan dalam meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa Nunukan dianggap memiliki posisi strategis dan peranan penting di tingkat regional dan internasional, khususnya di derah bagian utara Selat Makassar. Namun sayang sekali bahwa posisi dan peranan strategis ini belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Nunukan ini dan perkembangan di wilayah sekitarnya. Berbagai pendekatan diupayakan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nunukan. Motto Kabupaten Nunukan yang dikembangkan adalah “*Penekindidebaya*” yang artinya “membangun daerah” yang berasal dari bahasa suku Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di **Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia**.

Sesuai dengan tuntutan optimalisasi pelayanan publik pada tahun 2003 kabupaten Nunukan mekar menjadi tujuh kecamatan setelah terbentuknya kecamatan Sebuku dan Krayan Selatan. Pada tahun 2003 terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran di Nunukan ketika para pekerja gelap asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dideportasi kembali ke Indonesia lewat Nunukan. Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlkan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar delapan unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau Malaysia. Di Kota Tawau sendiri banyak sekali orang Indonesia (baik WNI/ atau warga Malaysia) yang berasal dari Indonesia terutama dari suku bangsa Bugis Bone.

Kabupaten Nunukan berupaya bangkit dari ketertinggalan pembangunan, infrastruktur maupun suprastruktur. Selain sarana dan prasarana yang sebagian sudah tersedia, masalah isolasi daerah juga sudah mulai diatasi. Pembukaan dan perbaikan jalan dilakukan di **Nunukan**, Lumbis, Sebatik, Sembakung, sedangkan di kecamatan Krayan dan Krayan Selatan diberikan subsidi ongkos angkutan udara untuk menjangkau sampai kedesa-desa. Letak yang strategis ini menyebabkan kabupaten Nunukan menjadi daerah pelintas bagi TKI yang akan bekerja di Malaysia dan Brunei Darussalam. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Nunukan secara langsung terlibat dalam pergaulan internasional. Banyak kabupaten-kabupaten yang muncul di Indonesia terlebih lebih setelah pemekaran wilayah dicirikan oleh adanya struktur masyarakat yang memiliki nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai multikulturalisme yang terbentuk itu dapat dipahami apabila kita memperhatikan sejarah dan proses migrasi dan sejarah yang berlangsung cukup panjang di daerah itu. Dalam hal konflik misalnya dapat dikatakan bahwa pada hari Minggu 22 Juli 2007 terjadi konflik antar suku terjadi di pulau Nunukan (dekat termasuk kawasan Ambalat) yang juga merupakan pintu masuk TKI ke Malaysia daerah timur. Konflik antar suku tersebut melibatkan suku Dayak vs suku Bugis. Sampai saat sekarang perasaan permusuhan masih ada, namun bagaimana pun juga mereka berupaya untuk melupakannya. <http://www.untuksemua.com/lounge/perbatasanyangmencekam-4289/>. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam proses perkembangannya tampak adanya dinamika perkembangan masyarakat yang dicirikan pula oleh adanya ketegangan dan konflik yang muncul selain kerjasama diantara mereka.

Selanjutnya perkembangan yang meningkat di Nunukan banyak dipengaruhi dengan dibukanya Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Timur, Indonesia. Melalui pelabuhan ini merupakan pintu keluar Indonesia bagi para TKI yang berniat mengadu nasib di Negeri Jiran. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perjalanan Nunukan-

Tawau hanya ditempuh dalam waktu kurang satu jam perjalanan dengan speed boat. Dewasa ini terdapat delapan boat yang setiap harinya melayani rute Nunukan-Tawau dan sebaliknya dan harga tiketnya pun berbeda-beda. Pemberangkatan dari Nunukan menuju Tawau, tiket bertarif Rp 75.000. Namun, jika berangkat dari Tawau, tiketnya 45 Ringgit. Jarak yang dekat inilah yang membuat jalur Nunukan-Tawau menjadi salah satu favorit bagi para TKI. Mulai dari yang legal, hingga yang menggunakan visa lawatan hingga Pas Lintas Batas untuk bekerja. Pihak Balai Pembantu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) di Nunukan pun mencatat sekitar 200 TKI legal diberangkatkan lewat pelabuhan ini. Namun, TKI yang ilegal bisa empat atau lima kali lipatnya. <http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/?id=20235>.

2.4. Simpulan

Bukti kesejarahan dan peninggalan-peninggalan masa lalu membuktikan akan peran penting Pulau Nunukan yang berbatasan dengan negeri tetangga, khususnya dengan Tawau-Sabah (Malaysia). Di masa lalu pembangunan di Pulau Nunukan dapat dikatakan masih terabaikan. Tertinggalnya kawasan Nunukan dari perhatian yang maksimal dari pemerintah pusat di masa lalu telah menyebabkan daerah perbatasan rawan terhadap berbagai kasus yang merugikan negara seperti tebang liar, pertambangan illegal, ekspor perikanan yang dilakukan secara illegal dan berbagai penyelundupan.

Pulau Nunukan mencuat ke permukaan sehubungan dengan jalur-jalur sosial, ekonomi, budaya dan politik yang melintas di perairan ini. Ada dua hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan menjulangnya nama Nunukan di berbagai media Indonesia baik lokal maupun nasional akhir-akhir ini. Pertama, peran penting yang dimainkan melalui jalur ini terutama dalam kaitannya dengan migrasi yang dilakukan para tenaga

kerja Indonesia (TKI) menuju Tawau sabah Malaysia. Kondisi geografis ini menyebabkan tingkat migrasi penduduk yang tinggi akibatnya perkembangan penduduk di Kabupaten Nunukan mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat dibangun sebuah jaringan regional (regional network) dalam rangka menghadapi peningkatan intensitas persaingan antarwilayah, baik di level regional, nasional, maupun internasional. Selain kerja sama dalam negeri, Kabupaten Nunukan juga dapat menjalin kerja sama dengan beberapa wilayah di negara tetangga (seperti Tawau, Kuching, Bandar Sri Begawan, Davao) dalam rangka menggalang kekuatan menghadapi persaingan di lingkup wilayah yang lebih luas (global). Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten saat ini perlu mempunyai perhatian yang lebih serius untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang terletak di kawasan perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan.

Daftar Pustaka

- Appel, Amity C. P. 1986. The Belusu of East Kalimantan: Ethnographic profile and basic word list, NRB 18-2: 166—175.
- Appel, G. N. 1972. Rungus Dusun, dalam Lebar, F.M. (ed.). *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia (Vol. I). Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar*: 150-153.
- Ardhana, I Ketut. Yekti Maunati, Lamijo dan Taufik Abdullah, 2004a. *Trade Contacts in the Cross Border-Areas between Thailand and Burma 1900-2002* (Jakarta: Research Center for Regional Resources, LIPI).
- Ardhana, I Ketut. 2004b. "Ethnic Minority in East Kalimantan, Indonesia: Encountering Globalization". Makalah dipresentasikan pada *the IFFSO Workshop at the Naresuan University*. Bangkok-Thailand, November 19-20.

- Ardhana, I Ketut, Jayl Langub dan Daniel Chew 2004c. *Border of Kinship and Ethnicity: Cross Border Relations between the Kelalan Valley Sarawak and the Bawan Valley, East Kalimantan*. Dalam Borneo Research Bulletin, Vol 35. Helsinki-Finland: University of Helsinki.
- Ardhana, I Ketut. 2007a. "Trade Contacts in the Cross Border Areas between Cambodia and Thailand". Makalah dipresentasikan pada Konferensi ASEAN ke-40 "The ASEAN in Its Fortieth Year Looking Back and Looking Forward". Hanoi-Vietnam: Faculty of Social Sciences and Humanities- Vietnam National University, 19 Juli.
- Ardhana, I Ketut. 2007b. "People, Trade Contact and Globalization in the Border Area Between Thailand and Laos". Makalah dipresentasikan pada "The 5th International Convention of Asia Scholars (ICAS 5)" di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC). Kuala Lumpur-Malaysia dari tanggal 2 sampai dengan 5 Agustus.
- Haba, John. 2000. *Dinamika Sosial Budaya di Daerah Perbatasan Kalimantan, Sarawak dan Sabah*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).
- Haba, John. 2002. "Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah: Pendahuluan dan Temuan", dalam John Haba, (et al.) *Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan-Timur dan Sabah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Mintzel, Nowotny, Hoffman.
<http://dicky.wahyupurnomo.com/detik/?id=20235>.
<http://www.untuksemua.com/lounge/perbatasanyangmencekam-4289/>.

<http://www.kuis.ac.jp>.

Tirtosudarmo, Riwanto. "Kalimantan Timur dan Sabah: Dinamika Mobilitas Penduduk di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia", dalam John Haba (et al.). *Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan-Timur dan Sabah*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), 2002.

3

ETNISITAS DI NUNUKAN

Yekti Maunati

3.1. Pendahuluan: Studi Etnisitas

Jika membahas masalah etnisitas kita sering mengkaitkannya dengan budaya, tetapi hubungan antara budaya dan etnisitas itu sendiri tidak selalu pasti atau tetap. Misalnya, Eller berargumentasi bahwa tidak semua kelompok etnik yang budayanya berbeda berarti kelompok-kelompok etnik tersendiri, dan tidak semua kelompok-kelompok etnik berbeda budayanya (1999:8). Oleh karena itu, dalam kaitan dengan argumentasinya tersebut Eller menganggap etnisitas dan budaya tidak selalu berada pada posisi hubungan yang ideal. Jika kita melihat orang-orang Melayu sekarang ini di Kalimantan, mereka mungkin memiliki budaya yang sama dengan orang-orang Dayak karena orang-orang Dayak yang berpindah atau masuk agama Islam kemudian dianggap sebagai 'orang Melayu' atau 'masuk Melayu' (lihat Coomans, 1987). Kriteria yang menentukan individu dimasukkan dalam kelompok Dayak atau Melayu sering berubah sejalan dengan waktu (Maunati, 2000). Menyitir dari DeVos, Eller (1999) menjelaskan bahwa etnisitas adalah penggunaan aspek-aspek budaya secara simbolik untuk membedakan antara mereka dan kelompok lain. Kelompok-kelompok etnik tidak memakai semua aspek dari budaya dan sejarah sebagai penanda identitasnya. Selain itu, beberapa elemen dari budayanya mungkin juga merupakan budaya kelompok lainnya yang membuat kesulitan untuk membedakan antara mereka dan kelompok lain (Eller, 1999). Ketika berbicara masalah identitas budaya dari suatu kelompok etnik, Kahn (1995) juga menekankan adanya daerah abu-abu berkenaan dengan identitas budaya.

Penggunaan agama, misalnya agama Islam sebagai tanda identitas dapat tumpang tindih antara berbagai kelompok etnik yang pada umumnya beragama Islam. Orang Betawi, misalnya sering menggunakan Islam sebagai identitasnya, begitu pula orang-orang Sasak di Lombok. Jelas, wilayah yang abu-abu dan tumpang tindih dapat terjadi tergantung bagaimana konteksnya dan dengan siapa suatu kelompok disandingkan untuk memperlihatkan perbedaan identitas. Karena memang identitas kelompok etnik muncul lebih tajam jika berhubungan dengan kelompok lain.

Penggunaan penanda-penanda identitas (*markers of identity*) yang tertentu yang diambil dari budaya dari kelompok tersebut dapat berubah tergantung keadaan dan konteks tertentu. Misalnya, Eller mencatat bahwa kelompok yang pertamanya menggunakan agama sebagai penanda identitasnya mungkin berubah dengan menggunakan kelas atau bagian dari budayanya (1999:9). Eller memberikan contoh tentang perubahan identitas dari *black* pada *African American* di Amerika Serikat yang pada dasarnya tidak merubah anggotanya tetapi merubah penanda etnisitas dari warna kulit menjadi keturunan leluhur dalam arti luas (1999:10-11).

Hal senada dikatakan oleh King dan Wilder yang berargumentasi bahwa studi tentang etnisitas berkaitan erat dengan proses sosial dan budaya dan aspek-aspek yang meliputi persamaan dan perbedaan dan pemahaman tentang konstruksi dan transformasi identitas sosial dan budaya dengan mengelompokkan orang-orang (2003:196-197). Dalam konteks konstruksi, beberapa ahli beranggapan bahwa batas-batas itu merupakan konstruksi (King and Wilder 2003; Kahn 1995; etc.). Barth (1969) mengatakan bahwa pembentukan kelompok-kelompok etnik melibatkan proses sosial tentang pengeluaran dan pemasukan dan pemilihan aspek-aspek sosial dan budaya yang dianggap sesuai dengan konstruksi identitas dan batas-batas.

Secara luas berbagai ahli menganggap bahwa identitas budaya merupakan sebuah konstruksi sosial (King 1982; Vickers 1989; Hall 1992; Eriksen 1993; Kipp 1993; Kahn 1993; Kahn 1995; Picard 1997; Wood, 1998; and King and Wilder, 2003). King and Wilder menjelaskan bahwa etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial dan kesamaan dalam nilai-nilai budaya dan ciri-ciri seperti bahasa dan agama. Namun, dimensi sejarah tentang identitas menunjukkan bahwa identitas itu tidak pasti, konstan dan kekal, tetapi kadang berubah dan dapat dibentuk atau dikonstruksi (2003:198). Dalam proses pembentukan identitas itu, kekuasaan sering berperan. Misalnya saja kekuasaan Barat berperan penting dalam pembentukan identitas, baik melalui peran ilmuwan sosial dan misionari. Selain itu, berbagai kelompok juga sering berperan dalam pembentukan identitas, misalnya kaum intelektual, birokrat, kelompok elit dan penguasa. Negara juga ikut berperan penting (Eriksen 1993) dan deretan "otoritas" lainnya (Barth 1989).

Konsep tentang identitas dan identitas itu sendiri merupakan kombinasi dari dinamika hubungan antara konteks dan konstruksi. Eriksen (1993) menunjukkan konstruksi sejarah berkenaan dengan identitas orang-orang India yang bermigrasi ke Mauritius dan Trinidad yang pada gilirannya memiliki identitas yang berbeda. Di Indonesia, kasus-kasus serupa juga bisa ditemukan (Vickers 1989; Picard 1997; Kahn 1993; Kipp 1993; dan Maunati 2000). Vickers, misalnya, melalui studinya di Bali menggambarkan proses pembentukan identitas masyarakat Bali yang menurut sejarahnya Bali sendiri dulu merupakan tempat yang liar, tetapi kemudian menjadi sebuah pulau dewata. Ketika berbicara masalah pembentukan identitas ini berbagai kekuatan, seperti kekuatan ekonomi dan politik sangat berperan (lihat Maunati, 2004 dalam kasus Dayak di Kalimantan Timur). Said (1993) memberikan gambaran bahwa Inggris berperan kuat dalam pembentukan identitas India. Barth (1969) yang dikenal luas, yakin bahwa jika identitas ditentukan oleh berbagai kekuatan. Senada dengan Barth,

Picard (1997) dalam kasus Bali, menggambarkan keterlibatan pejabat-pejabat kolonial Belanda, para intelektual Bali dulu, dan para pejabat pemerintah Indonesia sekarang dalam penciptakan tentang identitas orang Bali. Picard (1997) lebih lanjut berpandangan bahwa citra manusia Bali kontemporer terinspirasi dari citra yang diciptakan oleh kolonial, Indonesia dan pariwisata.

Pemerintah Orde Baru juga berperan dalam pembentukan identitas Bali. Picard menggambarannya dengan argumentasi bahwa pemerintah Indonesia berusaha menciptakan identitas provinsi dengan melupakan berbagai kelompok etnik di setiap provinsinya. Bali dengan sendirinya berarti satu wilayah geografi, satu etnik dan satu administrasi (Picard 1997:198-9). Namun, ia menganggap Belanda lah yang paling banyak membentuk identitas Bali. Pada khususnya pandangan orientalis tentang Bali sebagai “sebuah pulau Hindu yang dikelilingi oleh sebuah lautan Islam” (Picard, 1997:186) memiliki akibat jangka panjang:

Di satu sisi, dengan cara mencari singularitas Bali dalam warisan Hindunya, dan dengan memahami identitas keagamaan orang-orang Bali sebagai sesuatu yang dibentuk melalui oposisi terhadap Islam, Belanda meletakkan sebuah kerangka kerja yang dengannya orang-orang Bali akan mendefinisikan diri mereka sendiri (1997: 186).

Identitas budaya tertentu sering dioposisikan dengan kelompok lainnya. Seperti halnya, Bali yang dioposisikan dengan Islam, Dayak dioposisikan dengan Islam, artinya Dayak adalah non-Islam. Misalnya saja, orang-orang yang semula Dayak menjadi ‘masuk Melayu’ ketika mereka beralih ke agama Islam (lihat Coomans, 1987). Eriksen (1993) juga mengakui ketika dalam proses pencarian identitas, oposisi dengan kelompok lainnya sering terjadi.

Para ahli sering melupakan bahwa masyarakat tertentu, seperti Bali, India atau lainnya tersebut sebagai pihak yang dibentuk identitasnya. Artinya mereka dianggap pasif dalam proses pembentukan identitasnya, tetapi Maunati (2000) dalam studinya di Kalimantan Timur menemukan kenyataan bahwa masyarakat Dayak turut aktif dalam pembentukan identitasnya, mereka bukan masyarakat yang pasif. Para elit Dayak, misalnya, berperan penting dalam membentuk citra Dayak yang berlawanan dengan citra masa lalu Dayak yang terkait dengan keterbelakangan. Dalam hal ini, Dayak digambarkan merupakan kelompok yang terdidik dan memiliki budaya yang tinggi sehingga budaya mereka dikagumi oleh wisatawan. Selain itu, masyarakat yang non-elitpun ikut berperan melalui berbagai hal. Misalnya, penggambaran tentang orang-orang Dayak yang memiliki tradisi tarian dan upacara perkawinan tertentu dijalankan lagi setelah bertahun-tahun mereka tidak menjalankannya dan penggalian dan modifikasi dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat yang pada gilirannya diakui sebagai penanda kelompoknya. Ini artinya mereka ikut serta dalam pembentukan identitas kelompoknya (Maunati, 2000).

Identitas pada dasarnya cair, artinya identitas dapat berubah karena merupakan konstruksi sosial. Masyarakat Dayak sendiri juga mengalami perubahan. Dulu orang-orang Dayak malu untuk menyebutkan dirinya Dayak karena mereka diasosiasikan dengan keterbelakangan. Berbagai cerita tentang rasa malu mengaku sebagai orang Dayak terjadi karena pengalaman pahit, misalnya dikejar-kejar untuk dilihat telinga panjang atau tatonya (lihat Maunati, 2004). Tetapi belakangan, banyak dari orang-orang Dayak yang bangga mengaku sebagai orang Dayak dan tidak selalu merefer pada sub-etniknya seperti Kenyah, Tunjung, Kayan, Bahau, dan lain sebagainya. Kebanggaan sebagai orang Dayak terbangun karena berbagai hal, baik karena kekuatan politik maupun ekonomi. Misalnya saja dengan banyaknya orang-orang Dayak yang menduduki tambuk birokrasi, mereka memiliki kesejajaran dengan kelompok lainnya yang

dulu mendominasi pemerintahan (lihat Maunati, 2000; Ju Lan dan Maunati, 2004). Orang Dayak dulu sering terpinggirkan (lihat Djuweng, 1996; dll.), tetapi kini mereka bangkit dan muncul dengan penguatan-penguatan identitas.

Tanda-tanda identitas etnik bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya budaya materi, agama, bahasa, dan lainnya. Tetapi tanda-tanda identitas bisa berubah tergantung dengan situasi dan konteks tertentu. Misalnya, Eriksen (1993) mengatakan bahwa identitas muncul ketika suatu kelompok merasakan adanya ancaman. Selain itu, ketika kita berbicara tentang identitas kelompok etnik tertentu selalu terkait dengan kelompok lainnya. Artinya, identitas etnik tidak terasa kuat jika tidak ada kaitan atau ancaman dari kelompok lainnya. King (1982:35), misalnya, menyitir dari Rousseau, menekankan bahwa orang Kajang mengidentifikasi mereka berlawanan dengan orang Kayan sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan melawan Kayan yang agresif dan menguasai politik.

Penanda-penanda identitas budaya mungkin berasal dari agama, bahasa dan adat-istiadat yang dianggap khusus milik kelompok tersebut. Namun, tumpang tindih bisa terjadi diantara kelompok etnik yang berbeda. Di wilayah abu-abu dimana penanda-penanda identitas tumpang tindih, keberadaan perbedaan budaya menjadi problematis (Kahn 1995). Proses pembentukan identitas sering diwarnai oleh kesulitan karena adanya wilayah abu-abu dan juga batasan kekhususan kelompok-kelompok etnik. Percampuran atau perubahan kelompok etnik dapat terjadi. Barth menggambarkan perubahan-perubahan identitas dengan memberikan contoh orang Yao di Thailand Utara, Laos and Burma (1969:22). Memasukkan orang-orang yang bukan Yao untuk menjadi Yao juga terjadi secara individual. Selain itu Barth juga menemukan adanya perubahan orang-orang Pathans Selatan menjadi Baluch dan sebaliknya (Barth, 1969:22). Hal senada juga dikemukakan oleh Bradley (1983) yang mencatat di Thailand terjadinya proses perubahan identitas dari beberapa etnik minoritas menjadi orang Thai.

King (1982) juga menggambarkan sebuah contoh tentang proses batasan perbedaan kelompok-kelompok etnik dengan menfokuskan pada konsep etnisitas di Borneo, yang sangat kompleks dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, banyak orang yang dulunya dianggap sebagai orang 'Maloh', kemudian berubah menjadi orang lain dan beberapa orang-orang yang pada tahun 1972-3 dianggap sebagai orang 'Maloh' berasal dari kelompok etnik lainya (King, 1982:25). Selanjutnya, King mencatat bahwa proses pertukaran budaya atau dalam jangka waktu lama, proses asimilasi, terjadi antara kelompok-kelompok etnik yang bertetangga (1982:25).

Lun Dayeh dan Lun Bawang merupakan kelompok etnik yang masuk dalam kelompok Dayak. Dayak sendiri bukan merupakan realitas objektif yang kuno, tetapi merupakan sebuah konstruksi yang relatif modern. Berbagai studi tentang Dayak sering mengkaitkan Dayak dengan karakteristik tersendiri. Tetapi dari kebanyakan para antropolog atau ilmuwan sosial klasik ketika mendiskusikan Dayak sering menghubungkan antara lain dengan sistem pengayoan (berburu kepala), rumah panjang, dan berburu. Sistem pengayoan memiliki arti yang bervariasi dari ritual (McKinley, 1976), ekonomi (Koepping, tt) sampai dengan kesuburan (Freeman, 1979). Sebagian dari elemen-elemen budaya yang dianggap milik orang Dayak banyak yang sudah merupakan masa lalu karena mereka sudah meninggalkannya. Misalnya saja, rumah panjang sudah dihapus oleh pemerintah dan digantikan oleh rumah individual yang dianggap lebih bersih dan sehat. Tetapi meskipun elemen-elemen budaya yang dulu dianggap khusus milik orang Dayak sekarang tidak lagi dipergunakan, tidak berarti mereka bukan orang Dayak karena seleksi dari elemen apa yang akan dipergunakan dalam menunjukkan identitas kelompoknya dapat berubah tergantung situasi dan konteks tertentu. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membahas masalah identitas ini karena hal ini melibatkan berbagai aspek kehidupan.

Studi yang khusus membahas tentang identitas orang Dayak sendiri masih sangat kurang. Studi yang telah dilakukan antara lain oleh Maunati (2000) dan Ju Lan dan Maunati (2004). Maunati (2000) dalam studinya tentang identitas Dayak melihat dua kekuatan besar yang mempengaruhi terbentuknya identitas Dayak, yakni kekuatan politik dan ekonomi. Keduanya memiliki andil yang besar dan sulit ditarik garis tegas yang mana yang paling dominan dari keduanya karena kedua kekuatan saling tarik menarik. Kedua kekuatan itupun terfragmentasi menjadi berbagai elemen. Misalnya, kekuatan politik antara lain mencakup kekuasaan kolonial, Orde Baru, pemerintahan lokal. Ju Lan dan Maunati (2004) dalam studinya di tiga wilayah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sarawak melihat kemunculan identitas 'Pan-Dayak' dalam arti gagasan tentang jalinan hubungan antara Dayak di Kalimantan dan Sarawak telah muncul dan bahkan kerjasama pun telah terjalin. Misalnya Credit Union yang sudah dikembangkan di Kalimantan Barat mulai diajarkan di Kalimantan Timur yang misinya adalah untuk memperkuat masyarakat Dayak di pedalaman terutama dalam manajemen keuangan. Dari kedua penelitian tersebut masih banyak yang belum dibahas secara mendalam, misalnya masyarakat Dayak yang tinggal di perbatasan yang berhubungan langsung dengan warga negara yang berbeda dari negara tetangga apakah memiliki pola yang sama dalam hal kebangkitan identitasnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengisi kekosongan dari pembahasan tentang identitas masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Seperti halnya kemunculan identitas 'Pan-Dayak', kini terdapat gejala munculnya identitas 'Ulu Padas', yakni kebersamaan kelompok yang tinggal di Ulu Padas, the heart of Borneo, yang meliputi antara lain Krayan, Ba Kelalan dan Long Pasia, Bario. Memang identitas itu sendiri cair jadi kemunculan identitas Ulu Padas disamping masih belum terlalu kental, juga masing-masing kelompok memiliki identitasnya sendiri pada kondisi tertentu. Misalnya orang-orang Lun Dayeh di Krayan menguat identitas ketika berhadapan dengan kelompok lain dari Indonesia, tetapi

terkadang juga muncul identitas yang terkait dengan keIndonesian ketika berhadapan dengan orang-orang Malaysia.

Kebangkitan identitas terkait erat dengan penciptaan image tentang masyarakat Dayak dan dinamikanya. Para ilmuwan sosial berperan dalam menentukan image tentang kelompok etnik tertentu karena melalui tulisan-tulisannya mereka ikut menentukan siapa kelompok etnik tersebut. Para ilmuwan sosial klasik menggambarkan tentang Dayak melalui berbagai tradisi-tradisi yang menonjol atau ditonjolkan oleh para ilmuwan tersebut. Seperti telah disinggung di atas bahwa image yang paling menonjol antara lain adalah pengayoan, rumah panjang, dan ladang berpindah. Tentu saja image tentang Dayak yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial klasik tersebut banyak berubah sejalan dengan perubahan jaman. Misalnya saja, orang Dayak sudah banyak yang tinggal di rumah individual daripada rumah panjang. Memang rumah panjang masih merupakan bagian penting dalam cerita-cerita orang tua yang pernah tinggal di rumah panjang (lihat Maunati, 2000). Selain itu, rumah panjang yang masih tertinggal kebanyakan untuk dijadikan tujuan wisata bukan untuk tempat tinggal. Di Krayan sendiri masyarakat Lun Dayeh sudah tinggal di rumah individual. Pada tahun 1970an oleh pemerintah mereka disarankan untuk tinggal di rumah individual yang dianggap lebih bersih dan sehat. Meskipun mereka tinggal di rumah individu bukan berarti mereka kehilangan keDayakannya karena aspek-aspek budaya yang dipergunakan sebagai penanda identitas dapat berubah.

Sekarang, pertanyaanya bagaimana kondisi hubungan etnisitas di Nunukan yang pada dasarnya mayoritas adalah pendatang. Orang-orang Tidung justru merupakan kelompok yang kecil secara jumlah meskipun mereka dianggap sebagai penduduk asli. Dinamika etnisitas tentu sangat menarik untuk dikaji mengingat kehidupan yang bertambah kompleks membuat persaingan untuk memperebutkan kue ekonomi semakin kompleks pula. Selain itu, hubungan tradisional yang terjalin dengan

negara tetangga juga banyak dilakukan oleh para pendatang yang memang sudah lama dan turun temurun menetap di wilayah Kalimantan Timur dan bahkan Sabah. Sebelum menginjak pada hal yang lebih dalam tentang etnisitas dan kaitannya dengan aktifitas ekonomi, kita akan lihat dulu profil dari berbagai kelompok etnik secara umum di Nunukan.

3.2. Sekilas Potret Orang Dayak Tidung

Orang Tidung dianggap sebagai penduduk asli Nunukan. Hal ini sering terdengar dari pengakuan orang Tidung dan orang-orang lainnya. Meskipun terdapat berbagai versi yang mana salah satunya adalah Nunukan dulunya kosong dan orang-orang Tidung datang ketika beristirahat di bawah pohon Nunuk yang lama kelamaan mereka menetap di sana. Mayoritas orang Tidung tinggal di Pulau Kalimantan. Jika kita di kabupaten Nunukan sendiri, orang Tidung jumlahnya kecil sehingga dalam Sensus 2000 pun dimasukkan kategori lainnya. Berdasarkan Sensus 2000, penduduk kabupaten Nunukan berjumlah 26.810 orang yang terdiri dari:

Jawa	: 3.103
Bugis, Ugi	: 12.460
Banjar, Melayu Banjar	: 818
Kutai	: 46
Pasir	: 0
Dayak Kenyah	: 31
Toraja	: 1.760
Sunda, Priangan	: 122
Lainnya	: 8.470

Untuk tahun 2007 ini belum ada catatan yang lengkap tentang kelompok etnik di kabupaten Nunukan maupun kecamatan Nunukan. Dengan demikian kondisi yang ada berdasarkan wawancara dengan pejabat PEMDA dan Kecamatan. Berdasarkan Profil Kabupaten Nunukan 2007, penduduk Nunukan tahun 2006 berjumlah 118.707 jiwa, sedang tahun 2007 naik menjadi 125.585. Sementara itu berdasarkan *Kecamatan Nunukan Dalam Angka 2007*, kecamatan Nunukan tahun 2006 berjumlah 46.395 orang, yang terdiri dari 25.129 laki-laki dan 21.266 perempuan.

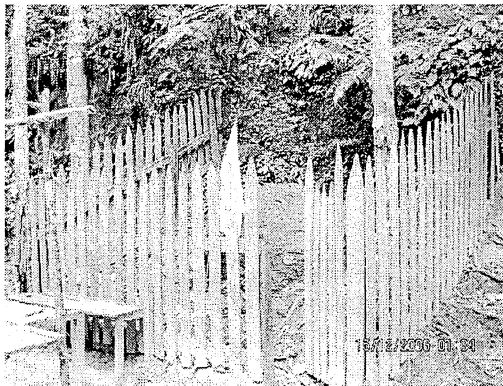
Di Pulau Nunukan yang sering dianggap sebagai penduduk asli adalah etnik Tidung. Mereka umumnya tinggal di wilayah wilayah Binusan, Sungai Fatimah, dan Sungai Bilal, tetapi paling banyak tinggal di desa Binusan yang resmi terbentuk tahun 2003 (lihat Kecamatan Nunukan Dalam Angka 2007). Jalan menuju Desa Binusan belum semuanya bagus, tetapi sudah ada jalan yang dapat ditempuh sekitar 2 jam dari pelabuhan/pusat kota. Dari pusat kota untuk menuju desa Binusan, kita melewati Sungai Bilal, dan Sungai Fatimah.

Di desa Binusan ada pasar dimana para nelayan dapat merapat di pasar untuk mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Menurut seorang nelayan yang diwawancarai, ia terkadang mendapatkan 20 kg ikan, tetapi adakalanya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Di pasar hanya terdapat beberapa orang penjual, seperti penjual ikan, sayur, buah-buahan dan barang kelontong.

Jalan di tengah desa dalam proses perbaikan. Keluhan penduduk, mereka sudah tinggal disana lama, desanya merupakan desa tua tetapi jalan baru saja tersentuh perbaikan yang pada saat penelitian dilakukan belum selesai. Jalan tembus juga sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan menjadi jalur lingkar Pulau Nunukan.

Di desa terdapat sekretariat lembaga adat. Menurut informan, orang-orang Tidung masih menjalankan adat yang diwarisi nenek-moyang, misalnya

dalam menjaga lingkungan. Desa Binusan dikenal kalangan luas karena desa tersebut memiliki lokasi wisata air terjun yang banyak dikunjungi orang. Selain itu Kantor Pariwisata juga merencanakan wilayah tersebut sebagai destinasi utama pariwisata di Pulau Nunukan karena wilayahnya juga dihuni oleh penduduk asli, Dayak Tidung yang memiliki tradisi-tradisi menarik untuk promosi pariwisata. Ketika berkunjung ke wisata air terjun, kita melihat keindahan alam yang masih asri, pepohonan yang rindang dapat ditemukan di sana. Kearifan lokal milik masyarakat Tidung juga tercermin dalam berbagai hal termasuk pemasangan tulisan-tulisan arif yang menggambarkan masyarakat Tidung yang peduli pada alam. Ini dapat dibaca di tulisan-tulisan ditempel pada pohon-pohon besar di lokasi wisata air terjun Binusan yang banyak dikunjungi orang tersebut. Kejernihan air di sungai di mana di atasnya terdapat air terjun dapat dinikmati oleh pengunjung. Di sana juga terdapat tempat pemujaan (lihat gambar 3.1). Di hari libur daerah ini dikunjungi banyak orang, sedangkan hari-hari biasanya sepi tidak banyak pengunjung, bahkan tidak ada orang yang berjualan yang tersedia tempatnya dekat pintu masuk air terjun tersebut pada hari biasa.



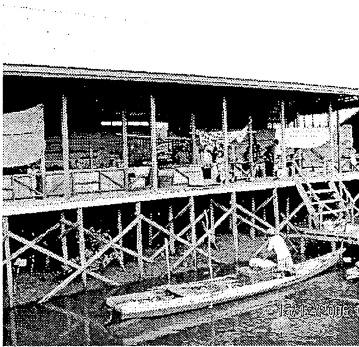
Gambar 3.1: Tempat Pemujaan



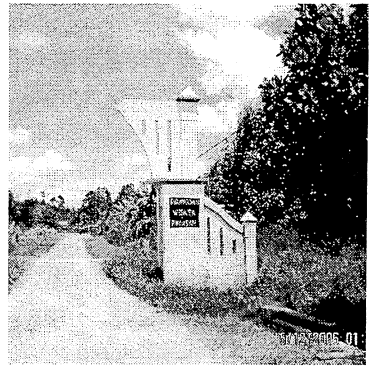
Gambar 3.2: Lembaga Adat



Gambar 3.3: Mushola



Gambar 3.4: Pasar



Gambar 3.5: Gerbang Wisata

Tempat wisata ini dikembangkan dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif peningkatan ekonomi, tetapi tampaknya hal ini belum banyak meningkatkan kesejahteraan karena pengunjung masih terbatas. Pengembangan pariwisata harus ditangani secara serius untuk berkembang karena sarana dan prasarana juga harus menunjang, seperti jalan yang mudah terjangkau, fasilitas yang tersedia, tersedianya tempat makan, akomodasi, atraksi penunjang, dan lain sebagainya. Atraksi

penunjang sebenarnya mudah digali mengingat masyarakat Tidung memiliki tradisi yang masih dijaga seperti tarian, ritual, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat dikembangkan.

Kemajuan masyarakat Tidung di Binusan memang mendapat perhatian karena jika terjadi jurang ekonomi di pulau Nunukan maka akibatnya akan fatal. Pulau yang kecil mudah dijaga tetapi jika ada masalah juga mudah meluas karena wilayahnya yang kecil. Kecemburuan ekonomi pernah terjadi meskipun dapat dikendalikan, tetapi hal ini tetap harus dijadikan peringatan dini jika keadilan ekonomi adalah penting, terutama bagi masyarakat setempat yang sudah turun temurun tinggal di sana.

Menurut beberapa informasi, ketika hampir terjadi konflik di Pulau Nunukan antara orang Bugis dan penduduk asli, orang Dayak, menurut cerita yang diperoleh masyarakat Tidung dan Dayak lainnya sebelum menuju kota orang-orang Dayak mandi bersama-sama di sungai yang berada di Binusan tersebut. Karena Binusan dianggap sebagai tempat berdomsili penduduk asli. Dari situlah mereka membangun kekuatan untuk mempertahankan harga diri yang ketika itu mereka anggap ternodai.

Berdasarkan beberapa wawancara mendalam dengan berbagai informan diperoleh informasi bahwa konflik antar dua sisi, Bugis dan Dayak (termasuk Tidung) memang hampir terjadi yang disulit dengan persoalan persaingan ketika ada lelang di salah satu kantor pemerintah antar perseorang yang kebetulan orang Dayak dan Bugis. Beberapa orang menganggap bahwa hal ini dimotori oleh orang-orang yang berada di luar Pulau Nunukan. Suasana mencekam sempat mewarnai kehidupan Pulau Nunukan yang relatif aman itu. Menurut cerita dari pihak orang-orang Bugis, mereka merasa takut ketika pada malam hari mereka melihat kelompok orang-orang Dayak berkeliling kota dengan berteriak dan membawa benda-benda tajam, seolah siap berperang. Sebagian orang Bugis memahaminya bahwa mereka mencari orang-orang tertentu yang

dianggap telah mengeluarkan kata-kata hinaan pada orang Dayak. Jadi orang-orang Bugis lainnya tidak perlu khawatir jika mereka tidak terkait dengan persoalan tersebut, tetapi mereka perlu tetap waspada menghadapi kemarahan pihak orang-orang Dayak.

Seorang Dayak Tidung, Bu Fat menceritakan pengalamannya pada waktu peristiwa tersebut:

Ketika orang Dayak turun ke jalan, saya mau jalan ke pasar, mau belanja. Saya tanpa pake sandal, tidak sadar karena pake ritual. Saya jalan 3 km tidak sadar setelah capek baru sadar. Nenek saya Dayak. Ketika kita jalan keliling kota, untung tidak ada yang menantang, orang Bugis tidak keluar sampai diselesaikan masalahnya dengan cara adat. Cara adat adalah dengan memotong kerbau.

Menurutnya rasa ketidakadilan menghinggap pada orang-orang Tidung, ia berkata: “pendatang ingin menguasai, rasa tidak adil, posisi-posisi tertentu orang-orang kami digeser semua”. Ia memberikan banyak contoh tentang ketidakadilan yang membuat gundah perasaan orang-orang asli yang tinggal disana.

Memang tidak semua orang Tidung tinggal di Binusan, ada pula yang tinggal di pusat kota, tetapi mereka hanya sedikit saja, pendatang lebih banyak. Bu Fat yang merupakan salah satu publik figur orang Tidung mengeluhkan tentang kondisi orang-orang Tidung yang tergeser dari berbagai kancah. Ia menceritakan tentang kepala sekolah yang banyak didominasi kalangan tertentu saja yang dekat dengan kekuasaan lokal. Keluhan semacam ini tidak hanya diungkapkan oleh orang Tidung, tetapi juga dari kelompok lainnya, seperti orang Jawa yang juga merasakan adanya kecenderungan yang senada sebagaimana diungkapkan Bu Fat.

3.3. Perjalanan Mencari 'Gula': Kisah-kisah Kedatangan Kelompok Etnik ke Nunukan

Kisah perjalanan pendatang, seperti Bugis, Jawa, Timor, dan lainnya ke Nunukan tidak bisa dipisahkan dari gambaran secara luas tentang kisah perpindahan mereka ke Kalimantan Timur. Orang-orang Bugis memang sudah lama migrasi ke wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Timur, terutama di daerah pantai. Di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan, dan Nunukan orang-orang Bugis dapat ditemui dalam jumlah yang signifikan. Nurhan (2009:1&15) menjelaskan bahwa orang Bugis sudah bermigrasi di seantero Nusantara seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera dan bahkan sampai ke Tanah Semenanjung. Keterlibatan orang-orang Bugis di Kalimantan, Sumatera dan Tanah Semenanjung tidak hanya dalam dunia politik, tetapi juga perdagangan. Pekawinan campuran juga mewarnai kehidupan orang-orang Bugis dengan penduduk setempat (lihat Nurdin, 2009:1&15). Perpindahan orang-orang Jawa ke Kalimantan Timur juga memiliki kekhasan tersendiri dan bervariasi, ada yang mengikuti program transmigrasi, ada yang bermigrasi secara individual, dan ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ada pula yang datang untuk bekerja diberbagai lapangan kerja seperti hutan, tambang, dan perkebunan. Orang-orang Jawa Timur banyak yang berpindah ke Kalimantan Timur secara individual. Perpindahan tersebut sudah berlangsung lama. Nunukan sendiri banyak didatangi bukan semata-mata ingin tinggal di sana tetapi sebagai transitio meskipun kemudian banyak yang menetap di Nunukan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai sumber, baik pihak kabupaten, kecamatan maupun masyarakat, pulau Nunukan merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik dari luar Nunukan atau bahkan luar Kalimantan. Orang-orang Bugis merupakan kelompok yang terbanyak di sana. Selain orang-orang Bugis, orang Timor, Toraja, Jawa juga merupakan kelompok etnik yang signifikan yang tinggal di Nunukan

ini. Kenapa pulau Nunukan begitu menarik bagi masyarakat tersebut, tentu kisahnya tidak senada, tetapi berbagai kisah menghiasi liku-liku masyarakat di sana sehingga mereka menetap di Nunukan. Jika dilihat pola umum maka sedikitnya ada 3 pola yang dapat digambarkan dari perpindahan mereka itu: *pertama*, kelompok yang berpindah langsung dari daerah asal ke Nunukan; *kedua*, kelompok yang berpindah dahulu ke tempat lain di wilayah Indonesia sebelum menetap di Nunukan; dan *ketiga*, kelompok yang semula bekerja di Malaysia dan kemudian menetap di Nunukan kembalinya dari Malaysia.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai masyarakat dapat diberikan contoh-contoh dari ketiga tipe tersebut. Seorang perempuan muda yang bekerja di restaurant di dekat pelabuhan Nunukan langsung pindah ke Nunukan dari Sulawesi Selatan karena mengikuti orang tuanya yang terlebih dahulu menetap di Nunukan. Putri muda Bugis ini menyelesaikan sekolah tingkat menengah di Sulawesi sebelum berangkat ke Nunukan. Di Nunukan mudah mencari pekerjaan di bandingkan daerah asalnya, itulah alasan yang ia kemukakan selain juga mengikuti orang tuanya yang sudah bekerja di Nunukan.

Sebagai ilustrasi dari pola kedua, Pak Widodo yang memiliki warung di Nunukan sebelumnya pernah tinggal di Tarakan. Ia berasal dari Jawa Timur, pergi merantau ketika umur masih muda. Ketika di Tarakan ia berdagang ke Malaysia. Ia memutuskan untuk pindah ke Nunukan ketika Nunukan sudah menjadi kabupaten. Sejak menjadi kota kabupaten, pulau Nunukan sebagai ibukota kabupaten bagaikan 'gula' yang banyak didatangi 'semut'. Artinya, Nunukan menjadi harapan untuk dapat mencari sesuap nasi bagi para pendatang. Nunukan memang memiliki kecerahan karena wilayahnya sangat dekat dengan Tawau, Sabah. Pak Widodo sudah memiliki dua warung yang berada di tempat-tempat strategis, seperti di pelabuhan dan dekat bandara. Ia bahkan bisa memiliki beberapa pekerja yang diambil dari orang setempat dan tetangganya dari

Jawa Timur. Pak Widodo sudah memiliki rumah dan beberapa bidang tanah yang dibeli dari hasil keringatnya dengan menjual makanan. Warungnya menyediakan gule kambing, ayam penyet, tempe penyet, rawon, dan berbagai jus buah, seperti wortel, alpukat, tomat, jeruk, dan sirsat. Pagi hari ia sudah membuka warung dengan istrinya yang orang Bugis. Ia menyiapkan segala keperluannya. Pada pukul 8 malam ia menutup warungnya, tetapi terkadang lebih awal ketika ada keperluan, seperti malam Jumat ia menghadiri pengajian yang diikutinya secara teratur.

Untuk pola ketiga, banyak dari orang-orang Bugis, Tator dan Timor yang tujuan utamanya bukanlah Nunukan, tetapi Malaysia. Namun karena berbagai alasan seperti dideportasi karena illegal di Malaysia, akhirnya mereka kembali ke Indonesia, tepatnya berhenti di Nunukan. Menurut pengakuan seorang suami-istri Bugis yang tinggal di Nunukan Selatan, mereka semula bekerja di Malaysia tetapi karena terkena masalah dokumen akhirnya menetap di Nunukan Selatan 8 tahun silam. Mereka membeli tanah di Nunukan Selatan yang pada waktu itu masih sangat murah. Menurut informan, sekitar tahun 1960an tanah di sana dibagikan saja bagi orang-orang yang mau membuka area tersebut. Memang pada waktu itu jalan juga ada. Suami-istri tersebut membeli tanah dari teman yang orang Bugis juga. Mereka kemudian bertani di sana sambil menjadi bekerja sebagai nelayan untuk meningkatkan pendapatan. Di Malaysia mereka mendapatkan masalah lalu dipulangkan.

Kini desa terdekat yang dapat dilalui kendaraan roda empat, termasuk angkok (angkutan kota), adalah desa Tanjung Harapan, Nunukan Selatan. Suami-istri itu berjalan sedikit menuju rumahnya karena jalan angkot tidak bersedia mengantar sampai depan rumahnya yang di atas bukit².

² Sebagaimana diketahui angkok di Nunukan biasanya mengantar penumpangnya sampai di depan rumahnya jika dapat dilalui dengan angkok. Hal ini sudah menjadi 'aturan', dan angkok tidak memiliki jalur yang pasti. Artinya tergantung kemana penumpangnya ingin berhenti.

Dari pusat kota, untuk mencapai mencapai Tanjung Harapan jalan yang sudah bagus di hotmix hanya sampai di dekat kantor Kabupaten yang baru. Selanjutnya jalan sudah diperlebar dan di 'agregat'. Namun sebagian masih jalan tanah yang licin jika terkena hujan. Biasanya 2 hari baru bisa dilalui lagi jika terkena hujan. Terdapat titik-titik yang sangat licin jika terkena guyuran hujan dan bahkan belum juga kering dalam waktu 2 hari, tetapi bisa dilalui dengan sangat hati-hati.

Seorang dari NTT (Nusa Tenggara Timur) juga mengalami nasib yang serupa yakni ia dideportasi dari Malaysia karena masalah dokumen. Semula cita-citanya adalah bekerja di Malaysia, bukan di Nunukan, tetapi ternyata ia kesandung masalah passport di Malaysia. Ketika masuk Malaysia ia masuk dengan cara legal dengan membawa passport lengkap dengan ijin kerja. Setelah bekerja di perkebunan kelapa sawit, ia tidak senang dengan gaji yang tidak sesuai dengan janji semula. Kemudian ia pindah ke perusahaan lainnya, tetapi ternyata passport masih disimpan oleh perusahaan pertama dimana ia bekerja dulu. Karena persoalan tersebut ketika ada pemeriksaan ia tertangkap tidak memiliki passport. Oleh karena itu ia dicambuk di Malaysia dan dideportasi di Nunukan. Ia menunjukkan bekas cambukan yang ternyata membekas dan sulit untuk sembuh total. Ia masih ingat sakitnya ketika dicambuk dan karenanya ia tidak ingin kembali bekerja ke Malaysia, ia memilih tinggal di Nunukan. Di Nunukan ia tidak kembali ke NTT, tetapi mencari pekerjaan sebagai sopir angkot. Menurut penuturannya, mencari pekerjaan di Nunukan cukup mudah asal ia mau bekerja keras, seperti menjadi sopir angkot. Ia tidak ingin kembali ke Malaysia, ia cukup bahagia tinggal di Nunukan di mana orang-orang dari NTT cukup banyak. Mereka juga memiliki perkumpulan sehingga rasa kekeluargaan terasa di tanah rantau. Menurut ceritanya, kasus yang dialaminya tidaklah asing bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat dengan cara legal, dipulangkan karena kadaluwarsa ijin tinggalnya atau tidak memiliki dokumen passport. Sebagai sopir angkat ia mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari

keluarga. Nunukan masih dapat menjadi tempat mencari nafkah dan memberikan cahaya ke depan karena Nunukan semakin ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai masyarakat.

Kisah-kisah seperti masih banyak dialami oleh orang-orang yang kemudian tinggal di Nunukan. Menurut mereka ternyata Nunukan juga dapat memberikan harapan kalau seseorang memang mau berusaha dengan keras karena sebagaimana diketemukan suami-istri orang Bugis tanah yang masih luas untuk dapat digarap serta lautan yang dapat dijadikan sumber pencarian nafkah. Memang ketika kami mengunjungi Tanjung Harapan, terdapat banyak tambak udang dan ikan yang menurut pengelolanya dapat menghasilkan udang dan ikan yang relatif banyak. Berbagai informan juga menceritakan tentang banyaknya orang Bugis yang membuat semacam tambak dipinggir pantai.

Jelas, Nunukan menjadi tempat bermukimnya berbagai kelompok etnik yang semula tidak berniat untuk tinggal di Nunukan (yakni awalnya Nunukan sebagai transit) maupun mereka yang keluarganya sudah tinggal di sana serta mereka yang memang bermigrasi ke Nunukan. Nunukan yang semula kota kecamatan menjadi semakin menarik ketika berubah menjadi kota kabupaten, artinya berbagai peluang terbuka di sana. Infrastruktur dan fasilitas yang semakin baik membuat Nunukan semakin menarik sebagai tempat berjuang mencari nafkah bagi berbagai kelompok etnik. Hal ini dapat menjadi potensi yang baik karena persaingan antar berbagai kelompok akan membuat orang bekerja keras. Namun terkadang keracil dapat pula mewarnai kehidupan yang dinamis. Dibawah ini akan didiskusikan dinamika hubungan antar etnik.

3.4. Dinamika hubungan antar etnik: menuju kedewasaan hubungan

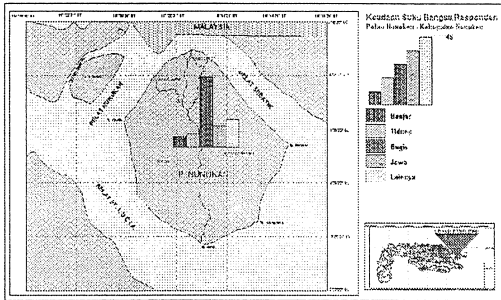
Hubungan antara berbagai kelompok etnik di Nunukan dapat dikatakan ada dinamikanya, dimana terkadang baik dan aman, tetapi pernah pula terjadi gejolak yang pada akhirnya dapat diredam. Terjadinya gejolak yang pernah membuat tegang masyarakat di Nunukan, berdasarkan pengakuan dari berbagai informan, baik orang Tidung, Bugis, Jawa, maupun Tator. Di berbagai wilayah dapat dilihat adanya pengelompokan tempat tinggal berdasarkan kelompok etnik, misalnya Kampung Tator banyak dihuni oleh orang-orang Tator meskipun terdapat kelompok lainnya seperti orang Jawa, kampung Jawa, dll.

Pusat Kota yang berada di Nunukan Timur dan Tengah, banyak dihuni oleh orang-orang Bugis, terutama di dekat pantai. Orang-orang Bugis memang banyak yang bergerak di bidang perdagangan yang berkembang di pinggir pantai dan pelabuhan. Jika kita mengunjungi pelabuhan, maka kita melihat banyak para pedagang yang berasal dari Bugis dan Jawa. Sedangkan orang Tidung sebagai penduduk asli kebanyakan tinggal di Binusan. Meskipun terdapat wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok mayoritas, tetapi terdapat pula wilayah-wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, terutama di pusat-pusat kota, meskipun kelompok tertentu juga mungkin lebih banyak dari lainnya. Di kelurahan Nunukan Timur misalnya, berdasarkan pengakuan 100 responden dan wawancara dengan beberapa informan memang terdapat berbagai kelompok etnik yang tinggal di sana, tetapi hampir dari setiap RT kebanyakan orang Bugis, kecuali RT19.

Di Kelurahan Nunukan Timur terdapat 19 RT dengan rincian penduduk berdasarkan kelompok etnik sebagai berikut:

- RT01: penduduk campur: Jawa, China, Bugis, Banjar, dll
- RT02: penduduk campur: Jawa, China, Bugis, Banjar, dll
- RT03: penduduk Bugis semua
- RT04: penduduk Bugis semua
- RT05: penduduk Bugis semua
- RT06: penduduk campur, tetapi Bugis dan Buthon yang paling banyak
- RT07: penduduk mayoritas Buthon
- RT08: penduduk campur tetapi Bugis dominan
- RT09: penduduk campur
- RT10: penduduk campur
- RT11: penduduk mayoritas Bugis, ada Tidung dan Buthon
- RT12: Penduduk mayoritas Bugis, ada Buthon
- RT13: penduduk mayoritas Bugis ada lainnya campur
- RT14: Penduduk mayoritas Busis ada lainnya campur
- RT15: Penduduk mayoritas Busis ada lainnya campur
- RT16: Penduduk mayoritas Busis ada lainnya campur
- RT17: penduduk Bugis semua
- RT18: penduduk Bugis semua
- RT19: penduduk mayoritas Jawa, ada lainnya campur

Diagram 3.1: Keadaan Suku Bangsa Responden



Daerah pasar kebanyakan dihuni oleh orang-orang Bugis, seperti RT03, RT04 dan RT05. Sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa orang-orang Bugis mayoritas pedagang, sedang Jawa memiliki posisi nomor dua (2) setelah Bugis. Memang berdasarkan observasi di lapangan orang-orang Bugis banyak yang berdagang di pasar maupun membuka warung-warung di tempat yang ramai, seperti pelabuhan, pasar, dll.

Berdasarkan wawancara dengan 100 responden di wilayah Nunukan Timur, pertanyaan tentang apakah di wilayahnya dihuni oleh beberapa kelompok etnik sebagian besar mengatakan benar sekali dan benar. Hal ini karena memang sangat sedikit yang wilayah dalam arti RT dihuni oleh satu kelompok etnik saja, lebih lagi jika kita melihat pada level kelurahan yang bervariasi penduduknya.

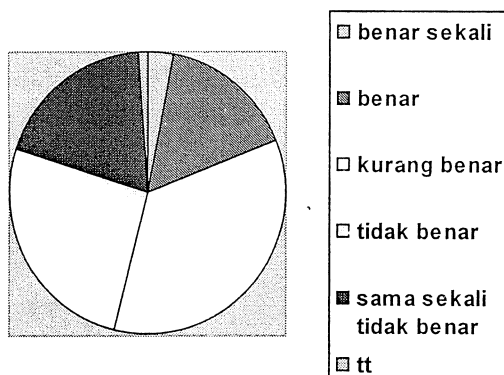
Tabel 3.1: Di wilayah Anda dihuni oleh beberapa kelompok etnik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar sekali	48	48.0	49.0	49.0
	Benar	42	42.0	42.9	91.8
	Kurang benar	6	6.0	6.1	98.0
	Tidak benar	1	1.0	1.0	99.0
	Samasekali tidak benar	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	98.0	100.0	
Missing	System	2	2.0		
Total		100	100.0		

Kelurahan Nunukan Timur ini dipimpin oleh Bapak lurah dari orang Bugis dan sekretaris orang Jawa, sedangkan pegawai lainnya adalah antara lain sebagai berikut: Bugis (7 orang), Tator (2), Tidung (1), Mandar (1), dan staf (3)

Berdasarkan wawancara dengan 100 responden di Kelurahan Nunukan Timur, pertanyaan tentang terjadi pemisahan kelompok etnik dalam hal tempat tinggal, jawaban adalah sebagai berikut:

Diagram 3.2: Pemisahan Kelompok Etnik



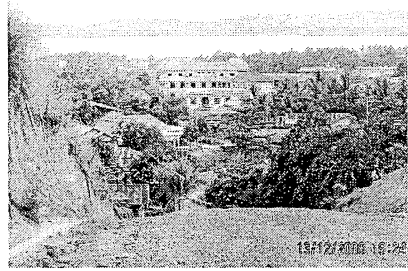
Memang, banyak dari RT-RT yang memiliki penduduk campuran, hanya beberapa saja yang RTnya hanya ditinggali oleh orang Bugis.

Di Pulau Nunukan sendiri, memang di Kelurahan ini dapat dikatakan merupakan wilayah pusat kota dimana terdapat banyak pedagang sepanjang jalam raya dan di daerah pelabuhan serta kantor-kantor pemerintahan. Wilayah seperti ini juga terdapat di Kelurahan lainnya, seperti Barat, dan Tengah yang banyak dihuni oleh berbagai kelompok etnik karena memang wilayah perdagangan dan perkantoran.

Di Pulau Nunukan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat wilayah yang memang mayoritas etnik tertentu dan memiliki nama yang diambil dari nama etnik tersebut, misalnya Kampung Tator. Kampung Tator, dahulunya merupakan hutan yang belum banyak digarap. Ketika orang-orang Tator mulai menggarap daerah yang berbukit itu, banyak dari keluarga Tator yang juga berpindah ke wilayah tersebut dan akhirnya menghuni di sana. Dahulu siapa yang membuka wilayah menjadi pemiliknya ketika wilayah masih hutan yang sepi. Sekarang Kampung Tator ini sebagian besar memang dihuni oleh orang-orang Tator, tetapi ada pula kelompok lain yang tinggal di sana seperti orang Jawa yang menempati jalan menuju Kampung ini. Wilayah ini merupakan perbukitan dengan pemandangan yang indah, terlihat pantai jika seseorang berjalan kaki menuju puncak-puncak bukit. Pada saat penelitian dilakukan telah dibangun jalan yang menghubungkan wilayah tersebut dengan jalan menuju pelabuhan, tetapi jalan tersebut belum sepenuhnya jadi dan masih belum dilewati kendaraan umum. Menurut informasi yang diperoleh, jalan tersebut akan menjadi jalan utama yang menghubungkan wilayah kota dengan wilayah selatan.



Gambar 3.6: Kampung Tator



Gambar 3.7: Jalan Tembus

Di Kampung Tator ini tinggal pula pejabat tinggi tingkat lokal yang memang berasal dari Tator. Dahulunya Bapak Tator ini mencari tempat sewaan yang dekat dengan masyarakatnya. Tetapi sekarang ia telah memiliki rumah sendiri di sana. Alasan untuk tinggal berdekatan dengan orang Tator antara lain adalah karena lebih mudah baginya untuk beribadah di Gereja yang dibangun di Kampung Tator dan juga dapat merasakan tradisi tertentu yang biasanya ada di daerah asal dan dapat dipraktikkan di sana. Menurutnya, misalnya kuburan orang Tator juga terdapat pelindung yang bercirikan ukiran Tator supaya dapat menandakan bahwa itulah kuburan orang Tator. Di kantornya pun ia memiliki beberapa budaya materi Tator sebagai pengingat akan budayanya.

Bagi masyarakat Jawa yang tinggal di Kampung Tator, mereka merasa nyaman dan memiliki hubungan yang baik pula. Mereka memang umumnya di pinggir jalan dan berdagang. Orang-orang Tator sendiri masih banyak yang bertani di sekitar wilayahnya yang masih lapang.

Di pulau Nunukan juga ada Kampung Jawa yang letaknya juga di tengah kota dimana di sekitar kampung tersebut terdapat banyak pertokoan dan

perkantoran. Kampung ini namanya kampung Jawa tetapi tidak berarti semuanya dihuni oleh orang-orang Jawa. Memang orang Jawa banyak yang tinggal di wilayah tersebut. Jika kita berkeliling, terlihat beberapa rumah yang khas Jawa dimana di depannya terdapat kurungan burung yang berada di gantungan di atas tiang. Orang-orang sekitar menganggap hal tersebut sebagai ciri khas orang Jawa. Tentu memelihara burung bukan milik orang Jawa saja, tetapi memiliki sangar yang digantung di tiang dianggap sebagai khas orang Jawa oleh orang-orang sekitar. Selain Kampung Jawa, terdapat pula Kampung Timor di luar pusat kota. Namun kampung ini belum terlalu berkembang dan hanya sedikit penduduknya yang menurut informasi beberapa orang Timor tinggal di sana. Ketika kita menuju desa Binusan papa Kampung Timor terlihat di semak-semak yang tidak terlalu menonjol jika orang tidak memperhatikan dengan baik (lihat gambar..) .



Gambar 3.8: Kampung Timor

Persoalan yang sering muncul kaitanya dengan hubungan antar kelompok etnik antara lain adalah isu tentang kesempatan dan kesenjangan ekonomi antar kelompok etnik. Artinya, apakah memang kesempatan ekonomi dirasakan oleh setiap kelompok etnik atau hanya pada segelintir orang

saja/ etnik tertentu saja. Berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat dapat digambarkan adanya kekhawatiran tentang keberpihakan pada kelompok tertentu dalam hal pembagian kue ekonomi karena kekuasaan. Misalnya saja, beberapa informan mengkhawatirkan adanya kecenderungan keberpihakan pada orang-orang Bugis karena Bupati orang Bugis. Hal ini tentu bisa saja perlu dipertanyakan lebih dalam lagi karena apakah memang kesempatan dalam berbagai bidang menjadi prioritas orang-orang Bugis. Jika dilihat dari Pemda, maka pimpinan puncak waktu penelitian dilakukan, tidak hanya didominasi oleh orang-orang Bugis tetapi terdapat beberapa orang lain. Sebagai gambaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Pimpinan Pemda dan Afiliasi Etnik

Jabatan	Etnik
Bupati	Bugis
Wakil Bupati	Lun Dayeh
Sekretaris Daerah	Banjar
Asisten I	Bulungan
Asisten II	Tidung
Asisten III	Tidung
Kepala Bappeda	Banjar
Kepala Dispenda dan BPK2D	Banjar
Kepala Imigrasi	?
Kepala Tenaga Kerja	Bugis
Kepala Bea Cukai	Bugis
Kepala Pertambangan	Toraja
Kepala Industri dan Perdagangan	Timor
Kepala Dinas Kehutanan	Jawa
Kepala Dinas Pariwisata	Jawa
Kepala Dinas Pertanian	Bugis
Kepala Dinas Pendidikan	?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Bugis
Kepala Dinas Perhubungan	Banjar
Kepala Dinas Kesehatan	Jawa
Kepala DKPP	Jawa
Kepala PMD	Dayak
Kepala Bawasda	Bugis

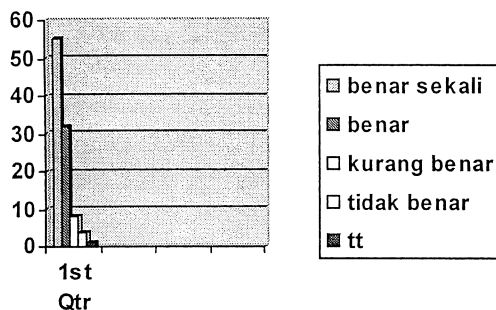
Sumber: wawancara dengan berbagai informan di Nunukan

Terdapat pula isu tentang pendidikan yang didominasi oleh orang-orang Bugis. Disini hanya sebatas isu karena kami belum dapat menyajikan data tentang jumlah kepala-kepala sekolah berdasarkan afiliasi etniknya. Hanya saja beberapa kasus pergantian dari orang Jawa oleh orang Bugis terjadi karena alasan tertentu yang belum pasti apakah karena etnisitas atau semata-mata profesionalisme. Berbagai keluhan memang banyak kami peroleh tentang isu tentang prioritas pada kelompok Bugis tersebut. Namun, terdapat pula penjelasan tentang persyaratan yang ketat dalam kepegawaian sehingga pemilihan pimpinan sebenarnya berdasarkan aturan yang ada.

Selanjutnya, jika kita berbicara masalah kesenjangan di Nunukan, berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai masyarakat, kesenjangan ekonomi memang belum terlalu terasa tetapi ada gejala ke arah sana jika tidak diatur dengan baik dan adil. Tentu saja perekonomian yang bebas tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang egalitarian (semuanya sederajat) karena penguasaan terhadap akses ekonomi berbeda. Jika perbedaan ini terlalu mencuat berdasarkan kelompok tertentu, baik etnik, golongan, maupun agama dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Di Nunukan sendiri, perdagangan memang banyak dikuasai oleh orang-orang pendatang, seperti Bugis dan Jawa³. Di pasar-pasar yang ada kebanyakan pedagangnya adalah orang-orang Bugis dan Jawa, sedangkan toko-toko pun begitu pula tetapi orang Bugis lebih banyak. Toko-toko pasar lama, misalnya, banyak yang dimiliki oleh orang Bugis karena memang mereka sudah lama tinggal di Nunukan dan menggeluti bidang perdagangan. Toko-toko emas yang ada di Pasar juga kebanyakan orang-orang Bugis. Pendatang memang sering berhasil karena mereka harus berjuang untuk hidup dan bertahan di tempat baru. Hal ini juga terjadi di Nunukan. Berdasarkan 100 responden pun, mereka juga menganggap pendatang lebih berhasil secara ekonomi dibandingkan penduduk asli.

³ Catatan jumlah tidak dapat kami peroleh, jadi hal berdasarkan observasi dan wawancara dengan berbagai kalangan.

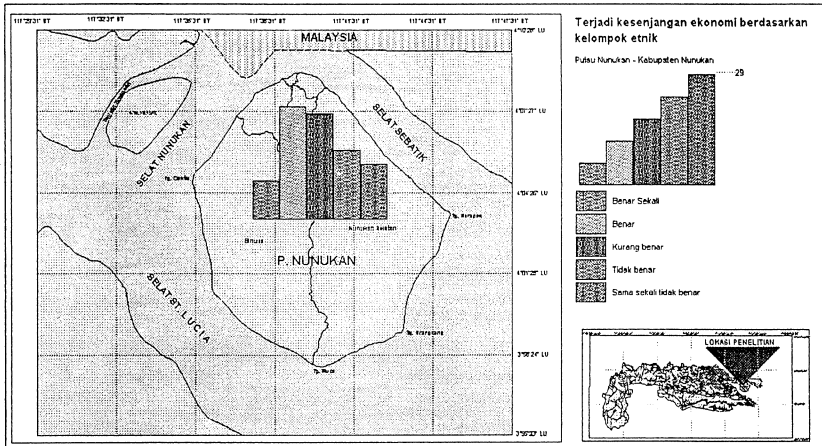
Diagram 3.3: Pendatang lebih berhasil secara ekonomi



Dari 100 orang responden, 55 persen mengatakan benar sekali bahwa pendatang lebih berhasil daripada penduduk asli, sedangkan 32 persen mengatakan benar, sisanya 8 persen dan 4 persen saja yang masing-masing dalam kategori mengatakan 'kurang benar' dan 'tidak benar'. 1 orang saja yang menjawab tidak tahu. Hal ini sebenarnya senada dengan berbagai hasil dari wawancara mendalam dimana kebanyakan mereka menganggap pendatang lebih berhasil daripada penduduk asli. Tetapi kalau dikaji secara mendalam isu pendatang-penduduk asli menjadi sangat kurang relevan ketika berbicara tentang orang-orang yang dianggap pendatang tetapi sebetulnya mereka sudah tinggal di Nunukan sejak lahir dan turun temurun karena keluarganya sudah tinggal di sana lama.

Sementara itu, jika dilihat dari terjadinya kesenjangan ekonomi berdasarkan etnik, hanya 39 persen yang menyatakan benar dan benar sekali, lainnya pada posisi menjawab kurang benar, tidak benar dan samasekali tidak benar. Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai tokoh kelompok etnik diketahui bahwa kesenjangan ekonomi belumlah parah karena setiap orang masih mudah mencari pekerjaan, tetapi jika keadilan ekonomi tidak dijaga di masa depan kesenjangan ekonomi dapat semakin tajam.

Diagram 3.4: Terjadi kesenjangan ekonomi berdasarkan kelompok etnik.



Meskipun sebagian besar belum melihat kesenjangan ekonomi yang tajam, tetapi diakui oleh pada responden jikan orang Bugis lah yang memiliki tingkat ekonomi paling tinggi di Nunukan Timur. Menurut pengakuan dari beberapa informan orang-orang Bugis banyak yang menjadi pengusaha dan pengusaha terkaya menurut masyarakat di sana adalah orang Bugis. Ketika melewati rumah besar di wilayah Nunukan Timur, orang-orang menceritakan bahwa rumah itu milik pengusaha kaya orang Bugis. Hotel-hotel yang besar di Nunukan juga pemiliknya orang Bugis.

Tabel 3.3: Suku yang paling tinggi tingkat ekonominya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bugis	96	96.0	97.0	97.0
	Jawa	1	1.0	1.0	98.0
	Lainnya	2	2.0	2.0	100.0
	Total	99	99.0	100.0	
Missing	System	1	1.0		

Orang-orang Bugis, sebagai pendatang maupun keturunan pendatang memang banyak bergerak dibidang bisnis dan hal ini juga terjadi di Tawau, Sabah dimana orang-orang Bugis banyak yang menjadi orang sukses, seperti pemilik bis antar kota, restaurant, dll. Selain dari kalangan pengusaha, orang-orang Bugis yang dianggap sukses secara ekonomi juga dari kalangan birokrasi dimana banyak orang Bugis yang memiliki posisi strategis, seperti Bupati dan kepala-kepala dinas. Oleh karena kondisi tersebut, orang-orang Bugis dianggap memiliki tingkat ekonomi terdepan dibandingkan kelompok lainnya.

Keberhasilan dari pendatang seperti orang Bugis dalam hal ini, dapat menjadi pemicu bagi kelompok lainnya untuk maju dan menggunakan potensi Nunukan dan peluang yang ada di sana, tetapi dapat pula menimbulkan persaingan atau lebih parahnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Artinya, keadilan ekonomi mesti diutamakan, seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ibu Fat, misalnya, jelas mengutarakan kekhawatirannya jika dominasi Bugis dalam hal ekonomi tidak terbendung karena dekatnya dengan kekuasaan. Sejarah memiliki arti yang penting untuk tidak difahami dan dicerna sebagai penuntun pada masa kini. Di Indonesia nepotisme dan korupsi yang kental ketika jaman Orde Baru sering dianggap sebagai penyebab runtuhnya pilar-pilar ekonomi. Oleh karena itu pada level bawah pun pilar-pilar ekonomi yang baik dan kukuh mesti dibangun dengan menjaga keadilan ekonomi. Tentu etnisitas tidak dapat dijadikan pedoman tetapi profesionalisme lah yang dapat dijadikan pedoman sehingga kecemburuan sosial ekonomi dapat terkikis jika profesionalisme menjadi bagian penentu dalam berbagai urusan, baik bisnis maupun birokrasi di level lokal. Tentu saja etnisitas tidak bisa diabaikan begitu saja karena masyarakat Nunukan sendiri masih terikat dengan ikatan-ikatan etnik yang tercermin dari bermunculannya organisasi-organisasi berdasarkan etnik, seperti perkumpulan orang Jawa, orang Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai kelompok, orang Timor dan lain sebagainya.

3.5. Nunukan sebagai Identitas Baru?

Sebagaimana dikemukakan di atas, Nunukan memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai kelompok etnik dengan budaya yang berbeda. Apakah bisa masyarakat Nunukan yang berbeda etnik menjadi memiliki identitas Nunukan yang merupakan percampuran dari berbagai budaya, budaya Dayak Tidung, Bugis, Jawa, Timor, dllnya? Untuk sekarang ini tampaknya masih belum jelas terbentuknya identitas Nunukan, karena secara umum, berdasarkan wawancara, penunjukan ke arah etnik sebagai identitas masih sangat kuat. Orang Bugis masih mengaku sebagai orang Bugis, begitu pula orang Jawa masih mengaku sebagai orang Jawa dan masih memiliki tanda-tanda budaya Jawa yang dibawa ke Nunukan, misalnya kesenian kuda lumping. Berdasarkan wawancara dengan orang Jawa, mereka mengakui bahwa kerinduan pada budaya Jawa mereka ekspresikan dengan berbagai bentuk sebagai berikut: Perkumpulan Jawa yang diadakan pertemuan secara rutin diadakan di Nunukan. Dalam acara tersebut berbagai hal didiskusikan. Pengembangan kesenian Jawa, seperti Kuda Lumpung dan gamelan Jawa. Berdasarkan observasi, pada malam hari sering diadakan latihan gamelan Jawa di belakang rumah salah seorang anggota pengurus perkumpulan Jawa. Dari restaurant yang berdekatan dengan tempat latihan sayup-sayup terdengar suara gamelan. Ini dilakukan sebagai usaha mempertahankan budaya Jawa dan dipergunakan ketika ada acara keluarga Jawa, seperti perkawinan. Waktu penelitian dilakukan memang seorang pengurus perkumpulan Jawa mengadakan pesta perkawinan anaknya dan pada acara tersebut musik gamelan juga dipertunjukkan. Beberapa hari sebelumnya latihan-latihan dilakukan salah satunya untuk acara tersebut.

Orang-orang Bugis juga memiliki wadah KKSS yang merupakan cabang dari KKSS Samarinda. Berdiri di Nunukan tahun 2004 dan kegiatannya belum banyak. Organisasi ini antara lain terdiri dari Pinrang, Bone, Tator, Sibrab, Mandar, Lubuh, Enrikang, Wajo, Bulu Kumba. Kegiatannya

belum banyak masih terbatas kegiatan sosial dan ekonomi. Secara struktur, organisasi ini memiliki ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang. Menurut pengurus KKSS yang diwawancara, pertemuan beberapa kali dilakukan dan pernah mengadakan pertemuan yang membahas tentang potensi kelapa sawit. Nunukan dilihat memiliki potensi. Nunukan yang dulunya sepi, pada tahun 1974 orang-orang Bugis banyak yang datang ke Nunukan. Waktu itu penerangan listrik belum ada. Akses untuk belanja kebutuhan pokok kebanyakan hanya ke Malaysia. Banyak orang Bugis yang bekerja di Malaysia dan pada waktu itu tidak memakai dukumen. Di Pulau Nunukan sendiri orang Bugis sekitar 60 persen. Menurut pengurus KKSS ini orang-orang Bugis waktu konfrontasi dengan Malaysia banyak membantu pihak Indonesia karena di Tawaupun orang Bugis juga banyak yang tinggal di sana. Pada dasarnya kehidupan antar kelompok tidak banyak masalah kecuali ketika terjadi konflik yang akhirnya bisa damai dengan penyembelian 10 kerbau. Semula permintaan 100 kerbau, tetapi sulit untuk dipenuhi dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan 10 kerbau. Penyelesaian konflik didiskusikan di Samarinda karena waktu itu terjadi penyebaran foto-foto konflik Sampit yang menyeramkan. Menurut pengurus ini, sebetulnya ada orang-orang luar yang ingin mengacaukan Kaltim, bukan sekedar konflik antara Bugis dan Dayak. Tetapi kesadaran orang-orang Nunukan akan pentingnya hidup dalam situasi harmoni berdampingan satu dengan yang lain sangat kuat sehingga konflik dapat diselesaikan. Sebagai pengurus KKSS, ia mengikuti pertemuan perdamaian sampai terlaksananya kesepakatan bersama antara para tokoh masyarakat dan pemerintah. Diakui olehnya bahwa Kalimantan Timur memiliki juga Forum yang melibatkan semua unsur dan kelompok yang salah satunya bertugas untuk menjaga kerukunan masyarakat di Kalimantan Timur. Ju Lan dan Maunati (2004), misalnya, memaparkan adanya Forum tersebut yang muncul paska konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah karena Kalimantan timur harus waspada terhadap ancaman seperti itu. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan yang melibatkan berbagai kelompok

dianggap penting untuk mencegah terjadinya disharmoni yang dapat berakibat fatal.

Forum atau perkumpulan memiliki fungsi ganda, sebagai tempat pemberdayaan di dalam dan juga sebagai jembatan dalam menangani berbagai masalah dengan pihak luar. Selain KKSS, perkumpulan Pinrang, salah satu daerah Sulawesi Selatan juga mengadakan acara ketika penelitian dilakukan. Menurut pengurus KKSS, perkumpulan yang lebih kecil, seperti Pinrang, mendukung dari perkumpulan yang lebih besar. Berbagai perkumpulan yang berdasarkan wilayah dan kelompok etnik memang banyak ditemui di Nunukan. Haba (2005) dalam penelitiannya di Nunukan juga menemukan adanya asosiasi yang berdasarkan kelompok dan wilayah di sana. Organisasi seperti ini memang penting untuk menunjukkan dan memperkuat identitas kelompoknya. Misalnya, Maunati (2000) menggarisbawahi bahwa organisasi Dayak di Kalimantan Timur memiliki arti penting dalam pemberdayaan di bidang ekonomi dan politik masyarakat Dayak. Melalui lobi-lobi politik dengan pihak lain, masyarakat Dayak yang berkumpul dalam wadah organisasi tersebut memiliki kesempatan yang lebih tinggi dari pada perjuangan individual. Arti penting asosiasi kelompok dalam wilayah yang baru maupun yang masyarakatnya bercampur dalam hal identitas kelompok mereka masih sangat relevan.

Sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, Nunukan memiliki potensi yang sekaligus dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Nunukan pernah mengalami masalah yang hampir meletus konflik antara etnik yang tinggal di sana. Karena pihak-pihak tokoh masyarakat mampu mengelola dan memecahkan masalah dengan baik konflik tersebut dapat dicegah dan dapat didamaikan masyarakat yang terlibat. Tetapi dari hal tersebut dapat dicari akar masalahnya dan dijadikan pedoman untuk terus menciptakan kehidupan masyarakat yang relatif harmonis. Persoalan

ekonomi jelas terselip dari isu yang kemudian menimbulkan konflik tersebut. Oleh karena itu, keadilan dalam bidang ekonomi mesti menjadi prioritas bagi pemerintah Nunukan karena itu dapat menjadi sulut yang mudah membakar masyarakat lebih luas.

Sebagaimana diceritakan oleh seorang informan, yang juga tokoh masyarakat, bahwa di Nunukan hubungan-hubungan etnisitas masih berperan penting dalam pemilihan posisi-posisi jabatan penting dalam pemerintahan. Jika memang hubungan etnis ini selaras dengan profesionalisme tentu tidak menjadi masalah karena mereka memang sewajarnya untuk mendapatkan posisi penting dengan kualitas yang ada, tetapi yang membahayakan jika hal ini tidak ada keselerasan hanya karena kesamaan etnik sehingga orang terpilih. Jika hal terakhir ini terjadi maka kegelisahan dalam masyarakat dapat menjadi tumpukan-tumpukan jerami yang suatu ketika dapat mudah terbakar. Konflik sudah pernah terjadi, tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan baik yakni dengan denda adat, pemotongan kerbau di lapangan.

Terjadinya konflik antar dua kelompok dapat diselesaikan dengan cepat karena berbagai pihak dengan cepat menanggapi dan berusaha memecahkannya dengan baik. Kesadaran dari tokoh-tokoh masyarakat agar supaya tidak mudah terpancing kepada isu yang mengancam kerukunan masyarakat yang selama ini telah terbina cukup tinggi dan hal ini juga ditanamkan kepada masyarakat Nunukan. Tampaknya belajar dari pengalaman masyarakat lain seperti Kalimantan Tengah dan Barat yang pernah mengalami konflik, merupakan isu yang sering didengarkan di Nunukan agar supaya isu-isu sensitif dapat ditangani dengan baik.

Dari pemerintah, kerukunan dan persatuan juga dimunculkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika dilaksanakan ulang tahun Nunukan, maka berbagai kesenian ditampilkan sebagai penggambaran dari berbagai

kelompok yang hidup berdampingan di sana. Pada waktu itu, berbagai acara yang merefleksikan budaya Dayak, Melayu, Jawa dan lainnya ditampilkan bersama. Di dekat pasar juga dapat dilihat papan besar yang menggambarkan kerukunan antar berbagai kelompok dengan moto “budaya boleh beda... namun semangat persatuan harus tetap” (lihat gambar.?). Dalam acara ulang tahun Nunukan tersebut, ditekankan arti pentingnya persatuan antar berbagai kelompok yang hidup di sana.



Gambar 3.9: Papan acara Hut Kab. Nunukan

Pada dasarnya, ada upaya dari pihak pemerintah lokal untuk memperkuat rasa persatuan dari masyarakat Nunukan. Sehingga identitas etnik tidak menjadikan ancaman untuk persatuan tetapi menjadi potensi untuk persatuan dengan saling menghormati dan tetap dapat mengembangkan budaya. Persatuan itu sendiri penting tidak hanya dalam arti Nunukan tetapi lebih besar dalam arti NKRI. Letak Nunukan yang bersebelahan dengan negara tetangga menjadikan Nunukan memiliki peran penting dalam menciptakan persatuan.

3.6. Nasionalisme dan NKRI

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah isu nasionalisme masyarakat perbatasan. Nunukan sebagai wilayah transito (lihat Riwanto Tirtosudarmo, 2005) rawan dengan berbagai hal termasuk nasionalisme. Negeri seberang yang lebih makmur sering menjadi pembanding yang dapat meruntuhkan rasa nasionalisme karena urusan ekonomi. Jika tawaran ekonomi di negeri seberang tinggi sementara kehidupan di negeri sendiri lebih sulit dapat menggoyahkan rasa nasionalisme. Penelitian yang lebih mendalam tentang isu ini masih perlu terus digali mengingat isu perbatasan terus bergulir. Indonesia tentu tidak ingin terjadinya problem di perbatasan yang dapat meluas ke wilayah lain karena masyarakat perbatasan yang mobilitas tinggi secara tidak langsung dapat mempengaruhi wilayah lain, seperti daerah asalnya.

Sebagai wilayah transito yang memiliki potensi juga untuk dihuni secara tetap dari para pendatang yang semula hanya ingin transit, tetapi karena masalah lain seperti dideportasi dari Malaysia, sehingga mereka pada akhirnya menetap di Nunukan. Pada gilirannya Nunukan bukan sekedar transito, tetapi destinasi. Dengan laju penduduk yang tinggi, tentu sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan. Belum lagi masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnik perlu beradaptasi karena masing-masing memiliki budaya yang bervariasi yang dapat menimbulkan konflik, tetapi jika dapat menjadi potensi positif untuk pembangunan jika dimanfaatkan dengan baik dari masing-masing budaya.

Daerah perbatasan memiliki keunikan tersendiri karena lokasinya di 'grey area' dalam berbagai aspek, seperti kekerabatan, hubungan dagang, dan mobilitas. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya di perbatasan Krayan – Ba Kelalan - Long Pasia, masyarakat di sana secara kekerabatan jelas memiliki ikatan yang kental karena mereka percaya berasal dari kelompok yang sama meskipun kemudian memiliki nama

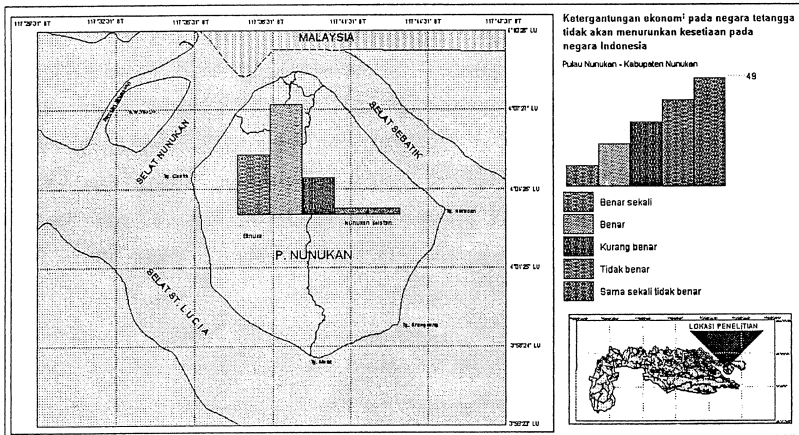
yang berbeda antara Krayan (disebut Lun Dayeh) dan Ba Kelalan (disebut Lun Bawan). Hubungan dagang dan mobilitas karena hubungan kekerabatan dan secara historis memang telah terjadi hubungan sebelum terjadi garis demarkasi yang tegas yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi bagian negara yang berbeda, telah terjadi lama. Di Krayan bahkan pernah adanya keinginan untuk pindah menjadi bagian Sarawak, Malaysia. Kondisi seperti ini barangkali tidak asing untuk wilayah perbatasan yang memang unik dan berbeda dengan wilayah tengah yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah negeri tetangga. Hubungan yang dekat dengan negeri tetangga karena terdapat ikatan-ikatan yang kuat terkadang membuat mereka membandingkan negerinya dengan tetangganya tersebut. Ikatan yang cair dan longgar mungkin terjadi ketika berbicara rasa keIndonesiaannya. Kompleknya lagi masyarakat di perbatasan juga berhadapan dengan ketatnya persaingan dengan kedatangan pendatang baik yang hanya transit maupun menetap di sana. Berdasarkan penelitian sebelumnya di Krayan, kondisi ini belum terlalu rumit karena pendatang masih terbatas, tetapi di Nunukan kondisinya lain karena pendatang yang berasal dari berbagai penjuru banyak yang telah menetap di sana sehingga persaingan semakin ketat dalam hal mencari peluang ekonomi meskipun peluang ekonomi memang lebih terbuka di Nunukan dari pada wilayah seperti Krayan yang masih terisolir. Dinamika masyarakat di Nunukan memang menarik untuk dilihat terutama kaitannya dengan nasionalisme dan NKRI.

3.6.1. Malaysia negeri pembanding

Sabah, Malaysia yang berseberangan dengan Nunukan, Indonesia karena letaknya yang mudah dicapai sering menjadi pembanding dalam berbagai hal. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) banyak yang bekerja di Malaysia melalui Nunukan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai kalangan di Nunukan, Sabah, Malaysia memang dianggap memberikan peluang pekerjaan yang banyak dengan

upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Berdasarkan 100 kuesioner yang disebarakan dengan pertanyaan, ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Diagram 3.5: Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia.



Sekitar 76 persen dari mereka membenarkan pernyataan tersebut, ini artinya mereka, meskipun, secara ekonomi tergantung pada Malaysia, tidak mengurangi kesetiaan pada Indonesia. Memang kenyataannya sebagian besar dari kebutuhan sehari-hari di Nunukan tergantung dari Malaysia. Keinginan mereka perekonomian Nunukan ditingkatkan sehingga ketergantungan dengan Malaysia dapat berkurang dan masyarakatpun tidak harus pergi ke Malaysia untuk bekerja dan belanja di sana.

Diagram 3.6: Peningkatan ekonomi di Nunukan perlu ditingkatkan sehingga orang Indonesia tidak perlu bekerja ke Malaysia

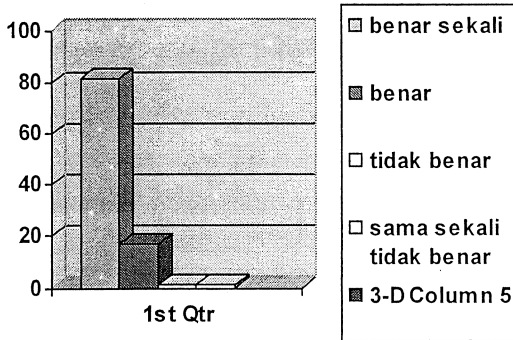
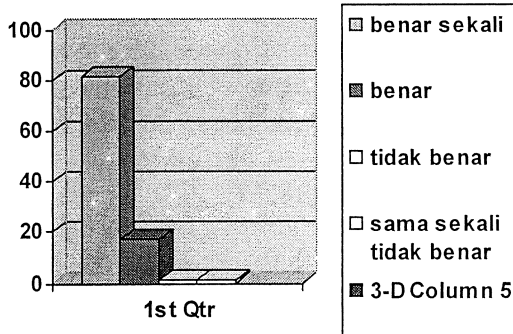


Diagram 3.7: Bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan (Indonesia)



Dari 100 responden, sekitar 62 persen (dari kategori benar sekali dan benar) mengatakan bahwa bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan. Jika ditanya lebih mendalam umunya lebih baik dalam arti ekonomi, gajinya lebih tinggi, tetapi bukan berarti dalam arti lainnya

karena banyak dari mereka yang mengalami pengalaman buruk. Misalnya, kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak mendapatkan upah sesuai yang dijanjikan jika mereka pindah ke pekerjaan lain. Selain itu, berapa banyak yang pasportnya dipegang oleh majikan yang sebelumnya sehingga ketika terkena razia mereka dijebloskan ke penjara sebelum dideportasi.

Impian mereka, seperti dituturkan oleh beberapa informan, adalah Indonesia sendiri mampu memberikan penghidupan yang layak dan seimbang dengan negara tetangga sehingga mereka tidak perlu bekerja di negeri orang. Ketergantungan yang tinggi dapat membuat godaan-godaan untuk pindah ke Malaysia.

Sebagaimana diakui oleh beberapa informan perjuangan “keIndonesian” masyarakat perbatasan lebih rumit dibandingkan orang-orang yang tidak tinggal di perbatasan karena mereka tidak melihat langsung dan bergaul sehari-hari dengan orang-orang dari negara tetangga. Ketergantungan ekonomi bukan berarti luntarnya keIndonesian. “Hujan emas di negeri orang masih tetap senang di negeri sendiri”, sering diungkapkan sebagai gambaran bahwa keIndonesian mereka tetap penting meskipun mereka mencari nafkah di negeri orang atau tergantung secara ekonomi pada negeri orang. Keinginan yang terungkap dari masyarakat adalah perbaikan ekonomi dari Nunukan itu sendiri.

Nunukan sebagai wilayah perbatasan harapannya menjadi halaman depan yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nunukan bukanlah wilayah yang miskin dan tidak menjanjikan, tetapi Nunukan memiliki potensi yang besar secara ekonomi karena letaknya yang strategis dimana Nunukan dijadikan wilayah transito. Transito jika dikembangkan dapat menjadi kota perdagangan yang menjanjikan di masa depan. Wilayah Nunukan juga dijadikan daerah tempat mengadu nasib bagi banyak orang yang sebelumnya bekerja di Malaysia maupun yang datang dari berbagai

wilayah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah berupaya memperbaiki fasilitas-fasilitas, seperti pembuatan pelabuhan batu lengkap dengan pertokoan, pasar, dan rencana pembuatan jembatan yang menghubungkan Nunukan dengan daratan Kalimantan.

3.6.2. NKRI: Tantangan dan peluang di perbatasan

Berbeda dengan masyarakat Krayan yang pernah mengeluh tentang akses transportasi yang sulit dan ketergantungan dengan negara tetangga yang besar membuat masyarakat pernah melayangkan surat kepada presiden RI waktu itu Gus Dur untuk menjadi bagian dari Malaysia jika tetap diabaikan, masyarakat Nunukan belum pernah melakukan hal tersebut meskipun ketergantungan ekonominya juga kuat. Masyarakat Nunukan yang umumnya pendatang dari berbagai wilayah tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan wilayah asal, seperti Sulawesi, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan lainnya. Kekuatan ikatan ini merupakan salah satu pengikat yang kuat untuk tetap membela NKRI. Bahkan orang-orang Sulawesi, terutama Bugis memiliki peranan yang kuat di politik lokal serta perdagangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurhan (2009) bahwa diaspora Bugis di berbagai daerah memiliki peran politik dan perdagangan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, jelas diungkapkan bahwa mereka selalu membela NKRI. Ketika terjadi peristiwa blok perbatasan Ambalat, masyarakat Nunukan siap siaga jika dibutuhkan untuk membela kepentingan Indonesia. Ketika itu, hubungan mereka dengan masyarakat Sabah dan Tawau-Malaysia Timur tetap berjalan baik. Sebagaimana diceritakan oleh seorang informan, banyak dari orang-orang Tawau adalah orang-orang Indonesia juga, seperti orang Bugis.

Tantangan yang dihadapi adalah karena Nunukan sebagai transito, banyak orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk bekerja melewati

Nunukan serta ketergantungan kebutuhan sehari-hari masyarakat Nunukan pada Malaysia, masyarakat Nunukan memiliki ikatan-ikatan tersendiri dengan masyarakat Tawau-Malaysia. Jika Malaysia menawarkan pekerjaan yang menjanjikan, rasa kecewa dengan kondisi di Indonesia dapat muncul. Kita sering mendengar dari berita adanya orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai Laskar Malaysia. Ini suatu dilema bagi Indonesia. Nunukan, sebagai wilayah yang bersebelahan dengan Malaysia memiliki tantangan yang lebih berat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mereka dapat bangga ketika membandingkan dengan negara tetangganya.

3.7. Simpulan

Pulau Nunukan memiliki penduduk yang beragam dari segi kelompok etniknya, baik itu orang Tidung yang dianggap sebagai penduduk asli dan para pendatang seperti Bugis, Jawa, Timor, Tator dan lain sebagainya. Banyaknya pendatang di sana karena memang Nunukan di kenal sebagai transitio (lihat misalnya Tirtosudarmo, 2005). Para pendatang pada mulanya memiliki tujuan bervariasi, ada yang menjadikan Nunukan sebagai transitio, tetapi ada pula yang menjadikan Nunukan sebagai destinasi terakhir. Pada gilirannya Nunukan menjadi wilayah yang memiliki keragaman kelompok etnik yang sekaligus juga berarti keragaman budaya dari masyarakatnya.

Identitas etnik masih tetap mewarnai kehidupan masyarakatnya, meskipun di lain pihak persatuan juga kental di sana yang terbukti dengan bersatunya ketika menghadapi ancaman dari luar. Asosiasi kelompok etnik disatu pihak merupakan salah satu penanda identitas kelompok, tetapi di satu pihak merupakan sarana untuk mempertemukan dan mempersatukan masyarakat yang beragam.

Daftar Pustaka

- Ardhana, I Ketut dkk (2004) *Border of Ethnicity and Kinship: Cross Border Relations between the Kelalan Valley Sarawak and the Bawan Valley, East Kalimantan*, Jakarta: PSDR-LIPI & SDI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, *Profil Kabupaten Nunukan 2007*
- Bala, Poline (2002) *Changing Borders and Identities in the Kelabit Highlands: Anthropological Reflections on Groing Up in a Kelabit Village Near the International Border*, Kota Samarahan, Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak.
- Barth, Fredrik (1969) Introduction. Dalam Fredrik Barth (editor), *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Bergen-Oslo: Universitets Forlaget. London: George Allen & Unwin.
- Barth, Fredrik, (1989) The Analysis of Culture in Complex Societies. *Ethnos*, 54 (3-4): 121-142.
- Bradley, David (1983) Identity: The Persistence of Minority Groups. Dalam John McKinnon dan Wanat Bhruksasri (editor) *Highlanders of Thailand*. Kuala Lumpur, Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press
- Conley, William. W, (1973) *The Kalimantan Kenyah: A Study of Tribal Conversion in Terms of Dynamic Cultural Themes*. A dissertation of Doctor of Missiology, School of World Mission, Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, A XEROX Company.
- Coomans, Mikhail (1987) *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia

- Djuweng, Stepanus (1996) Orang Dayak, Pembangunan dan Agama Resmi. Dalam Dr. Th. Sumartana *et al* (editor), *Kisah dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Dian/Interfidei.
- Dove, Michael R (1988) Introduction: Traditional Culture and Development in Contemporary Indonesia. Dalam Michael R. Dove (editor), *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies from Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Dove, R Michael (1988) *Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Study Kasus dari Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eller, Jack David (1999) *from Culture to Ethnicity to Conflict: An Anthropological Perspective on International Ethnic Conflict*, the United States of America: the University of Michigan Press,
- Eriksen, Thomas Hylland (1993) *Ethnicity & Nationalism: Anthropological Perspectives*. London dan Boulder, Colorado: Pluto Press
- Forum Musyawarah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan (2000) *Hukum Adat Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan*. Tarakan: Forum Musyawarah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan
- Freeman, J.D (1960) The Iban of Western Borneo. Dalam George Peter Murdock (editor), *Social Structure in Southeast Asia*. Viking Fund Publication in Anthropology number twenty-nine. New York: Wenner-Green Foundation for Anthropological research, Inc.
- Freeman, J.D. (1968) On the Concept of the Kindred. Dalam Paul Bohannan dan John Middleton (editor), *Kinship and Social Organization*. Garden City, New York: The Natural History Press.

- Freeman, Derek (1979) *Severed Heads that Germinate*. Dalam R.H. Hook (editor), *Fantasy and Symbol: Studies in Anthropological Interpretation*. London, New York, dan San Francisco: Academic Press.
- Haba, John (2005) “Potensi Konflik Etnik di Daerah Perbatasan Nunukan” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (penyunting) *Dari Entikong sampai Nunukan; Dinamika Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hall, Stuart (1992) *The Question of Cultural Identity*. Dalam Stuart Hall, David Held, dan Tony McGrew (editor), *Modernity and its Future*. Cambridge: Polity Press in association with Open University.
- Ju-Lan Thung dan Maunati, Yekti (2004) “Part A: The (Re) construction of the ‘Pan Dayak’ identity in Kalimantan. Dalam *The (re) construction of the ‘Pan Dayak’ Identity in Kalimantan and Sarawak: A Study on Minority’s Identity, Ethnicity and Nationality*”, Jakarta: PMB-LIPI.
- Kahn, Joel S. (1980) *Minangkabau Social Formations: Indonesian peasant and the world-economy*. Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, and Sydney: Cambridge University Press.
- Kan, Joel S. (1993) *Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. Providence/Oxford: BERG
- Kahn, Joel S. (1995) *Culture, Multiculture, Postculture*. London, Thousand Oaks, and New Delhi: SAGE Publications
- Kecamatan Nunukan Dalam Angka 2007

- King, Victor T. (1978) The Maloh. In Victor T. King (ed.), *Essays on Borneo Societies*. Oxford: Oxford University Press published for the University of Hull, Hull Monographs on South-East Asia No 7.
- King, Victor T. (1982) Ethnicity in Borneo: An Anthropological Problem. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 10 (1): 23-43.
- King, Victor T. (1985) *The Maloh of West Kalimantan: An Ethnographic Study of Social Inequality and Social Change among an Indonesian Borneo People*. Dordrecht-Holland/Cinnaminson – U.S.A: Foris Publications.
- King, Victor T. (1991) Cognation and Rank in Borneo. Dalam Frans Husken and Jeremy Kemp (editor), *Cognition and Social Organization in Southeast Asia*. Leiden: KITLV Press.
- King, Victor T. (1993) *The Peoples of Borneo*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.
- King, Victor T. (1993) Tourism in Borneo: General Issues. Dalam Victor T. King (editor), *Tourism in Borneo: Issues and Perspectives*. Papers from the second Biennial International Conference Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, July 1992, Borneo Research Council Proceedings Series.
- King, Victor T. and Wilder, William D (2003). *The Modern Anthropology of South-east Asia*, London and New York: Routledge Curzon
- Kipp, Rita Smith (1993) *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. The United States of America: The University of Michigan Press.
- Koepping, Elizabeth Whinfrey (t.t) *Friendship and Feud in Late 19th Century Borneo*, Working Paper No 49.

- Lebar, Frank M. (1972) *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia, Volume I: Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar*. Frank M. Lebar (editor and compiler). New Haven: Human Relations Area Files Press.
- Maunati, Yekti (2000), *Contesting Dayak Identity: Commodification and the Cultural Politics of Identity in East Kalimantan*, Dissertation, La Trobe University, Melbourne, Australia.
- Maunati, Yekti (2004) *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Lkis.
- McKinley, Robert (1976) Human and Proud of It! A Structural Treatment of Headhunting Rites and the Social Definition of Enemies. Dalam G.N. Appell (editor), *Studies in Borneo Societies: Social Process and Anthropological Explanation*. Centre for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University, Special Report No. 12.
- Nurhan Kenedi (2009) 'Fokus Diaspora Bugis-Makassar dari Somba Opu', *Kompas*, 19 Januari 2009, p.1 &15.
- Picard, Michel (1997) Cultural Tourism, Nation-Building, and Regional Culture: The Making of a Balinese Identity. Dalam Michel Picard & Robert E. Wood (editor), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Riwanto Tirtosudarmo (2005) "Nunukan sebagai Wilayah Transit" dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (penyunting) *Dari Entikong sampai Nunukan; Dinamika Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Said, Edward W. (1978) *Orientalism*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.

- Said, Edward W. (1993) *Culture and Imperialism*. London: Chatto & Windus
- Schiller, Anne (1996) An "Old" Religion in "New Order" Indonesia: Notes on Ethnicity and Religious Affiliation. *Sociology of Religion*, 57 (4): 409-417
- Sellato, Bernard (1989) *Naga dan Burung Enggang. Hornbill and Dragon*. Jakarta: ELF Aquitaine Indonesia.
- Sellato, Bernard (1994) *Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Politics, and Ideology of Settling Down*. Diterjemahkan oleh Stephanie Morgan. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sibirian, Robert (2005) "Dinamika Ekonomi Nunukan-Tawau" dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (penyunting) *Dari Entikong sampai Nunukan; Dinamika Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak-Sabah)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Vickers, Adrian (1989) *Bali: A Paradise Created*. Ringwood: Penguin Books Australia Ltd.
- Wood, Robert E. (1997) Tourism and the State: Ethnic Options and Constructions of Otherness. Dalam Michel Picard & Robert E. Wood (editor), *Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Wood, Robert E. (1998) Touristic ethnicity: a brief itinerary. *Ethnic and Racial Studies*, March, 21 (2): 218-241.
- Yazid, Mohd. Noor. *Politik Antarbangsa Asia Pasifik*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributor Sdn Bhd, 2000.

4

MODAL SOSIAL, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PREVENSI KONFLIK

Dundin Zaenuddin

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai modal sosial dan kaitannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimensi modal sosial yang diuraikan adalah kepercayaan (*trustworthiness*), norma resiprositas dan jaringan sosial. Dimensi-dimensi ini secara empiris berperan sebagai *resources* untuk memperbaiki peluang hidup (*life chances*) yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga dimensi modal sosial yang dimiliki secara individual dan kolektif berkontribusi pada peningkatan status sosial ekonomi yang bersangkutan.

Selanjutnya diuraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan prevensi konflik. Pada bagian ini yang menjadi bahan dasar uraian adalah data kuantitatif yang diolah secara deskriptif dari 100 responden yang tinggal di Kelurahan Nunukan Timur. Data ini sedianya akan diperbesar jumlah dan diperluas jangkauannya seiring tahapan-tahapan penelitian yang sedang dilakukan. Uraian berikut dimulai dari modal sosial dan kaitannya dengan realita dan upaya peningkatannya.

4.1. Modal Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

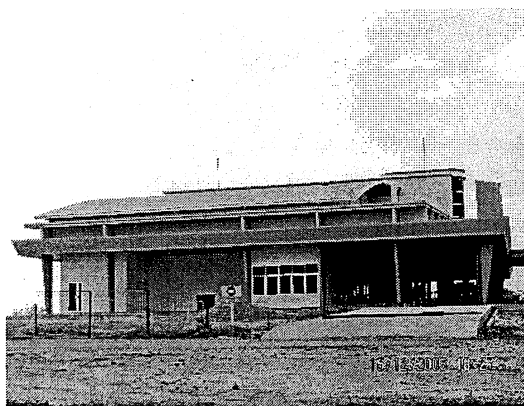
Seorang warga Nunukan, Misbah menuturkan bahwa masyarakat Nunukan sebetulnya dapat dibilang sukses dalam bidang ekonomi, walaupun rata-rata tingkat pendidikannya rendah. Rasa kebersamaan masih ada. Dia juga menceritakan bahwa rasa saling percaya antar

masyarakat relatif baik, begitu juga dengan hubungan antara etnik. Walaupun jumlah etnik Tionghoa di pulau ini relatif sangat kecil, tetapi di antara mereka banyak yang berhasil dalam pengelolaan bisnisnya mulai dari bisnis material sampai pada pengelolaan restoran. Restoran Milo I dan II, misalnya, merupakan restoran yang relatif representatif untuk tingkat kabupaten. Hal yang dicatat oleh informan ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya memang relatif rendah, terutama polisi. Belakangan, kepercayaan pada kejaksaan juga menurun karena penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan lembaga ini tidak begitu jelas penyelesaiannya.

Apa yang diungkapkan di atas, tentu tidak bisa mewakili keseluruhan sikap dan perilaku warga Nunukan terhadap aparaturnya. Di antara mereka tentu masih ada yang percaya karena di antara mereka banyak yang berdedikasi baik dan memiliki tingkat kejujuran yang cukup tinggi untuk bisa dipercaya. Akan tetapi, adanya perilaku koruptif aparaturnya memang sering dikemukakan masyarakat dan mengeluhkan mengenai bagaimana mulai menipisnya rasa amanah dan rendahnya derajat pengabdian aparaturnya dalam bidang pelayanan. Secara teoritis, *good governance* merupakan hal yang sering diutarakan oleh para pejabat, termasuk pejabat daerah, namun tingkat implementasinya masih perlu dioptimalkan.

Masyarakat Nunukan secara umum tidaklah jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan prioritas pembangunan ekonomi dan fisik selama era reformasi karena adanya perubahan status menjadi kabupaten, masyarakat Nunukan pun terkena dampaknya baik positif maupun negatif. Dampak positif dapat dilihat dari hasil pembangunan selama ini terutama pembangunan infrastruktur, walaupun tidak sebaik pembangunan di daerah-daerah lain dan memiliki tingkat perkembangan yang relatif sama dengan wilayah perbatasan Malaysia seperti Tawau. Walaupun demikian, fakta adanya derap

pembangunan yang terus berjalan tidak dapat dipungkiri. Misalnya, ketika pada tahun 2006, pada waktu pertama kali penulis mendarat di bandara Nunukan ini, kesan kumuh dan terbengkalai merupakan sesuatu yang diakui banyak pihak. Bandara penting yang menjadi transit penumpang dari Tarakan ke Tawau atau ke daerah-daerah lain di pedalaman Kalimantan Timur, sangat tidak layak, seperti sebuah gudang yang tidak terawat. Tetapi dua tahun kemudian, pada tahun 2008, secara fisik Bandara ini telah berubah total. Bangunan megah dengan fasilitas yang memadai sudah berdiri walaupun belum dioperasikan.



Gambar 4.1. Bangunan baru Bandara Udara Nunukan

Akan tetapi terlepas dari adanya pembangunan beberapa infrastruktur yang menonjol di kabupaten muda ini, secara keseluruhan, wilayah dan masyarakat di perbatasan ini belum begitu menjadi prioritas. Selain itu, sisi negatif dalam proses pembangunan itu dapat dilihat pada mudarnya nilai-nilai, kelembagaan tradisional dan norma sosial. Perilaku yang menonjol, misalnya, semua orang sepertinya rebutan untuk meraih kemakmurannya sendiri-sendiri dan kurang mengindahkan nilai-nilai kebersamaan. Aparatur sepertinya tidak begitu kuat dalam memegang amanah yang diembannya yang seharusnya menggunakan

kekuasaan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagian masyarakat menilai usaha-usaha untuk melestarikan kekuasaan tampaknya lebih diutamakan, dengan meminimalisasi akomodasi aspirasi masyarakat mengangkat tokoh masyarakat menjadi pemimpin yang duduk dalam birokrasi sesuai keahliannya. Mereka mengangkat pemimpin formal lebih didasarkan pada hubungan baik. Pada gilirannya, kesediaan berkorban masyarakat untuk memberikan apa yang mereka punya untuk meraih kehidupan bersama yang lebih baik dan jangka panjang dapat dikatakan mulai berkurang. Ke depan, demikian dikemukakan oleh seorang narasumber, 'kita membutuhkan pemimpin semakin hari semakin baik, yang lebih terpercaya (amanah) dan bersifat kenegarawanan'. Dengan dedikasi dan jiwa berkorban para pemimpin, demikian dikatakan oleh narasumber itu, adil makmur dapat tercapai. Inilah harapan-harapan bagaimana cara meningkatkan rasa percaya masyarakat pada pemerintah, salah satu elemen penting modal sosial, yang memungkinkan masyarakat mau berkorban untuk kemajuan bersama. Optimisme untuk masa depan dalam konteks masyarakat yang terutama diwarnai oleh relasi dan formasi sosial klientalistik yang sedikit banyak masih mewarnai masyarakat Nunukan, memang terkait erat dengan sifat pemimpinnya.

Rasa percaya masyarakat yang cukup rendah terhadap aparaturnya sekarang ini tampaknya merupakan akibat dari kinerja mereka yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Jabatan untuk sebagian aparaturnya adalah anugerah, bukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Nunukan, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Nunukan secara keseluruhan telah mengalami sedikit keguncangan-keguncangan baik karena peristiwa deportasi besar-besaran maupun keguncangan sosial sebagai akibat ketegangan sosial antara etnis 'asli' Kalimantan dengan 'pendatang' belum lama ini. Konflik yang dimaksud tentu saja konflik horizontal antara komunitas Tidung dengan Bugis. Pada sisi lain, penetapan daerah ini sebagai kabupaten

baru tentu saja menambah harapan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya.

Sementara itu, masalah yang berkaitan dengan konflik horizontal tadi yang secara berangsur-angsur mulai dilupakan. Pertemuan dengan para tokoh mereka tampaknya telah merubah pola hubungan masyarakat Nunukan untuk lebih mengedepankan solidaritas sesama penduduk Nunukan. Masyarakat Nunukan khususnya yang tinggal di Perbatasan Nunukan dengan Tawau memang dihadapkan pada situasi di mana kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan-minum, pakaian dan rumah belum sepenuhnya terpenuhi dari dalam negeri. Kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang menempati daerah pedalaman seperti Binusan.

Rendahnya atau jarangya ketersediaan *resources* ini, memberikan pengaruh pada modal sosial intra komunitas (*bonding social capital*) maupun antar komunitas (*bridging social capital*). Modal sosial dirasakan menurun oleh masyarakat di berbagai wilayah di Perbatasan Nunukan, khususnya yang terjadi di pusat-pusat perdagangan. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah ini, sulit mengharapkan orang mau kerja bakti atau gotong royong. Ada uang ada kerja bakti dan sebaliknya, tidak ada uang, tidak ada kerja-bakti, merupakan ungkapan populer yang dirasakan masyarakat. Kultur uang, kalau boleh diistilahkan demikian, menjadi dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini seolah menggugat nilai tradisional masyarakat Nunukan terkait dengan ketulusan individual yang sebelumnya menonjol. Hal ini sebetulnya merupakan kebiasaan yang tidak baru-baru ini, tetapi telah terjadi puluhan tahun belakangan ini.

Memang situasi sekarang ini telah membuat hampir semua orang dihadapkan pada pemenuhan berbagai kebutuhan secara mendesak. Hadirnya berbagai lembaga, badan atau organisasi masyarakat baik dari

lokal maupun pusat yang mengucurkan berbagai bantuan kepada masyarakat sejak Nunukan masuk dalam peta nasional, telah membuat sebagian masyarakat tergantung pada pihak luar. Kemandirian sebagian masyarakat lokal menjadi dipertanyakan, terutama setelah berbagai bantuan para pihak itu surut atau tidak ada lagi. Keswadayaan menjadi surut dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan permodalan, wirausaha merupakan harapan yang masih disimpan masyarakat Perbatasan Nunukan seperti diungkapkan oleh masyarakat seorang tokoh masyarakat perbatasan ini. Seorang informan menuturkan lebih lanjut bahwa pemerintah pusat kurang memiliki komitmen untuk mengembangkan Nunukan sebagai pusat perdagangan. Padahal katanya, Nunukan sangat strategis posisinya untuk pengembangan perdagangan internasional atau setidaknya perdagangan lintas batas. (*border trade*) Tingkat penurunan ekonomi masyarakat tampaknya dipengaruhi oleh situasi ketenagakerjaan. Jika banyak TKI dideportasi, tentu daerah ini akan terkenal imbasnya, meningkatnya pengangguran dan ketersediaan sembako yang menurun.

Informan yang tinggal di perbatasan itu pada mulanya menyangka bahwa masyarakat Perbatasan akan diprioritaskan terlebih-lebih setelah kehadiran presiden ke tempat ini ketika terjadi ketegangan dengan Malaysia menyangkut Ambalat. Namun tampaknya pemerintah masih perlu waktu untuk memenuhi harapan masyarakat. Ketika penelitian ini sedang dilakukan, misalnya jalan utama desa Binusan di mana mayoritas mutlak masyarakat Tidung tinggal, masih berupa jalan tanah, walaupun di kanan-kiri jalan sedang dibenahi drainasenya. Persiapan untuk pengaspalan tampaknya sedang dilakukan. Memang ada perasaan diperlukan tidak adil jika melihat pembangunan yang jelas timpang itu.



Gambar 4.2: kondisi jalan lingkar di desa Tanjung Harapan, Nunukan Selatan

Akan tetapi, pada sisi lain, perasaan diperlakukan tidak adil ini dapat dilihat juga sebagai hal yang perlu diakui secara subyektif tetapi perlu dipertanyakan obyektifitasnya. Masyarakat Nunukan secara faktual sebetulnya masih beruntung dibandingkan masyarakat yang ada di pedalaman sebagaimana masyarakat Krayan. Masyarakat di sini, sebagaimana ditunjukkan penelitian (Ardhana, 2006), yang hampir semuanya kebutuhan sembakonya tergantung pada Ba Klalan, terpaksa harus membayar jauh lebih mahal barang-barang itu. Masyarakat Nunukan lebih memiliki akses lebih baik pada sarana pendidikan maupun sarana perekonomian. Jalan ring yang memutari pulau memang belum selesai pengaspalannya atau masih berbentuk jalan tanah, sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Hal yang belum dinikmati oleh pedalaman Kalimantan seperti masyarakat Krayan tadi. Tidak perlu dikatakan, dibandingkan dengan Tawau memang jauh tertinggal. Mungkin karena masyarakat Nunukan lebih sering atau mungkin satu-satunya tujuan mencari kemajuan adalah Tawau sehingga membandingkan dua wilayah yang sangat berbeda itu menjadi tidak terhindarkan.

Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini, perhatian menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perbatasan Nunukan dapat dikatakan bahwa selama ini merasa kurang diperhatikan terutama karena masih belum tersuplaynya daerah ini oleh pemerintah. Seperti dikemukakan di atas, Pertamina belum bisa mensuplay gas ke daerah ini, sehingga masyarakat di sini harus memenuhinya dari Tawau. Karena itulah di semua tempat penjualan gas, misalnya, hanya tabung gas Petronas Malaysia yang disediakan. Infrastruktur juga masih belum berkembang sebagaimana diharapkan, walaupun Nunukan saat ini sedang membangun pelabuhan alternatif di Nunukan Barat. Akan tetapi, dibalik keprihatinan tersebut karena kurangnya suplay pemenuhan kebutuhan, tersimpan juga suatu hal yang positif yaitu mengenai luasnya jaringan masyarakat Nunukan. Mereka tidak hanya memiliki *networking* dengan tanah asal mereka seperti Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Timur tetapi juga dengan masyarakat dan dunia usaha di Tawau, Malaysia. Bahkan banyak di antara masyarakat Nunukan memiliki hubungan keluarga dengan penduduk di Tawau yang memang banyak berasal dari etnis Bugis juga.

Modal sosial lain yang terlihat menurun adalah norma resiprositas yang dulu tertanam pada jiwa masyarakat perbatasan Nunukan. Untuk sekedar menghadirkan orang apalagi orang penting dalam pertemuan atau peringatan-peringatan saja susah, demikian keluh seorang tokoh pemuda. Tokoh pemuda ini melanjutkan, bahwa merupakan suatu tantangan untuk membangun kembali modal sosial di daerahnya. Ia yakin bahwa orang-orang itu mau mengembangkan setia kawan dan berbalas kebaikan. Untuk merajut kembali rasa kebersamaan ini, ia menganjurkan memulainya dari kelompok-kelompok kecil etnik⁴. Potensinya cukup besar mengingat organisasi masyarakat sipil berdasarkan etnik ini hampir mewakili berbagai etnik di Nunukan seperti Tidung, Bugis (Sulawesi Selatan), Jawa, Toraja, Timor dan lain-lain. Masyarakat perbatasan Nunukan sejatinya sangat senang untuk saling membantu. *Take and give* merupakan

⁴ Wawancara dengan warga Nunukan (10/04/06).

sikap yang muncul dari pranata sosial yang sudah melembaga. Suatu saat ia senang menerima, tetapi pada saat yang lain ia merasa berkewajiban membalas budi baik seseorang yang pernah menjadi pihak yang memberi. Resiprositas merupakan pranata sosial yang relatif masih dipegang teguh. Tetapi, norma ini sekarang mengalami pelemahan sebagai *rule-in-use*, terutama oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Masyarakat Nunukan dapat dikatakan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Banyak pendatang yang berhasil menjadi saudagar, pengusaha di jasa perhotelan atau tuan tanah. Banyak pengalaman perantau ini yang menceritakan kesuksesan usahanya dibandingkan dengan ketika ia sedang di daerah asal. Jadi ketergantungan kepada lembaga pemerintah juga tidak begitu tinggi. Yang diperlukan adalah fasilitasi agar usaha mereka tidak mengalami hambatan karena kelemahan infrastruktur. Oleh karena itu NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nunukan tidaklah seramai di tempat lain. Di sini ada organisasi berbasis keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, LSM untuk pemberdayaan masyarakat dan ormas yang menjadi *underbouw* dari partai politik yang ada. Walaupun demikian, mereka tidak berarti sama sekali tidak membutuhkan LSM tersebut. Namun tampaknya kehadiran asosiasi-asosiasi usaha lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang begitu antusias dalam kewirausahaan ini guna memperkuat kerjasama usaha-usaha mereka.

Pada kasus lain, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap partai-partai merupakan akibat dari sikap dan perilaku politisi itu sendiri yang kurang maksimal dalam menepati janjinya. Sebagian masyarakat melihat elit partai lebih menjadikan masyarakat sebagai pihak yang didekati ketika menjelang pemilu, kemudian dijadikan suara mereka sebagai jalan untuk menempati posisi terhormat menjadi anggota dewan. Setelah menjadi anggota dewan, mereka lebih *concern* dengan permainan kekuasaan untuk pencapaian kemakmuran diri dan kelompoknya. Tentu

di antara anggota dewan yang memang reformis dan menggunakan kekuasaan untuk pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setelah berusaha memperoleh tempat tinggal di Nunukan, perantaw biasanya ikut bersama di rumah familinya. Dari sini perjuangan dimulai dengan orientasi untuk bekerja. Sebagian melalui Depanataer dan PJTKI, sebagian lagi berjuang sendiri ke tempat tujuan (Tawau). Pekerjaan dominan yang diperoleh oleh para TKI adalah sebagai pekerja di perkebunan. Namun banyak di antara pendatang ini juga menjadi wirausahawan. Sementara itu, masyarakat Nunukan banyak juga yang berprofesi sebagai nelayan dan mereka menginginkan profesi sebagai nelayan terus dapat mereka tekuni karena dalam bidang inilah mereka telah banyak menimba pengalaman pahit dan manisnya dan sudah berakumulasi menjadi suatu keahlian. Di antara mereka sudah ada yang mampu membeli motor boot bahkan di antaranya telah memiliki beberapa boot. Namun sebagian nelayan ini juga ada yang belum mampu membelinya yang harganya antara Rp. 7,5-15 juta tersebut.

Jaringan sosial (*social networking*) merupakan hal yang menopang eksistensi masyarakat Nunukan. Keluwesan dalam bergaul memungkinkan mereka dapat diterima oleh kelompok-kelompok lain yang berasal dari etnis lain. Struktur sosial dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan atau paguyuban berdasarkan etnik memang belum maksimal didayagunakan untuk kepentingan usaha ekonomi mereka. Namun hal ini merupakan potensi yang perlu dipelihara dan pada saatnya nanti dapat didayagunakan untuk keperluan peningkatan dunia usaha mereka. Bagitu juga organaisasi masa keagamaan perlu memperluas aspek dakwahnya tidak hanya menjadi penjaga moralitas masyarakat tetapi juga menjadi sarana memotivasi warga masyarakat untuk lebih aktif dalam pengembangan usaha dan membantu kelompok-kelompok miskin dapat meningkatkan standar kehidupannya. Derajat moralitas masyarakat memang harus senantiasa ditingkatkan agar kehidupannya lebih efektif, dengan tidak menghambur-hamburkan uang dan tenaga

pada kegiatan yang tidak produktif. Kondisi alam, kecenderungan masyarakat perantau maupun sikap dan perilaku pemerintah berkontribusi pada situasi modal sosial masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu segera dicari titik keseimbangannya adalah masalah representasi etnik dalam birokrasi pada satu sisi dengan sistem merit yang memang harus menjadi orientasi dalam penilaian kinerja pegawai maupun rekrutmen pada sisi lain. Masalah keadilan memang masalah yang senantiasa diperjuangkan untuk direalisasikan secara tegas sekaligus bijaksana dalam kehidupan sosial.

Masyarakat Nunukan cukup dikenal dengan jiwa pengorbanan dan kemurahan hatinya (*generosity*). Seperti telah diungkapkan, hal ini dapat dilihat pada kasus deportasi besar-besaran tahun 2001. Namun semakin masyarakat berorientasi bisnis, semakin kecil juga kesempatan dan ruang untuk tindakan-tindakan yang berciri khas sosial. Ini tampaknya terjadi karena telah menurunnya modal sosial, yang sebelumnya terbina baik menjadi kurang penggarapannya. Menurunnya sikap murah hati tampaknya seiring dengan kecenderungan meningkatnya sikap-sikap materialistis yang merupakan kecenderungan baru masyarakat Nunukan. Sebagaimana telah dikemukakan, hal ini dapat dimengerti karena pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi perhatian utama sebagian masyarakat.

Kerjasama kolektif memang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dalam gejala menurunnya gorong royong atau kerja bakti tetapi pada kehidupan sosial lain. Misalnya, untuk membersihkan got atau lingkungan menjadi hal yang tidak tampak lagi. Sekarang orang mau kerja bakti jika ada bayarnya. Bahkan kebersamaan dalam menghadapi kemalangan, sesuai yang biasanya melahirkan solidaritas sosial lebih kuat, tidak lagi ditunjukkan oleh masyarakat. Dulu, melayat tetangga sekampung yang kehilangan anggota keluarganya merupakan hal yang dirasakan kuat oleh masyarakat. Tetapi sekarang sikap demikian sudah

mengalami penurunan. Sekarang, untuk melayat saja masih mempertimbangkan siapa orang yang sedang mengalami duka cita itu. Kalau orang tersebut dianggap orang yang berpengaruh atau kaya, kemungkinan besar akan datang, tetapi kalau yang meninggal itu adalah dari keluarga yang tidak mempunyai dan tidak berpengaruh, maka biasanya tidak datang.

Pemudaran juga dapat dilihat dari apresiasi masyarakat pada adat istiadat Nunukan. Dikatakan oleh seorang informan, sebetulnya betapapun masyarakat Nunukan adalah plural dari segi etnik dan agama, tetapi peran adat bagi tiap-tiap kelompok etnik tetap mereka patuhi walaupun dilihat dari rentang waktu, kepatuhan itu juga mengalami pemudaran sebagaimana juga terjadi dalam masyarakat transisional lainnya. Pemudaran memang berkaitan dengan meningkatnya gaya hidup. Keinginan untuk mematuhi aturan sosial tidak didukung oleh kenyataan kehidupan sosial ekonomi yang selalu meminta pemenuhan secara kontan (*cash*). Norma sosial yang dahulu dipegang teguh, memang tampak mengalami pemudaran atau disfungsi dan tidak lagi menjadi aturan (*rule-in-use*) yang digunakan sehari-hari.

Perubahan modal sosial dapat dilihat dalam kasus di desa Nunukan Timur, Timur dan Barat karena wilayah ini termasuk daerah yang paling banyak mengalami urbanisasi dengan konsentrasi penduduk bermata pencaharian sebagai pedangan, pemilik dan pekerja jasa maupun sebagai pegawai negeri sipil. Tanah-tanah di wilayah tiga desa ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kalkulasi ekonomi masyarakat di sini tentu lebih menonjol dibandingkan pertimbangan lain. Pada sisi lain masyarakat di sini diliputi derajat modal sosial yang relatif memudar khususnya dalam hal kepatuhan pada norma yang dianut bersama. Di wilayah ini, masyarakat memang cenderung terbuka untuk menerima dari etnik manapun seperti Jawa, Minahasa, Timor, Tator maupun Bugis yang memang mayoritas penduduk. Rasa kebersamaan

dan solidaritas memang dapat dipelihara dalam lingkup etnik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, aspek ini juga mengalami pemudaran. Tetapi yang tampak menonjol dalam karakteristik masyarakatnya di sini adalah sikap toleran untuk menerima perbedaan-perbedaan yang masing-masing mereka bawa dari daerah atau adat-istiadat asalnya. Namun karena heterogenitas inilah, seperti telah disinggung, norma sosial dan aturan tampak kurang dipatuhi. Terkesan ada semacam sikap permisif dengan munculnya tempat-tempat hiburan di tengah masyarakat mayoritas Bugis yang relatif taat beragama itu.

Dalam suasana transisional kehidupan sosial, kepemimpinan memang sangat menentukan. Dalam beberapa kesempatan diskusi, masyarakat menggaris-bawahi pentingnya sifat amanah seorang pemimpin. Tidak mengkhianati, tidak berbohong dan tidak menyalahi janji, demikian pesan yang sering dikemukakan. Dengan perkataan lain, masyarakat mengharap adanya konsistensi ucapan pemerintah dengan perbuatan. Modal sosial khususnya saling percaya tampaknya diperlukan sekali dalam proses merangkul masyarakat yang tampak mulai apatis dalam kehidupan sosial politik. Elemen penting modal sosial ini juga diperlukan dalam rangka menata kembali berfungsinya norma, aturan dan hukum.

Dalam kaitannya dengan prevensi konflik, seorang tokoh masyarakat Nunukan mengemukakannya secara gamblang dengan mengutip sebuah ayat al-Quran. Peringatan dini sebagai pencegah awal konflik sosial, kerusuhan, *chaos*, atau lebih jauh lagi revolusi sosial adalah dengan pemenuhan dua kebutuhan dasar masyarakat yaitu pemenuhan rasa lapar dan memberikan rasa aman. Dengan kata lain, sebagaimana juga dikonsepsikan oleh Abraham Maslow, pemenuhan fisiologis harus menjadi prioritas dalam program peringatan dini sosial. Dapat dikatakan hampir tidak mungkin untuk menjaga tertib sosial, jika masyarakatnya diliputi oleh rasa lapar dan tidak aman. Untuk mencapai suksesnya program-program pemenuhan kebutuhan dasar ini, tentu memerlukan

persistensi modal sosial baik saling percaya dan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat maupun yang menjembatani entitas masyarakat dan pemerintah. Setelah itu, baru pemenuhan untuk ekspresi-ekspresi lain yang perlu mendapatkan fasilitas yang memadai baik berbentuk pelayanan yang diberikan aparatur maupun hasil kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tansparansi, akuntabilitas dan membuka partisipasi masyarakat yang belum terlaksana secara memadai dan menjadi salah satu sumber dari rasa anomie masyarakat selama ini tentu menjadi prasyarat tercapainya tujuan tersebut.

Kondisi modal sosial masyarakat tampak tidak bisa dipisahkan dari situasi *resources* yang tersedia dalam masyarakat itu. Dengan demikian, kondisi masyarakat yang bersangkutan apakah relatif persisten modal sosialnya atau tidak dan ini menunjukkan ketersediaan *resources*, menentukan derajat dan sifat modal sosial baik intra maupun antar kelompok-kelompoknya. Dengan melihat tingkat kepemilikan pada *resources* terlihat bahwa situasi modal sosial relatif berbeda satu sama lain. Masyarakat Perbatasan Nunukan tampaknya merupakan masyarakat yang relatif mandiri dan berjiwa wirausaha yang tinggi. Situasi ini merupakan hal yang positif jika usaha-usaha masyarakat dikembangkan dalam kerangka kolaborasi, di mana masyarakat pengusaha bekerjasama secara padu dalam untuk meningkatkan usaha bersama. Situasi ini akan berbeda jika masyarakat pengusaha berkompetisi untuk keunggulan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, persaingan tidak sehat akan muncul dalam bentuk perang harga yang justru merugikan mereka sebagai produsen atau penghasil barang dagangan lainnya. Saling percaya masyarakat Nunukan dengan pihak luar sebetulnya sangat tinggi. Mereka *welcome* dengan kedatangan masyarakat internasional atau masyarakat yang berasal dari etnik-etnik lain. Sejauh yang terjadi dalam kecamatan Nunukan, daerah yang menjadi daerah penelitian yaitu Nunukan Timur, Barat dan Selatan adalah masyarakat yang heterogen dari segi etnik.

Terbukti bahwa masyarakat Nunukan yang tinggal di daerah inipun sangat menikmati dengan situasi kehidupan sosial karena adanya kebersamaan, solidaritas dan toleransi.

Percaya terhadap pemerintahan yang sekarang relatif rendah itu juga secara otomatis akan meningkat jika pemerintah teguh dan bersedia mempraktekkan tata kelola pemerintah yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Batas toleransi masyarakat Nunukan secara umum sebetulnya sangat tinggi. Selama hampir 30 tahun mereka bersabar melihat perilaku aparaturnya baik lokal dan terutama pusat yang tidak begitu memperhatikan peningkatan kesejahteraan yang seharusnya menjadi tanggung-jawabnya itu. Rasa sabar masyarakat tentu ada batasnya dan itu harus diwaspadai sebagai cara pendeteksian dini akan amuk sosial yang sekarang letupannya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang harus digaris bawahi adalah bahwa rasa percaya yang rendah masyarakat merupakan resultan dari sikap dan perilaku pemerintah yang belum baik.

Modal sosial masyarakat Perbatasan Nunukan itu tampak menggejala secara fluktuatif. Indikasi hidupnya modal sosial dapat dilihat dari munculnya gejala keswadayaan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana, betapapun secara finansial masih tergantung pada bantuan pihak luar. Masyarakat perbatasan Nunukan dapat dikatakan yang paling bergantung pada suplay barang dagangan dari luar karena berhadapan dengan situasi jarangnyanya sumber daya itu (*scarce resources*). Kebutuhan dasar seperti sandang, minuman dan bahan perumahan tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Sebagai masyarakat yang sangat tergantung demikian, tampak bahwa situasi modal sosial pun kurang berkembang, khususnya unsur resiprositas antar masyarakat Nunukan dengan masyarakat pulau besar (daratan) pulau Kalimantan. Masyarakat ini, setidaknya dapat dilihat dari sikap mereka ketika ditanyakan tentang kepercayaan mereka terhadap pemerintah pusat, umumnya memiliki rasa percaya yang rendah. Tetapi tampaknya hal ini tidak saja karena

kondisi relatif terdeprivasinya mereka dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi juga karena perilaku aparat pemerintah yang sepertinya dalam kasus demi kasus kurang mendukung persistensi modal sosial tersebut. Oleh karena ketergantungan yang besar pada Tawau (Malaysia) itulah, masyarakat perbatasan akan tetap terlibat dalam perdagangan lintas batas. Sebagian masyarakat Nunukan tampaknya memang diuntungkan dengan keadaan ini dan mereka mengharapkan pemerintah memfasilitasi situasi yang mereka dihadap dalam bentuk-bentuk yang mempermudah transaksi, pengiriman barang maupun pergi dan pulang yang mereka lakukan sebagai kegiatan sehari-hari itu.

Resistensi modal sosial dan meningkatnya kekurang-patuhan masyarakat pada norma sosial maupun hukum harus diwaspadai karena dari kondisi demikian akan melahirkan tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengancam tertib sosial. Fenomena ini sama sekali tidak absen dalam sikap dan perilaku masyarakat. Satu dua orang memiliki kondisi itu karena pengalaman yang sulit mendapatkan kebutuhan dasar.

4.2. Prevensi Konflik Sosial

Nunukan dapat dapat dikatakan memiliki nilai penting dan strategis dilihat dari tema penelitian. Hal ini karena tema tentang Deteksi Dini untuk Mengantisipasi Konflik Sosial (prevensi konflik) sangat relevan di kota ini. Di kota ini, kompetisi bahkan perebutan sumber daya langka (*scare resources*) terjadi sangat intens yang seringkali bersifat lintas etnik. Jabatan dalam birokrasi, sebagaimana di daerah lain, juga menjadi lahan baru yang diperebutkan terutama terjadi sejak kota ini menjadi ibukota kabupaten Nunukan.



Gambar 4.3: Kantor Bupati Nunukan

Kondisi sosial ekonomi yang belum sebagaimana diharapkan masyarakat, adanya gejala deprivasi serta gejala sosial yang berkaitan dengan tergerusnya modal sosial dapat disaksikan di salah-satu kota yang sangat dinamis di wilayah perbatasan ini. Pembangunan pelabuhan untuk barang dan penumpang yang lebih layak, perbaikan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat, pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang merupakan proses panjang yang menambah dinamikanya. Faktor-faktor itulah yang membuat kota Nunukan sangat relevan sebagai lokasi penelitian. Penelitian di sini dapat memberikan data berarti dalam rangka penelitian untuk pengembangan sistem deteksi dini sosial untuk konflik.

Sistem informasi deteksi dini sosial diadopsi dari ungkapan berbahasa Inggris yaitu *Social Early Warning Information System (SEWIS)*, yang dapat diartikan sebagai 'sekumpulan data dan informasi penting tentang kondisi berbagai aspek kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat dengan pengukuran secara kuantitatif/statistik serta diberi penjelasan

dan interpretasi teoritis⁵. Tersedianya informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan menetapkan langkah-langkah atau tindakan yang tepat baik dari segi cara maupun waktunya sehingga kekohesivan, keharmonisan dan ketahanan masyarakat dapat terjaga dan kalau mungkin dapat ditingkatkan.

Studi kuantitatif untuk mengetahui secara dini tingkat kemungkinan atau potensi terjadinya konflik sosial di kota Nunukan, seperti tindakan kolektif yang 'anarkis' misalnya, menggunakan variabel kondisi ekonomi, etnisitas, nasionalisme, modal sosial dan tata pemerintahan. Kondisi ekonomi akan menggambarkan bagaimana persepsi mereka tentang tingkat kesejahteraan yang mereka alami. Etnisitas menggambarkan sejauhmana terjadi hubungan antar etnisitas dengan tindakan kolektif. Modal sosial menunjukkan sejauhmana moral, norma sosial, hukum, saling percaya dan resiprositas berkaitan dengan kecenderungan tindakan kolektif. Tata kelola pemerintahan (*governance*) menggambarkan sejauhmana implementasi prinsip-prinsip good governance dipraktekkan. Masing-masing variabel menggunakan serumpun indikator sebagai parameternya, berupa pertanyaan maupun pernyataan yang dianggap sensitif menggambarkan keadaan masyarakat menyangkut masing-masing indikator tersebut. Dengan mengambil 100 responden sampel di Kelurahan Nunukan Timur⁶ dan menggunakan *analisis univariate* (atau distribusi frekuensi) terhadap data yang

⁵ Penelitian tentang SEWIS oleh para peneliti LIPI di mana penulis menjadi salah anggota tim sudah mulai dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan Rusydi Syahra dkk., di hampir semua kabupaten di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Konsep-konsep dalam penelitian tersebut dengan beberapa perubahan juga digunakan. Hasil penelitiannya dapat dilihat pada tiga buku hasil penelitian yang disunting oleh Rusydi Syahra dengan judul 'Penelitian untuk Pengembangan Sistem Peringatan Dini Sosial'.

⁶ Pada tahap I ini data kuantitatif hanya berdasarkan pada pengumpulan data di daerah Nunukan Timur jadi belum merupakan representasi dari pulau Nunukan secara keseluruhan. Direncanakan, karena keterbatasan dana, wilayah lain akan disurvei pada dua tahap berikutnya sehingga pada akhirnya akan terkumpul data yang merupakan representasi dari seluruh wilayah kecamatan Nunukan .

diperoleh, hasil dari masing-masing variabel di atas diuraikan di bawah ini.

Berikut ini, hanya akan diuraikan situasi modal sosial sebagai variabel utama dan sub variabelnya yang meliputi fungsi norma dan aturan sosial, *trust* dan resiprositas. Selanjutnya akan dianalisis sejauhmana faktor modal sosial berimplikasi pada tindakan kolektif.

4.2.1. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang digali secara kuantitatif dalam penelitian ini dapat menjadi indikasi sejauhmana perbaikan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjadi, sesudah sekitar delapan tahun menjadi kabupaten. Sebaliknya, jika tidak ada perbaikan selama ini, maka yang akan muncul dalam masyarakat adalah gejala kekecewaan. Situasi ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak diharapkan yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang telah kehilangan berbagai hak dan kesempatan untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai orang lain atau kelompok lain, karena pembangunan yang tidak merata (*uneven development*). Kekecewaan yang dialami masyarakat perbatasan Nunukan sangat mungkin terjadi jika masyarakat merasakan kurangnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kehilangan akses terhadap berbagai jenis sarana pelayanan umum seperti listrik, telepon dan air bersih, serta kehilangan komunitas sebagai ruang ruang interaksi sosial dan rujukan identitas diri.

Temuan penelitian menyangkut pandangan masyarakat tentang kondisi ekonomi sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembangunan sosial-ekonomi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Gejala ini juga sangat penting sebagai landasan untuk membangun sistem informasi deteksi dini sosial (*social early warning system*) yang bersifat strategis. Berbagai

kejadian belakangan ini telah memberi pelajaran yang sangat berharga. Tingkat ketidak-pastian hukum yang rendah, lemahnya modal sosial, dan perasaan kekecewaan yang dipersepsikan semakin banyak orang mengalami keterpurukan dan ketidak-puasan yang mereka alami sehari-hari, akhirnya bisa membentuk perilaku kolektif (*collective behavior*) yang selanjutnya mengarah pada aksi bersama (*collective action*) yang tidak mungkin dapat diatasi melalui pendekatan keamanan (*security approach*) tetapi tentu perlu dengan cara yang lebih memberikan harapan baik dan cara-cara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Apakah perubahan sosial ekonomi selama ini setelah menjadi kabupaten, sudah ada perbaikan sehingga masyarakat merasa sudah cukup memuaskan atau justru sebaliknya. Seperti ditunjukkan Mayoritas responden melihat bahwa perekonomian masyarakat belum lebih baik dari masa sebelum Nunukan menjadi kabupaten. Hal ini juga dipertegas dengan indikasi belum membaiknya penghasilan mayoritas responden. Kondisi ini tampaknya berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang belum juga tersedia lebih banyak dibandingkan fase Nunukan sebelum menjadi kabupaten. Hal ini pulalah yang menyebabkan kota ini hanya sebagai kota transit untuk lebih jauh mencari pekerjaan di Tawau (Malaysia). Ramainya perusahaan PJTKI di kota ini merupakan indikasi kuat dari peran kota ini sebagai kota transit.

Akan tetapi indikasi lain yang dapat dilihat adanya perbaikan dalam kewirausahaan masyarakat. Sebagian masyarakat, misalnya, merasakan bahwa bantuan modal usaha dari ban-bank pemerintah lebih mudah diperoleh. Dorongan untuk kemudahan tentu saja harus semakin diupayakan oleh pemerintah karena tidak sedikit (16 % menyatakan sangat tidak benar dan tidak benar dan 36% menyatakan kurang benar) yang merasakan kemudahan itu belum sepenuhnya mereka rasakan. Pendapat terbelah dua juga diutarakan masyarakat menyangkut pelayanan umum dari pemda, sebagian menyatakan telah membaik, tetapi dengan jumlah persentase yang sama juga menyatakan bahwa pelayanan pemda belum membaik.

Adapun mengenai sudah ada tidaknya peningkatan kesehatan untuk warga. Dukungan mayoritas terhadap masalah ini juga relatif sama yaitu bahwa mereka belum merasakan adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Namun perlu diberi catatan di sini bahwa pemda tampaknya sudah mulai berusaha untuk memperbaiki standar pelayanan. Rumah sakit yang baru dengan bangunan yang sangat baik bahkan dapat dikatakan megah dengan sarana yang lebih lengkap memang sedang dipersiapkan pemda. Tetapi sampai ketika penelitian lapangan dilakukan, rumah sakit baru ini belum difungsikan. Pelayanan kesehatan masyarakat masih dipusatkan di rumah sakit lama yang sebetulnya tampak berkesan seperti sebuah Puskesmas karena memang belum memadai untuk sebuah rumah sakit daerah. Selama ini memang masyarakat harus berobat ke Tarakan atau ke Tawau untuk mendapat pelayanan yang lebih baik. Keterbatasan peralatan, dokter ahli membuat rumah sakit di Nunukan sering merujuk ke rumah sakit lain seperti Tarakan tersebut. Walaupun demikian, tidak semua sektor dianggap tidak mengalami perbaikan. Sektor pendidikan merupakan salah satu yang dianggap mayoritas responden telah mengalami peningkatan dalam standar layanan, sekalipun dalam jumlah yang relatif signifikan (42%) mengatakan sebaliknya.

Sudah sejauhmana pembangunan Nunukan sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat? Hampir setengahnya memang berpendapat bahwa pendapat dan harapan masyarakat sudah dipertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa optimalisasi partisipasi masyarakat masih perlu dilakukan. Musrebang yang merupakan proses *bottom up* dalam perencanaan pembangunan belum banyak memberi ruang pada akomodasi pendapat dan harapan masyarakat. Keterbatasan dana biasanya menjadi alasan aparatur untuk tidak dapat memaksimalkan pembangunan sesuai dengan harapan dan pendapat masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat juga merupakan hal yang sama perlu dan mendesaknya dilakukan. Eksklusi tokoh masyarakat dalam proses pembangunan akan menghasilkan pembangunan yang tidak diinginkan (*unwanted development*).

Dalam pandangan masyarakat lokal, bantuan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur maupun dana untuk pembinaan dunia kewirausahaan masih diperlukan. Bagi masyarakat, bantuan tersebut tidak akan membuat masyarakat mengalami ketergantungan. Hal ini, kata mereka, karena masyarakat Nunukan pada dasarnya bersifat mandiri. Kemandirian itu dapat dilihat dari berbagai upaya kreatif warga khususnya pendatang di sini yang mencoba *survive* dengan berbagai cara khususnya dengan cara peningkatan hubungan kerja dan usaha dengan pengusaha di Tawau. Dan yang menarik adalah bahwa menurut mereka, ketergantungan secara ekonomi, tidak akan memudahkan rasa kesetiaan pada NKRI. Mereka memang merasakan bahwa bekerja di Malaysia itu lebih baik dibandingkan di negeri ini. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi Nunukan menjadi suatu keniscayaan agar warga Indonesia bisa bekerja di negeri sendiri. Hal ini memang sangat penting karena mayoritas responden berpendapat bahwa bekerja di Malaysia masih dianggap sebagai lebih baik daripada bekerja di Nunukan.

Apakah selama ini pembangunan di Nunukan sudah cukup merata dan dinikmati oleh semua kalangan baik pendatang maupun kelompok masyarakat yang dianggap sebagai penduduk asli? Mengobservasi apa yang terlihat secara kasat mata apa yang terjadi di daerah Binusan sebagai wilayah yang ditempati oleh 'penduduk asli' dengan daerah-daerah lain seperti Nunukan Barat, Tengah dan Timur yang lebih banyak dihuni oleh pendatang. Mayoritas mutlak (mengatakan benar sekali 55,5 dan benar 32,3) menilai bahwa pendatang memang lebih berhasil dalam meraih kehidupan yang kompetitif di Nunukan ini. Hal ini memang menjadi gejala umum. Dalam berbagai wilayah di nusantara ini, penduduk asli cenderung tersisih baik dari segi perolehan kerja maupun keberadaan tempat tinggal. Terpinggirkan dalam gerak pembangunan menjadi seolah suatu proses yang tidak terelakkan. Belajar dari berbagai hal yang terjadi di daerah lain, pemda Nunukan memang diharapkan dapat mengatasi hal ini untuk tidak mengulang-ulang kejadian ini. *Affirmative action*

dari pemda tampaknya diperlukan untuk mengatasi problematika pembangunan yang tidak merata ini.

Tabel 4.1: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Kondisi Ekonomi setelah Nunukan menjadi Kabupaten (dalam persentase)

No	Indikator	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Kegiatan perekonomian masyarakat sudah lebih baik	9.2	14.3	37.8	35.7	3.1	100
2	Penghasilan anda sudah lebih baik	7	16	45	28	4	100
3	Lapangan pekerjaan sudah lebih tersedia	20	24	42	13	1	100
4	Bantuan modal usaha dari bank pemerintah lebih mudah	8	8	36	42	6	100
5	Pelayanan umum dari Pemda sudah lebih baik	4	5	40	45	6	100
6	Pelayanan kesehatan sudah lebih baik	31	13	22	30	4	100
7	Pelayanan pendidikan untuk keluarga saya sudah lebih baik	4	6	32	47	11	100
8	Perencanaan Pembangunan di Nunukan telah mempertimbangkan pendapat dan harapan masyarakat	10	13	36	35	6	100
9	Tokoh masyarakat dan masyarakat sudah dilibatkan dalam menyusun program pembangunan	19.2	11.1	31	35.4	3	100
10	Masyarakat Nunukan sangat mandiri sehingga bantuan pemerintah tidak akan menimbulkan ketergantungan	5	13	33	42	7	100
11	Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia	3	3	17.2	49.5	27.3	100
12	Perlu peningkatan ekonomi Nunukan sehingga orang Indonesia tidak perlu bekerja di Malaysia	1	1	0	17	81	100
13	Bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan	7.3	5.2	22.9	34.4	30.2	100
14	Pendatang lebih berhasil daripada penduduk asli	0	4	8.1	32.3	55.6	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

4.2.2. Modal Sosial

Salah satu unsur modal sosial adalah nilai, norma dan aturan bersama sebagai pranata sosial yang dapat memfasilitasi adanya kerjasama kolektif. 'Pengukuran' unsur ini dapat dilihat dari mulai sangat berfungsinya pranata tersebut sampai kepada sangat tidak berfungsi. Dalam literatur sosiologi, dikenal konsep anomie yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak fungsional untuk menghadapi perubahan dan perkembangan yang sedang berlangsung di berbagai bidang kehidupan. Situasi anomie ini selalu menyertai setiap perubahan sosial dan tingkat anomie yang tinggi dapat dikatakan sebagai rendahnya fungsi pranata yang dianut bersama atau lebih jauh sebagai keadaan modal sosial yang resiten. Dalam kondisi ini sistem nilai yang sesuai guna menentukan sikap dan perilaku terhadap perubahan situasi tidak lagi menjadi basis sikap dan perilaku individual atau kelompok tertentu. Selain itu juga bisa muncul perasaan tidak puas karena kehilangan kontrol terhadap situasi, menjadi pesimis karena berada pada posisi yang tidak menguntungkan, serta kehilangan kepercayaan terhadap segala kelembagaan sosial yang ada. Gejala-gejala modal sosial resiten seperti ini dengan segala dampaknya terlihat dengan jelas dalam masyarakat kita sejak beberapa waktu belakangan ini. Kontribusi yang penting dari konsep modal sosial yang digunakan adalah kemampuannya untuk upaya menjelaskan sebab dan akibat krisis multidimensional yang masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagai suatu pendekatan sosiologis dalam menjelaskan perubahan sosial, modal sosial memang bukanlah suatu konsep yang baru sama sekali. Konsep yang merujuk secara khas pada disfungsi-pranata sosial oleh sosiolog klasik ini telah Emile Durkheim disebut anomie. Konsep ini untuk menjelaskan fenomena keterasingan, sebuah gejala yang dialami banyak warga masyarakat yang timbul sebagai akibat suatu

proses perubahan sosial mendasar yang berlangsung di Perancis sepanjang abad ke 19. Perancis yang semula menganut sistem pemerintahan monarki berubah menjadi sebuah negara dengan sistem pemerintahan republik, dari masyarakat agraris tradisional kemudian mengalami pergeseran menjadi masyarakat industri, suatu perubahan yang mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke 19. Hampir setengah abad sejak diperkenalkan oleh Durkheim konsep anomie seolah-olah tenggelam dan tidak digunakan sebagai alat analisis sosial. Baru pada akhir tahun 1930an Robert K. Merton (1938) menggunakannya untuk menjelaskan gejala yang terjadi pada masyarakat Amerika ketika menghadapi kesulitan ekonomi pada waktu itu. Merton memperkaya pengertian konsep anomie dengan menempatkannya bukan lagi sebagai situasi yang dialami orang sebagai individu, tetapi lebih sebagai suatu keadaan yang muncul karena kesenjangan atau diskrepansi antara struktur sosial dan struktur budaya, sebagai akibat dari proses perubahan sosial.

Bagi Merton, anomie ialah suatu keadaan disfungsi struktur budaya, yang terutama terjadi karena ketimpangan yang berlangsung berkepanjangan antara norma dan tujuan budaya dengan struktur sosial yang berlaku yang membatasi kemungkinan para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mewujudkan tujuan budaya itu (Sztompka, 1986). Keadaan anomie timbul karena tujuan budaya bangsa Amerika waktu itu yang tersimpul di dalam istilah *The American Dream*, yakni mencapai kesuksesan materi tanpa batas, tidak didukung oleh struktur sosial dan struktur kesempatan (*opportunity structure*) yang menjadi sangat terbatas karena adanya krisis ekonomi. Dalam upaya untuk tetap bisa mewujudkan tujuan budaya itulah Merton melihat banyak orang Amerika yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku (*deviant behavior*), yakni menempuh cara apa saja untuk memperkaya diri. Pada waktu inilah muncul banyak *robber barons*, orang-orang yang menjadi kaya berkat ketegaannya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai ada.

Kontribusi penting dari Merton dalam hal ini adalah tipologinya tentang bentuk-bentuk respon yang dipilih orang-orang menghadapi kesenjangan tersebut. Merton menunjukkan adanya lima kemungkinan pilihan, sebagai berikut:

- Pertama,* menyelaraskan budaya dengan struktur sosial yang ada (*conformity*);
- Kedua,* menciptakan norma-norma baru (*innovation*);
- Ketiga,* mengikuti saja struktur sosial tanpa mempedulikan landasan norma budayanya (*ritualism*);
- Keempat,* menjauhkan diri dari kenyataan yang timbul akibat pertentangan antara struktur dan kultur itu (*retreatism*); dan
- Kelima,* sampai kepada berusaha menjungkir-balikkan struktur sosial dan struktur budaya yang ada dan mencoba menciptakan yang baru samasekali (*rebellion*). Apa yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat perbatasan Nunukan dapat dijelaskan dengan menggunakan tipologi Merton ini.

Kajian ini memetakan sudah sejauhmana gejala disfungsiialisasi norma dan aturan sosial dalam masyarakat Nunukan. Situasi anomie dapat dilihat dari kesulitan individu untuk beradaptasi yang berakibat hilangnya kemampuan untuk melakukan orientasi sosial secara umum, meningkatnya rasa tidak aman dan terpinggirkan, meningkatnya ekspektasi secara tak terkendali, perasaan deprivasi relatif ataupun absolut dan berkembangnya dorongan untuk mempertanyakan keabsahan nilai-nilai dasar yang ada (Lanyon dan Western, 1996).

4.2.3. Fungsi norma dan Aturan sosial

Aturan agama, adat, norma sosial dan hukum dalam masyarakat Nunukan tampaknya masih berperan dalam pengaturan kehidupan sosial. Persepsi masyarakat luas melihat bahwa aturan agama dan adat istiadat tampak sesuai dengan perubahan sosial yang mereka alami. Adat tampak berperan dalam jenjang-jenjang penting kehidupan seseorang (*life-cycle*) seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Adat juga berperan dalam peringatan-peringatan hari penting. Pengaruh nilai-nilai agama pada adat tradisi sudah berjalan lama sehingga terdapat kesan bahwa keduanya mewakili hal yang sama. Walaupun demikian, beberapa ritual atau seremoni masih dapat dibedakan dan keduanya tidak menimbulkan atau menjadi basis adanya konflik sosial. Hal inilah yang membuat masyarakat Nunukan mampu mengikuti perkembangan sosial di tengah modernisasi. Sebagai bagian dari Kalimantan Timur, masyarakat Nunukan juga mengapresiasi budaya lokal seperti upacara Bedewa yang umumnya dipraktikkan oleh suku Tidung. Infrastruktur dukungan pemda Nunukan terhadap adat ini dapat dilihat dalam peran Dinas Pariwisata yang menerbitkan berbagai buku yang bertema apresiasi budaya lokal. Data kuantitatif juga menunjukkan bahwa secara umum responden dari masyarakat Nunukan berpendapat bahwa kendati nilai-nilai, norma dan harapan masyarakat secara umum masih diakui keberadaannya dalam masyarakat, namun demikian terdapat pergeseran yang menggambarkan bahwa nilai-nilai, norma dan bayangan tentang masa depan tersebut mulai luntur dan pudar. Hal ini ditandai dengan kenyataan antara lain bahwa mayoritas responden membenarkan pernyataan (55.1 menyatakan benar dan 11.2 persen menyatakan sangat benar) bahwa masyarakatnya sekarang sudah semakin jauh dari nilai-nilai moral yang luhur. Oleh karena itu, hubungan antar mereka kurang didukung oleh moralitas. Mayoritas, misalnya, berpendapat bahwa masyarakat persekarang kurang toleran dengan perbedaan pendapat. Mayoritas responden juga menyatakan bahwa terdapat kecenderungan umum bahwa masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Walaupun demikian,

mayoritas masih berpendapat bahwa pendidikan tetap penting dan tidak setuju dengan sikap terlalu materialistis dan pragmatis. Hanya kurang dari seperempatnya (21%) yang setuju dengan sikap demikian.

Dalam konsisi seperti demikian, pemerintah selayaknya berperan lebih positif dalam membina masyarakat untuk kehidupan yang lebih terarah dan memiliki basis moral. Namun tampaknya tidak terjadi demikian. Hampir 80 % responden justru menilai kebijakan pemerintah kurang jelas dan membingungkan. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan lemahnya kepastian hukum. Dalam pandangan mayoritas masyarakat, setiap orang dapat menafsirkan peraturan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Di sini kepentingan sendiri tampak lebih utama dibandingkan mencari titi temu tafsir hukum yang dapat merangkul kepentingan bersama.

Tabel 4.2: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang menyangkut Moral, Norma dan Hukum (dalam persentase)

No	Indikator Moral/Norma/Hukum	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Pendidikan tidak penting, lebih penting jalan pintas untuk dapat uang banyak	32	13	34	15	6	100
2	Kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan membingungkan banyak orang	2	3	16	59	20	100
3	Setiap orang dapat menafsirkan peraturan sesuai dg kepentingan masing-masing	7.1	5.1	36.4	37.4	14.1	100
4	Sekarang ini sulit menemukan orang yang toleran dengan perbedaan pendapat	1	6	22	57	14	100
5	Hanya sedikit orang yang punya rasa kebersamaan	0	12	16	52	20	100
6	Masyarakat kita sekarang ini semakin jauh dari nilai-nilai moral yang luhur	2	9.2	22.4	55.1	11.2	100
7	Banyak orang yang hanya mementingkan diri sendiri	0	10,1	15.2	55.6	19.2	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

Harus dicatat bahwa pemerintahan Kabupaten yang sekarang berjalan, adalah pemerintahan yang baru saja terpilih pada Pilkada tahun 2006. Pada waktu itu, calon dari partai Islam PBB memenangkan Pilkada daerah dan mengalahkan tokoh-tokoh senior partai mapan seperti Golkar dan PPP. Bahkan partai yang lahir di era reformasi seperti PAN harus menerima kekalahan calon bupatinya dalam pilkada tersebut. Bupati yang asalnya sebagai pengusaha yang bergerak dari bawah dan sukses dalam perdagangan lintas batas utamanya rokok ini tampaknya telah mendapatkan dukungan rakyat Nunukan untuk kedua kalinya⁷. Kiprahnya memang dapat terlihat terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan. Jalan lingkar pulau ini sudah tembus betapapun sebagian besar masih berbentuk tanah. Sektor pendidikan juga dibenahi bahkan kualitas bangunannya seperti terlihat dalam gedung-gedung sekolah dasarnya sangat baik dan mengalahkan kualitas gedung sekolah sebagaimana umumnya terdapat di Jawa.

Namun tampaknya gebrakan menuju *good governance* belum dilakukan oleh pemerintah baru ini seperti peningkatan disiplin pegawai negeri sipil dengan cara merazia mereka yang berkeliaran pada jam kantor sebagaimana dilakukan pemda-pemda lain. Oleh karena itu, PNS di Nunukan masih dapat ditemukan keluyuran pada jam kerja dan hal ini berimplikasi pada peningkatan pelayanan. Hal yang tampaknya positif telah dilakukan adalah rekrutmen pegawai pemda yang sudah berdasarkan mekanisme meritokrasi. Ini merupakan langkah awal perbaikan kinerja aparatur. Tentu usaha yang lebih sistemis dan berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme masih perlu peningkatan.

⁷ Tetapi dalam pandangan seorang calon lain, keunggulan perolehan suaranya tidak terlepas dari money politics.

4.2.4. Kepercayaan, Resiprositas dan Hubungan Sosial

Kendati sebagian masyarakat Nunukan mengalami penurunan dalam moralitas, namun demikian masih terdapat modal sosial, khususnya kekohesivan internal yang cukup tinggi pada tingkat komunitas etnik. Namun demikian, kekohesivan internal tersebut tidak diimbangi dengan kekohesivan eksternal yaitu dengan masyarakat luar, dan bahkan kekohesivan internal yang dapat dijadikan modal sosial untuk perbaikan ke depan pun tampaknya juga mulai menghadapi masalah, antara lain dengan munculnya semangat individualistis di antara anggota masyarakat. Tabel menunjukkan bahwa hampir dua pertiga responden (53.5 dan 18.2 persen) responden menyatakan bahwa orang-orang sekampungnya senang membantu orang yang sedang mengalami kesusahan; hampir 60 persen menyatakan bahwa masyarakat memiliki hubungan baik bahkan lebih dari dua pertiganya menyatakan adanya hubungan harmonis antar warga; hampir setengahnya mengatakan bahwa orang di daerahnya memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya. Ketika ditanyakan apakah mereka curiga pada para pendatang karena pengalaman buruk dengan diperalat orang lain? Hanya sepertiganya atau sebagian dari mereka menyatakan benar. Umumnya warga Nunukan senang menerima pendatang luar. Adanya sikap saling percaya juga dapat dilihat pada sikap masyarakat terhadap tokohnya. Bagi mereka, misalnya, ketua RT, dipercaya dapat mendamaikan pertengkaran antar warganya. Oleh karena itulah, umumnya masyarakat di sini menganggap bahwa kehidupan di daerahnya relatif damai dan aman.

Tabel 4.3: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Kepercayaan, Resiprositas dan Hubungan Sosial (dalam persentase)

No	Indikator	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Warga kampung ini umumnya senang membantu orang yang sdng kesusahan	0	4	24.2	53.5	18.2	100
2	Orang di daerah ini memiliki hubungan baik dengan sesama	1	7	30	45	17	100
3	Orang di daerah ini umumnya jujur dan dapat dipercaya	5.1	10.1	39.4	35.4	10.1	100
4	Warga di daerah ini curiga pada pendatang karena pernah diperalat	7.1	18.2	41.4	22.2	11.1	100
5	Senang menerima pendatang dari luar	8	7	21	48	16	100
6	Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	5	5	22	56	12	100
7	Hubungan antar sesama di daerah ini harmonis	1	2	10	67	20	100
8	Kehidupan di daerah ini lebih tentram dan damai	3	5	15	57	20	100
9	Ketua RT dipercaya untuk mendamaikan pertengkaran	6.2	0	19.8	50	24	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

Sementara itu, sejauhmana partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas sosial dan politik? Pada umumnya masyarakat Nunukan relatif aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik tersebut, namun masyarakat tampaknya tidak secara merata mendukung semua aktifitas, di antara sekian kegiatan tersebut ada yang dinilai mayoritas responden sebagai kegiatan yang nilai partisipasinya rendah, di samping kegiatan lain yang nilai partisipasinya tinggi. Sumbangan finansial dan kampanye pemilu dapat dikatakan yang dinilai partisipasinya tinggi. Yang cukup mengejutkan adalah partisipasi masyarakat dalam hal melapor kepada polisi tampak tinggi. Sekitar 60 per sen responden menilai demikian. Sedangkan berorganisasi, kerja-bakti, demonstrasi dan kegiatan mendiskusikan

permasalahan daerah merupakan kegiatan yang dinilai mayoritas responden, sebagai kegiatan yang partisipasinya rendah.

Tabel 4.4: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Partisipasi Sosial (dalam persentase)

No	Indikator	TP	PSR	PR	PT	PST	Total
1	Berorganisasi	6.1	18.2	36.4	37.4	2	100
2	Kerja-bakti/gotong royong	7.1	17.2	33.3	23.2	19.2	100
3	Kampanye pemilu	3.1	10.3	25.8	48	12.4	100
4	Demonstrasi	26	21	23	25	5	100
5	Diskusi permasalahan daerah	22	18	28	26	6	100
6	Sumbangan uang	3	12	33	38	14	100
7	Melapor polisi	6	13	20	41	20	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: TP = Tidak Partisipasi, PSR= Partisipasi Sangat Rendah, PR= Partisipasi Rendah, PT= Partisipasi Tinggi, PTS= Partisipasi Tinggi Sekali

4.2.5. Pemerintahan

Setelah reformasi, perencanaan pembangunan dirancang melalui perpaduan *bottom up* dan *top down* sekaligus yang secara formal diselenggarakan melalui musrembang yang dimulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai kabupaten. Dengan cara ini, diharapkan bahwa proses pembangunan, secara maksimal dapat menyerap aspirasi warga. Namun sejauhmana akomodasi itu berjalan? Memang diakui bahwa tidak semua aspirasi itu terserap. Banyak program yang dijalankan adalah program yang telah terlebih dahulu dirancang oleh elit daerah baik itu kalangan anggota dewan atau pihak eksekutif. Tidak terserapnya seluruh usulan warga juga karena keterbatasan dana baik yang disediakan APBN maupun APBD. Kondisi inilah yang membuat warga terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu melihat bahwa masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kubu yang lain dengan persentase dukungan

yang hampir sama tidak setuju dengan hal tersebut. Dalam pandangan masyarakat, pemerintah daerah, terlebih lagi pemerintah pusat perlu memiliki perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, memang banyak hal yang terkait dengan pemerintah pusat. Masalah perjanjian ekonomi dengan negara tetangga, masalah kepabeanaan, masalah imigrasi adalah contoh-contoh yang ditentukan oleh kebijakan pusat. Keterbatasan dana pemda setempat juga mengharuskan pemerintah pusat harus turut serta mengatasi permasalahan keterbatasan sumber finansial untuk pembangunan di daerah perbatasan ini. Tentu saja yang diharapkan warga tidak hanya sekedar perhatian. Tapi komitmen dan realisasi pelayanan yang lebih baik yang bagi sebagian masyarakat masih belum mengalami perbaikan. Bahkan mayoritas menganggap kemudahan untuk berurusan dengan aparaturnya belum mereka alami. Akibat dari belum optimalnya kinerja aparaturnya, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika mayoritas mutlak responden menilai bahwa selama Nunukan telah menjadi Kabupaten, rakyat kecil belum mengalami peningkatan kesejahteraan.

Prinsip lain dari good governance adalah *rule of law*, di mana hukum merupakan tempat mendapatkan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Setiap orang harus sama di depan hukum (*equality before law*), karenanya, praktek hukum harus didasari oleh kebenaran dan rasa keadilan. Dalam masalah ini, responden yang merasakan bahwa praktek hukum sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran tidak didukung oleh mayoritas. Sebagian menyatakan sudah dan dengan dukungan yang sama juga menyatakan belum. Berarti dalam masalah praktek dan penegakkan hukum sesuai dengan kebenaran dan rasa keadilan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi para penegak hukum di Nunukan. Terlepas dari pelayanan umum dan kinerja aparaturnya yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, warga Nunukan pada umumnya merasakan bahwa situasi lingkungan tempat tinggal dinilai lebih tentram dan aman dari

tindakan kriminal. Situasi ini merupakan kondisi awal yang harus dipelihara dan sebisa mungkin ditingkatkan. Upaya-upaya preventif tentu merupakan langkah yang harus diprioritaskan. Dengan demikian penegakkan hukum dan praktek hukum yang berkeadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga suatu daerah aman dan tentram. Yang perlu digaris-bawahi juga adalah peningkatan kesejahteraan itu harus dirasakan oleh semua kelompok di Nunukan. Adanya kelompok yang jauh lebih maju dan meninggalkan kelompok lain akan melahirkan deprivasi relatif yang rawan untuk keharmonisan sosial.

Tabel 4.5: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Governance (dalam persentase)

No	Indikator	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah	10	14	20	45	11	100
2	Pemerintah pusat memiliki perhatian yang lebih besar pada masalah yang dihadapi masyarakat	9	12	37	28	14	100
3	Pemerintah daerah memiliki perhatian yang lebih besar terhadap masalah yang dihadapi masyarakat	3	7	43	37	10	100
4	Pelayanan aparatur daerah lebih baik	5	9	35	39	12	100
5	Kemudahan dalam berurusan dengan aparatur	8	10	40	35	7	100
6	Praktek hukum telah sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran	5	9	35	39	12	100
7	Rakyat kecil makin sejahtera	19	15	48	16	2	100
8	Korupsi dapat diberantas	10.3	18.6	45.4	22.7	3.1	100
9	Pelayanan umum bisa diperoleh dengan mudah	5.2	15.5	30.9	37.1	11.3	100
10	Lingkungan tempat tinggal lebih tentram dan aman dari kriminal	1	7	20.4	59.2	12.2	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

Salah satu pranata sosial penting yang menjad perekat dan sekaligus pelicin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah adalah kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat dilihat sebagai refleksi dari sejauhmana prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dipraktekkan oleh aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahannya. Di tengah fenomena tergerusnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena perilaku yang belum reponsif dan akuntabel, masyarakat Nunukan dapat dikatakan masih menyimpan kepercayaan tersebut. Seperti telah ditunjukkan terdapat beberapa kelembagaan yang kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, di antaranya adalah DPRD, Pengadilan dan kejaksaan. Sementara itu terdapat lembaga yang relatif besar dipercaya masyarakat yaitu Majelis Ulama, LSM dan TNI. Ketiganya dapat dikatakan mewakili penjaga moralitas, kemandirian dan pertahanan. Nunukan dapat dikatakan cukup beruntung dengan tinggi kepercayaan masyarakat pada tiga institusi penting ini.

Tabel 4.6: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang Menyangkut Percaya (*Trust*) (dalam persentase)

No	Indikator	STP	TP	KP	P	SP	Total
1	Kepercayaan kepada Pemerintah Pusat	2	16	30.3	38.4	13.1	100
2	Kepercayaan kepada Pemerintah daerah	4	10.1	32.3	41.4	12.1	100
3	Kepercayaan kepada Pemerintah DPRD	15.6	15.6	19.8	39.6	9.4	100
4	Kepercayaan kepada Pemerintah Polisi	7.1	12.1	21.2	44.4	15.2	100
5	Kepercayaan kepada Pemerintah TNI	2	8.2	10.2	65.3	14.3	100
6	Kepercayaan kepada Pengadilan Negeri	8.1	8.1	43.4	31.3	9.1	100
7	Kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri	7.1	10.1	42.4	32.3	8.1	100
8	Kepercayaan kepada LSM	6.2	7.3	32.3	47.9	6.2	100
9	Kepercayaan kepada Majelis Ulama	3.1	6.2	6.2	56.7	27.8	100
10	Kepercayaan kepada Imigrasi	11.2	12.2	43.9	22.4	10.2	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

STP= Sangat tidak percaya, TP=tidak percaya, KP=kurang percaya, P=percaya, SP=sangat percaya.

** nilainya berturut-turut menunjukkan jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perbedaan, lebih baik, dan jauh lebih baik*

4.2.6. Konflik Sosial

Salah-satu cara penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah usaha preventif pencegahan konflik sosial. Konflik sosial apalagi kalau sudah dalam bentuk konflik berkekerasan secara terbuka tidak hanya akan menghambat upaya-upaya pembangunan tetapi juga sekaligus akan menghancurkan apa-apa yang sudah dibangun selama ini. Di sinilah makna penting dari pencegahan konflik sosial untuk peningkatan standar kehidupan. Pencegahan ini menjadi sangat penting terlebih-lebih dalam konteks masyarakat perbatasan Nunukan yang secara etnik sangat beragam dan di sana sini masih terjadi ketimpangan pembangunan. Bagaimana persepsi masyarakat tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan konflik sosial di Nunukan? Ditunjukkan bahwa mayoritas mutlak responden melihat bahwa konflik sosial tidak sering terjadi. Walaupun di antara mereka yang berpendapat sering terjadi (19.2 dan 3.2 persen), konflik itu selalu dapat didamaikan. Ketika ditanyakan lebih lanjut, faktor apa yang menyebabkan konflik? Mereka, mayoritas mutlak, mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan akibat dari kesenjangan ekonomi. Ketika ditanyakan lebih lanjut, suku apa yang menempati posisi paling tinggi dalam paramida kelompok masyarakat yang dinilai paling berhasil? Mayoritas menganggap bahwa suku Bugis adalah kelompok suku yang paling berhasil dalam bidang ekonomi. Persepsi ini dapat menjadi informasi penting perlunya afirmative action untuk peningkatan ekonomi kelompok etnis lain terutama yang dinilai paling terbelakang. Memang menurut beberapa informan kunci, kesenjangan ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan terjadinya konflik sosial. Oleh karena penanganan masalah ini menjadi sangat penting untuk segera diperhatikan dan dilakukan penanganannya. Selain faktor ekonomi, faktor politik merupakan hal disebut sebagai urutan kedua yang disebut-sebut responden sebagai penyebab konflik. Kondisi ini terutama sangat rawan dalam masa-masa peristiwa sosial politik penting seperti pilkada. Berhasil diredamnya konflik sosial sebagai akibat pilkada merupakan bukti masih

ada kearifan dari tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi peristiwa politik khususnya kekalahan yang sebetulnya terjadi karena masih adanya politik uang (*money politic*) Sementara itu, konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnik apalagi perbedaan agama merupakan hal yang tidak menentukan.

Sementara itu, mengaca pada beberapa kejadian yang telah terjadi, masyarakat menilai bahwa tokoh adat merupakan pihak yang paling berperan dalam mendamaikan konflik. Setelah itu peran untuk pemecahan masalah ini berada di tangan aparat. Faktor agama yang dinilai sebagai hal yang sama sekali tidak menentukan dalam konflik, membuat peran tokoh agama menjadi sangat minimal dalam penanganan konflik sosial ini. Tampaknya, masalah konflik sosial ini lebih merupakan faktor yang sangat profan menyangkut masalah-masalah riil ekonomi dan politik. Dalam perspektif inilah, melibatkan tokoh masyarakat menjadi cukup penting dalam usaha-usaha penanganan konflik sosial khususnya dalam usaha pencegahannya.

Tabel 4.7: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah tentang Konflik Sosial (dalam persentase)

No	Indikator	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Di tempat tinggal anda sering terjadi konflik	13.1	29.3	35.4	19.2	3.0	100
2	Konflik selalu dapat didamaikan	3	1	9.1	54.5	32.3	100
3	Terjadi kesenjangan ekonomi berdasarkan kelompok etnik	14.3	18.4	27.6	29.6	10.2	100
4	Aspek yang paling mempengaruhi konflik sosial	Beda Etnik (16.3)	Beda Agama (2.0)	Ekonomi (30.6)	Politik (33.7)	Lainnya (17.3)	Total (100)
5	Yang berperan dalam mendamaikan konflik	Aparat (31.6)	Tokoh masyarakat (21.4)	Tokoh adat (35.7)	Tokoh Agama (6.1)	Lainnya (5.1)	Total (100)
6	Suku yang paling tinggi tingkat ekonominya	Bugis (97)	Jawa (1)	Lainnya (2)			

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

4.2.7. Tindakan kolektif (*collective behavior*)

Sistem Informasi Deteksi Dini Sosial (*social early warning information system*) dikembangkan dengan melihat sejauhmana perilaku kolektif (*collective behavior*) yang mengarah pada tindakan bersama (*collective action*) yang cenderung bersifat negatif dan destruktif kemungkinan terjadi dalam masyarakat yang diteliti. Perilaku kolektif yang kemudian mengarah pada tindakan bersama (*collective action*), seperti dikonsepsikan Neil Smelser (1962), akan muncul apabila telah terdapat enam situasi, yaitu:

1. Terdapat ketegangan struktur (*structural strain*). Di sini orang merasa tidak puas dengan kondisi kelembagaan pemerintahan yang ada, karena dianggap sudah tidak lagi mampu melaksanakan fungsi pelayanan yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat luas.
2. Kondisi struktur yang kondusif (*structural condusiveness*). Kondisi ini memungkinkan sejumlah besar orang dapat melakukan aksi bersama. Suasana kehidupan yang ultra demokrasi pada satu sisi dan pada sisi lain, lemahnya wibawa penegak hukum dan keamanan sejak era reformasi dan otonomi daerah memberi peluang besar bagi munculnya berbagai bentuk gerakan bersama dari orang-orang yang berasal dari berbagai golongan kepentingan. Apa yang terjadi pada demonstrasi, kericuhan dan kekerasan massal menjelang dan sesudah pilkada di hampir semua tempat menunjukkan adanya kekondusifan struktural.
3. Terbentuknya keyakinan bersama (*generalized belief*). Dalam situasi ini masyarakat umumnya merasa adanya ketidak-adilan yang telah rasakan oleh hampir semua orang sehingga hampir semua orang merasa perlu melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab ketidak-adilan itu.
4. Kehadiran faktor pemicu (*triggering factor*). Dalam situasi ini terdapat suatu peristiwa yang dianggap banyak orang sebagai alasan kuat untuk memulai tindakan atau gerakan bersama.

5. Terbentuknya mobilisasi massa. Tindakan bersama sangat mungkin akan terjadi apabila ada orang-orang yang memiliki kemampuan dan sumberdaya untuk bertindak sebagai penggerak atau penerah massa.
6. Massa yang terkontrol. Dalam hal ini, gerakan sosial akan mencapai sasaran dan tujuannya apabila ada pihak (pemimpin gerakan) yang mengontrol massa agar tindakannya terukur, terarah dan tidak anarkis sehingga tujuan gerakan dapat tercapai.

Keenam prasyarat bagi munculnya tindakan kolektif dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi massa, pemogokan, konflik fisik antar kelompok masyarakat, merupakan indikator dasar dalam penggunaan sistem informasi deteksi dini sosial. Tetapi yang lebih penting dalam pengembangan sistem informasi deteksi dini sosial (*social early warning information system*) secara komprehensif adalah memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya akumulasi dan kristalisasi perilaku sosial yang mengarah pada tindakan kolektif tersebut. Dalam hal ini kondisi kehidupan masyarakat yang dapat diamati dari kondisi ekonomi, sosial dan karakteristik pemerintahan merupakan faktor-faktor utama yang dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan akan munculnya tindakan kolektif dalam masyarakat yang sedang diteliti. Kemudian bagaimana situasi sosial di daerah perbatasan Nunukan ini, apakah keenam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan kolektif ini sudah terbentuk atau belum? Tampaknya memang keenam faktor tersebut tidak secara menonjol dapat dilihat dalam konteks wilayah perbatasan Nunukan. Di sana sini memang terdapat ketegangan struktur (*structural strain*), yang ditandai dengan ketidak-puasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Mayoritas responden menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi setidaknya menganggap kurang baik dan menyulitkan rakyat kecil. Walaupun demikian, mayoritas responden tampaknya masih bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun yang dikhawatirkan adalah kondisi sekarang

yang secara struktural relatif dianggap kondusif (*structural condusiveness*) untuk berbagai tindakan kolektif seperti terjadi di berbagai daerah.

Sejauh yang dapat diamati di lapangan, masih ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah sekarang masih dapat mengatasi permasalahan di Nunukan. Dengan kata lain, keyakinan bersama (*generalized belief*) bahwa pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk mengatasi permasalahan di Nunukan belum terbentuk secara merata. Memang pernah terjadi munculnya faktor pemicu (*triggering factor*) bahkan waktu itu sudah membuat sebagian masyarakat Nunukan dilanda kepanikan akan terjadi konflik sosial, namun dengan kesigapan tokoh adat, tokoh masyarakat dan aparatur, faktor pemicu itu tidak menimbulkan konflik sosial berkekerasan sebagaimana terjadi di Sampit. Berkaca pada fenomena selisih paham antara etnik Dayak dan Bugis pada akhir tahun 2007, mobilisasi massa memang pernah terjadi sampai pada situasi yang sangat mengkhawatirkan semua pihak. Oleh karena itu, pencegahan konflik sosial dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan Nunukan secara berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Seperti ditunjukkan mayoritas juga berpendapat bahwa masyarakat Nunukan biasa berdemonstrasi untuk memperjuangkan ketidak-adilan dan ketidak-benaran. Sementara itu, pada sisi lain masyarakat melihat bahwa penangan korupsi belum berhasil dilakukan sehingga menjadi penghambat untuk peningkatan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan di negeri sendiri belum berhasil dilakukan sehingga membuat mereka terpaksa mengadu nasib di negeri seberang yang tentu saja rentan terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan.

Tabel 4.8: Pendapat Masyarakat Nunukan Mengenai Beberapa Masalah yang Berkorelasi dengan Tindakan Kolektif (dalam persentase)

No	Indikator	STB	TB	KB	B	BS	Total
1	Pelaksanaan kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi sudah baik dan tidak menyulitkan serta meresahkan rakyat kecil	6.1	37.4	23.2	28.3	5.1	100
2	Pemerintah sekarang dapat mengatasi permasalahan di Nunukan	8	32	33	22	5	100
3	Masyarakat tidak biasa untuk berdemostrasi dalam menuntut perbaikan nasib	8.1	13.1	40.4	26.3	12.1	100
4	Korupsi sudah menurun sehingga perbaikan kehidupan masyarakat lebih terjamin	11	16	47	15	11	100
5	Masyarakat masih bersabar menunggu pemerintah meningkatkan taraf hidup	7	19	10	51	13	100
6	Masyarakat di kabupaten ini telah mendapat kesejahteraan di negeri sendiri, sehingga pindah menjadi warganegara lain (Malaysia) merupakan pilihan yang tidak diperlukan	15	15	34	25	11	100

Sumber: Survey PSDR-LIPI, 2008.

Keterangan: STB = sangat tidak benar, TB= tidak benar, KB= kurang benar, B= benar, BS= benar sekali

Kota Nunukan sebagai kota paling Barat di Kalimantan Timur-Indonesia dan terletak di pulau yang relatif kecil ini telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Pasang surut kehidupan sosial ekonomi di daerah ini terkait dengan status Nunukan sebagai daerah perbatasan, yang kemudian berimplikasi pada situasi deprivasi sosial sebagian masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan di sini, khususnya masyarakat yang terkait erat dengan status demikian seperti buruh dan nelayan, di tengah mayoritas penduduk Nunukan yang berstatus pedagang.

Sebagai penduduk yang religius dan relatif patuh pada ajaran Islam yang dianut penduduk mayoritas di sini, masyarakat Nunukan tampaknya dapat mengikuti perubahan sosial akibat dinamika modernisasi. Gejala

disfungsionalisasi nilai, dengan demikian dapat dikatakan merupakan gejala yang dinilai tidak terjadi. Kontribusi adanya gejala disfungsionalisasi pranata lebih merupakan karena faktor pelaksanaan aturan yang belum konsisten dan penegakan hukum yang belum dirasakan adil. Saling percaya dan solidaritas internal kelompok juga relatif kuat betapapun masih menjadi masalah dalam dimensi antar kelompok (solidaritas eksternal). Dalam segi inilah peran pemerintah menjadi krusial. Kinerja pemerintah yang lebih sesuai dengan pengelolaan tata pemerintah yang baik (*good governance*), tampaknya menjadi kata kunci untuk peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, kekohesivan sosial, kerjasama kolektif antar kelompok dan penciptaan situasi yang resisten pada perilaku kolektif yang destruktif.

4.3. Simpulan

Kesimpulan penting yang dapat diambil dari khususnya studi kuantitatif yang melihat kondisi ekonomi, modal sosial, *governance*, konflik sosial dan kecenderungan untuk tindakan kolektif, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, disfungsi pranata sosial merupakan masalah yang relatif kecil yang dialami masyarakat Nunukan. Masyarakat di sini pada umumnya dapat mengikuti perkembangan dengan tetapi menjadikan pranata sosial mereka sebagai basis atau orientasi perilaku keseharian. Mereka masih dapat memaknai hidup sehingga relasi sosial masih tetapi dapat terpelihara dan harmonis. Kedua, masalah *distrust* (ketidakpercayaan kepada Pemerintah Pusat beserta institusi yang merepresentasikannya di daerah) merupakan faktor yang memberikan indikasi negatif bagi stabilitas sosial. Sedangkan faktor yang memberikan indikasi positif untuk stabilitas sosial adalah (pencegahan) deprivasi relatif yang mengakibatkan masyarakat Nunukan merasa kurang dilibatkan baik secara kultural maupun sosial dalam proses pembangunan, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi, pelayanan pendidikan dan

kesehatannya. Masalah *distrust* kepada Pemerintah Pusat ini bahkan dapat bersifat sentral bagi hadir atau tidaknya krisis sosial di Nunukan. Ungkapan ini mempunyai beberapa alasan. Di satu pihak, di tengah kehidupan ekonomi dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah yang relatif sudah membaik dibanding dua tahun lalu, pemerintah masih mendapat kesempatan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya. Namun pada pihak lain, potensi anarki sosial merupakan hal yang bersifat laten di Nunukan, karena variabel modal sosial yang kuat pada kohesi internal dibarengi dengan belum terealisasinya situasi pembangunan yang merata, di samping variabel tindakan kolektif yang kuat yang di dalam sub-variabelnya terlihat potensi anarki. Ketiga, mengandalkan pendekatan kesejahteraan *vis a vis* keamanan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang telah sangat kuat diterapkan menjadi kebijakan Pemerintah Pusat tetapi dengan program bantuan yang jumlahnya belum begitu besar tampaknya tidak cukup untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan Nunukan. Pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan di atas tampaknya harus dibarengi dengan upaya yang jauh lebih kuat dan adil untuk membangun kepercayaan, melalui penghormatan oleh terutama Pemerintah Pusat atas pentingnya soliditas masyarakat perbatasan di samping penegakan hukum, terutama terhadap aparatnya sendiri dan pengembalian hak-hak warga negara dan hak daerah. Pemerintah pusat juga diharapkan masiih dapat membantu Pemerintah Daerah untuk merevitalisasi lembaga-lembaga sosial budaya lokal untuk membangun nilai-nilai kenunukan yang dianut bersama (*'Nunukeness'*). Implementasi *Good governance* pada level pemerintah daerah khususnya, tampaknya memang menjadi lebih mendesak diterapkan guna mengakselerasi pembangunan wilayah dan masyarakat perbatasan penting ini.

Dalam rangka mempercepat pengembangan daerah/wilayah tertinggal terlebih-lebih lagi daerah tertinggal di wilayahperbatasan

seperti kasus Nunukan ini, tampaknya perlu dipikirkan penguatan kewenangan otonomi khusus di wilayah tersebut. Selama ini, sebagaimana UU otonomi daerah mengisyaratkan, belum ada perbedaan pengaturan antara wilayah bukan perbatasan dengan wilayah perbatasan seperti Nunukan. Perbedaan ini diperlukan karena karakteristik wilayah dan permasalahan yang dihadapi berbeda. Kewenangan lebih besar khususnya di bidang perdagangan dan sosial budaya tampaknya akan mempercepat proses pembangunan yang sekarang ini tampak masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan negeri jiran (Malaysia). Aturan pusat dianggap membatasi langkah dan gerak pengembangan masyarakat dan wilayah. Banyak barang yang tidak dapat masuk ke Nunukan padahal sangat dibutuhkan terutama untuk pengembangan produktivitas berbasis potensi lokal. Tentu saja yang diperlukan bukan saja ketersediaan payung hukum untuk kewenangan tersebut tetapi ketersediaan infrastruktur yang dapat memfasilitasi beroperasinya peran tersebut. Pusat tidak perlu khawatir dengan kewenangan yang diperluas. Secara empiris, daerah akan mengalami peningkatan loyalitas seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya akan terjadi ketegangan antara pusat dan daerah, khususnya daerah perbatasan jika upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat justru mengalami hambatan struktural.

Daftar Pustaka

- Atteslander, Peter. 1995. *Anomie Social Destablization and the Development of Early Warning Systems*. International Journal of Sociology and Social Policy. Volume 15 No. 8/9/10 1995.
- Bruner, E.M. 1974. "The Expression for Ethnicity in Indonesia", dalam A. Cohen (ed.) *Urban Ethnicity*. London: Tavistock. Hal. 251-288.
- Coleman, James, 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, Vol. 94 (supplement), pp. S95-S120.
- Coleman, James, 1993. "The Rational Construction of Society." *American Sociological Review*, Vol 58 (February), pp. 1-15.
- Chen, Xiangming. 2000. 'Both Glue and Lubricant: Transnational Ethnic Social Capital as a Source of Asia Pacific Subregionalism'. *Policy Sciences* 33;269-287.
- Edwards, Bod dan Michael Foley, 1997. "Social Capital and the Political Economy of Our Discontent," *American Behavioral Scientist*, Vol 40, No. 5.
- Edwards, Bob dan Michael Foley, 1998. "Social Capital and Civil Society Beyond Putnam," *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).
- Featherstone, Richard dan Mathieu Deflem. 2003. *Anomie and Strain: Contexts and Consequences of Merton's Two Theories*. *Sociology Inquiry*, Vol.73, No.4, November 2003. Hal 471-489.
- Feldman, Tine Rossing dan Susan Assaf, 1999. *Social Capital: Conceptual Frameworks and Empirical Evidence* (Working Paper No. 5, Social Capital Initiative, The World Bank).

- Fennema, M. and Tillie, J. 1999. 'Political participation and political trust in Amsterdam: civic communities and ethnic networks'. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 25, 4: 703-726.
- Foley, Michael dan Bob Edwards, 1998. "Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective", *American Behavioral Scientist*, Vol. 42, No. 2 (September).
- Fenemo, M dan Tillie, J. 1999. "Political Participation and Political Trust in Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 25 (4), 703-726.
- Fukuyama, Francis, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Hall, S. 1988. 'New ethnicities'. in *Race, Culture and Difference*. J.Donald and A.Rattansi (eds). London: Sage: 252-9.
- Jacobson, D. 1997. *Rights Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Kesteloot, C. 2000. 'Segregation and the economic integration of immigrants in Brussels'. in *Minorities in European Cities: The Dynamics of Social Integration and Social Exclusion at the Neighbourhood Level*. S.Body-Gendrot and M.Martiniello (eds). London: Macmillan.
- Kloosterman, R., van der Leun, J. and Rath, J. 1998. 'Across the border: immigrants' economic opportunities, social capital and informal business activities'. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 24, 2:249-268.
- Grootaert, Chistiaan, 1998. "Social Capital: The Missing Link?" (Working Paper No. 3, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Isham, Jonathan dan Satu Kähkönen, 1999. *What Determines the Effectiveness Of Community-Based Water Projects? Evidence from Central Java, Indonesia* (Working Paper No. 14, Social Capital Initiative, The World Bank).

- Khrisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader, 1999. "Social Capital Assessment Tool" (Makalah pada Conference on Social Capital and Poverty Reduction, The World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni).
- Khrisna, Anirudh, dan Norman Uphoff, 1999. *Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*, (Working Paper No. 13, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Kymlica. W. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlica, W dan Norman, W. eds. 2000. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- Levi, M. 1998. "A Sate of Trust". In V. Braithwarte and M. Levi, eds. *Trust and Governance*. New York: Russel Sage Publication.
- Minkoff, Debra, 1997. "Producing Social Capital: National Social Movement and Civil Society," *American Behavioral Scientist*, Vol. 40, No. 5, pp.606-619.
- Nottingham Social Action Research Project (tanpa tahun), "Workshop to Establish Methods and Indicators for Evaluation of Social Capital".
- Pantoja, Enrique, 1999. *Exploring the Concept of Social Capital and Its Relevance for Community Based Development*, (Working Paper No. 18, Social Capital Initiative, The World Bank).
- Portes, Alejandro, 1998. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology," *Annual Review of Sociology*, Vol. 24, pp. 1-24.
- Portes, Alejandro, dan Patricia Landolt, 1996. "The Downside of Social Capital," *The American Prospect*, Vol. 26, pp. 18-21.

- Putnam, Robert, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, Robert, 1993. "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", *The American Prospect*, Vol. 13, pp. 35-42.
- Robison, Lindon J., dan Marcelo Siles, 2000. *Social Capital: Sympathy, Socio-Emotional Goods, and Institutions* (Staff Paper No. 00-45, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, December).
- Rothstein, B. 1998. "Trust, Social Dilemmas and the Strategic Construction of Collective Memories". Russel Sae Foundation, *Working Paper*, 142.
- Smelser, N.J, 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York : The Free Press.
- Syahra, Rusydi. 2006. *Sistem Peringatan Dini Sosial*. Jakarta. PMB-LIPI
- Tonnies, Ferdinand. 1974. *Community and Association (trans)*. London: Routledge & Kegan Paul.
- _____. 1974. "A Preclude to Sociology" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.
- _____. 1974. "The Concept of Gemeinschaft" dalam W.J. Cahman dan R. Herberle, eds. *On Sociology: Pure, Applied and Empirical*. Chicago: University of Chicago.
- Uphoff, Norman, 2000. "Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation" (Makalah pada Staff Seminar, Mansholt Institute, Wageningen, 13 September).
- Woolcock, Michael. 1998. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", *Theory and Society*, Vol. 27, No. 2, pp. 151-208.
- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan, 2000. "Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy", *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, No. 2 , pp. 225-249.

5

NUNUKAN: DI TENGAH-TENGAH KAWASAN '*THE GOLDEN TRIANGLE*' ANTARA SURABAYA, MAKASSAR DAN TAWAU

I Ketut Ardhana

5.1. Pendahuluan

Nunukan sebagai salah satu wilayah Indonesia laut di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia di wilayah. Peran yang dimainkan masyarakat Nunukan di wilayah ini cukup signifikan dalam perkembangan kawasan regional antara Indonesia, Malaysia, Filipina dan negara-negara sekitarnya. Memahami peran penting itu, tidak hanya dilihat dari konteks peran perdagangan dan ekonomi di kawasan itu di masa sekarang, tetapi juga akan dianalisis bagaimana peran wilayah sekitarnya terhadap perkembangan Nunukan dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang berlangsung cepat. Tulisan ini menyoroti benang merah bagaimana kaitan antara berbagai komponen dalam menyongsong perkembangan Nunukan dalam percaturan perdagangan internasional. Dalam bagian ini akan dibahas pertama, peran Nunukan dalam perkembangan awal dari ekonomi tradisional ke ekonomi regional, kedua akan dibahas bagaimana kesiapan berbagai komponen dalam dinamika masyarakat Nunukan menuju keterlibatannya dalam perdagangan internasional, ketiga mengelaborasi kebijakan yang ada pada masyarakat Nunukan untuk diarahkan pada kesiapan masyarakat menuju perdagangan internasional. Dengan membahas aspek tersebut diharapkan akan dipahami bagaimana keterlibatan masyarakat Nunukan yang terdiri dari berbagai lapangan

profesi dapat terlibat secara maksimal dalam pengembangan Nunukan sebagai pusat perdagangan internasional yang memiliki daya saing dalam menghadapi Tawau Sabah Malaysia dalam perkembangan perdagangan dan ekonomi internasional di kawasan itu.

Nunukan memainkan peranan strategis dalam perkembangan perdagangan dan ekonomi internasional di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga antara lain Malaysia dan Filipina yang menghadap Samudra Pasifik. Sudah sejak lama perkembangan situasi perdagangan internasional di kawasan itu mempengaruhi perkembangan perdagangan dan ekonomi Nunukan. Dari fakta-fakta sejarah tentang migrasi penduduk menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara migrasi yang dilakukan penduduk dengan perkembangan ekonomi yang dikembangkan kemudian. Misalnya saja sudah sejak awal fase perkembangan sejarah Nunukan, peran orang asli dalam hal ini orang Tidung menunjukkan peran ekonomi yang dilakukan mestinya masih bertaraf tradisional, sebagaimana dapat dilihat di kampung-kampung yang mereka huni terutama di sepanjang aliran sungai. Basis aliran sungai inilah sebenarnya yang menjadi pusat aktifitas mereka seperti sebagai jalur mengangkut hasil kebun-kebun mereka selain mencari ikan ke laut, tempat berjualan, dan menjalin hubungan sosial budaya di kalangan mereka. Namun umumnya diketahui bahwa orang Tidung yang kebanyakan berkebun namun kadang-kadang kurang maksimal. Mereka bermigrasi dari daratan pulau Kalimantan menuju pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Nunukan, Pulau Sekaca (Malaysia), Pulau Tinabasan (Indonesia) tidak hanya dalam arti wilayah Indonesia modern sekarang, bahkan mereka berhasil mengembangkan komunitas perdagangan di wilayah lainnya seperti di pulau-pulau kecil di perbatasan Filipina, di wilayah Malaysia dan sebagainya.

Proses migrasi yang berlangsung itu telah menjalin hubungan historis yang sangat kental dalam kaitannya relasi sosial terutama didasari atas

pemahaman akan adanya kesamaan etnis antar penduduk yang tinggal di kawasan regional baik, di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Memang di masa lalu hampir tidak muncul masalah terutama berkaitan dengan masalah kewarganegaraan karena belum terbentuknya negara modern, namun setelah terbentuknya negara modern maka persoalannya menjadi lebih krusial. Oleh karena itu dalam konteks modal sosial dan budaya (*social and cultural capital*) sebenarnya tidak bermasalah, namun dalam konteks peningkatan daya saing (*competitiveness*) maka muncul masalah ekonomi yang saling berusaha menjadi penentu dalam perkembangan ekonomi regional dan internasional.

Berbagai masalah ketimpangan ekonomi terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang menyebabkan lemahnya posisi tawar menawar (*bargaining position*) masyarakat yang menghuni wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan pada umumnya. Kondisi ini tentu sebuah keadaan yang berbeda apabila dilihat perkembangan Malaysia dan Indonesia di era sebelum tahun 1970-an. Saat itu, posisi Indonesia lebih baik dan menguntungkan, namun setelah tahun itu, keadaan menjadi terbalik dan ini cukup ironis terhadap perkembangan yang terjadi setelahnya.

Tampaknya ada perbedaan kebijakan dalam mengelola wilayah perbatasan itu sehingga terjadi gap yang cukup besar antara dua masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara yang sebetulnya memiliki etnisitas yang sama. Inilah yang akan dielaborasi lebih lanjut mengenai perbedaan perkembangan perdagangan dan ekonomi internasional di wilayah negara yang bertetangga itu dan mencoba memahami bagaimana dinamika kedepannya ke arah keseimbangan ekonomi dan perdagangan antara kedua wilayah yang berbatasan itu. Hubungan antara Nunukan dan Tawau atau antara Simanggaris sudah dilakukan cukup lama. Memang antara Nunukan, Sebatik dan Tawau banyak dapat dilakukan dengan perdagangan atau pelayaran melalui laut. Kondisi tampak berbeda ketika melihat hubungan antara Malinau dan Sarawak misalnya

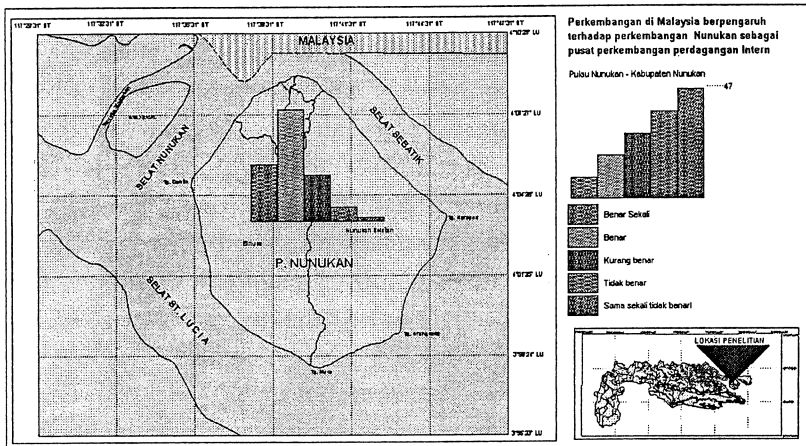
banyaknya jalan tikus (*illegal roads*) kemudian harus ditempuh dengan menumpang kendaraan sepanjang 70 km, baru kemudian dapat dilakukan aktifitas perdagangan di perbatasan itu. Berbeda halnya antara masyarakat Malinau itu di masyarakat yang mendiami Nunukan masyarakat dapat melanjutkan pendidikan untuk anak mereka ke Samarinda, Tarakan Makassar, dan Surabaya. Namun dapat dikatakan bahwa sangat sedikit yang melanjutkan sekolah ke Tawau Malaysia, meskipun diketahui bahwa perkembangan Nunukan sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Tawau terutama dalam perdagangan dan ekonominya.

Untuk tahun ini penelitian dipusatkan di Nunukan Timur dengan pertimbangan adanya pusat kemajuan di bidang perdagangan dan perekonomian pada umumnya, dibandingkan dengan wilayah Kecamatan Nunukan yang lainnya. Hal ini didukung dengan adanya selain pusat aktifitas perdagangan juga dilengkapi dengan fasilitas untuk pusat-pusat kantor pemerintahan, dan usaha bisnis lainnya. Untuk tahun berikutnya penelitian akan dilakukan di Kelurahan Nunukan lainnya sebagai pembanding dalam analisis dalam melihat perkembangan perdagangan internasional di masa depan.

5.2. Posisi Strategis Nunukan di Tengah-tengah Kawasan “*the Golden Triangle*”

Sejarah mencatat bahwa hubungan perdagangan antara berbagai etnis di Indonesia telah berkembang sejak lama. Hubungan yang dijalin itu tidak hanya terbatas di kalangan wilayah dunia kepulauan Indonesia saja, namun telah menyebar ke berbagai wilayah yang menembus batas-batas negara (*cross-border relationship*) yang sebetulnya terjalin sejak lama jauh sebelum kemerdekaan masing-masing negara yang bertetangga itu. Namun, adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai di beberapa bagian negeri Malaysia, tampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk Indonesia untuk bermigrasi ke sana.

Diagram 5.1: Perkembangan di Malaysia berpengaruh terhadap perkembangan Nunukan sebagai pusat perkembangan perdagangan internasional



Meskipun diketahui bahwa hubungan etnisitas di antara telah terjalin sejak lama, karena beberapa kelompok penduduk di Malaysia itu memang awalnya berasal dari etnis yang sama dan telah beberapa abad di sana dan setelah terbentuknya negara modern Malaysia kemudian mereka menjadi Orang Malaysia. Secara teroretis memang banyak pandangan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana migrasi itu berlangsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Diantaranya ada yang dikenal dengan teori kebutuhan dan teori tekanan “*need and stress theory*”. Teori ini menjelaskan bahwa setelah seseorang mendapatkan kebutuhannya untuk dilengkapi dan kebutuhan ini mengambil berbagai bentuk termasuk diantaranya ekonomi, sosial, kebudayaan dan psikologis. Semakin tinggi kesempatan-kesempatan bahwa kebutuhan seorang individu tidak akan dilengkapi, maka semakin tinggi tekanan yang akan dideritanya. Oleh karena itu, apabila tekanan ini terus berkembang melampaui batas toleransi, maka seseorang itu akan memaksa dirinya untuk berpindah ke daerah yang berbeda yang tampaknya menjanjikan mungkin dapat memenuhi kebutuhannya itu. Untuk kasus bermigrasinya Orang Indo-

nesia ke Malaysia, selain memang beberapa kelompok etnik itu memang sejak lama menjalin hubungan etnisitas, namun juga disebabkan dari beberapa daerah pendatang yang memang kondisi alamnya sangat tidak menguntungkan. Misalnya saja adanya daerah yang tandus, musim kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu sebab mengapa mereka bermigrasi ke Malaysia. Tambahan pula, di samping kondisi kemiskinan yang ada itu, tampaknya pula upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja di Indonesia sendiri sangatlah rendah. Namun di pihak yang lainnya di Malaysia sendiri pekerjaan khususnya di bidang pertambangan, perkebunan kelapa sawit, sektor bangunan upahnya menjanjikan dalam arti lumayan lebih baik.

Tabel 5.1 Bekerja di Malaysia lebih baik daripada di Nunukan (Indonesia).

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Benar sekali	29	29.0	30.2	30.2
Benar	33	33.0	34.4	64.6
Kurang benar	22	22.0	22.9	87.5
Tidak benar	5	5.0	5.2	92.7
Samasekali tidak benar	7	7.0	7.3	100.0
Total	96	96.0	100.0	
System	4	4.0		
Total	100	100.0		

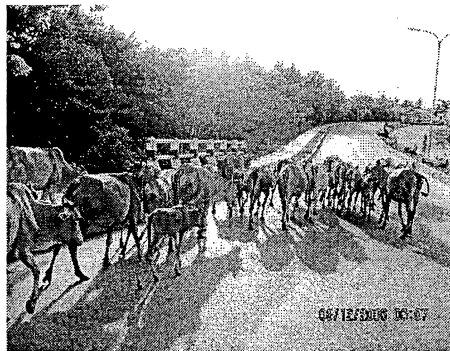
Dengan demikian apabila dibandingkan, memang upah di Malaysia lebih menarik daripada di Indonesia.

Tabel 5.2 Perbedaan upah antara Indonesia dan Malaysia

Tahun	Daerah asal	Rata-rata upah lokal (Indonesia)	Rata-rata upah lokal di Malaysia	Perbedaan persentase
1990	Lombok	Rp. 500 - Rp. 1000/ hari	Rp. 7000 - Rp. 8000/ hari (Perkebunan)	8000
1982	Bawean	Rp. 500/ hari	Rp. 9000/ hari	1800
1991	Semarang	Rp. 2500/hari	Rp. 10,800/ hari (Sarawak)	432
1990	Indonesia	Rp. 1000/ hari	Rp. 10,000/ hari	1000
1984	Jawa Timur	Rp. 3000/ hari	Rp. 9000/ hari	300

Sumber: Hugo (1993)

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa alasan utama orang Indonesia bekerja di Malaysia karena alasan ekonomi. Perlu dicatat bahwa upah yang tinggi dibayarkan di Malaysia hanyalah satu cerita sukses mereka, namun adanya permintaan akan tenaga kerja di Malaysia khususnya pekerjaan manual di bidang pertanian, perkebunan, dan sektor bangunan sebenarnya cukup tinggi. Kondisi ini menjadi tidak baik bagi Orang Malaysia sendiri, bahwa mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tampak tidak mau mengambil pekerjaan di bidang ini. Sebagai akibatnya mereka pergi ke kota-kota besar untuk memperoleh pekerjaan di bidang industri.



Gambar 5.1 Peternakan sapi di Pulau Nunukan

Tabel 5.3 Beberapa alasan mengapa mencari pekerjaan ke Malaysia

Alasan pindah ke Malaysia	NTT		NTB		Kepulauan Bawean	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ekonomi	169	96.0	137	84.0	154	82.3
Keluarga	4	2.3	2	1.2	18	9.6
Undangan oleh pengusaha Tycoon	3	1.7	20	12.3	15	8.1
Drought (Natural Calamities)	-	-	4	2.5	-	-
Jumlah	176	100	163	100	187	100

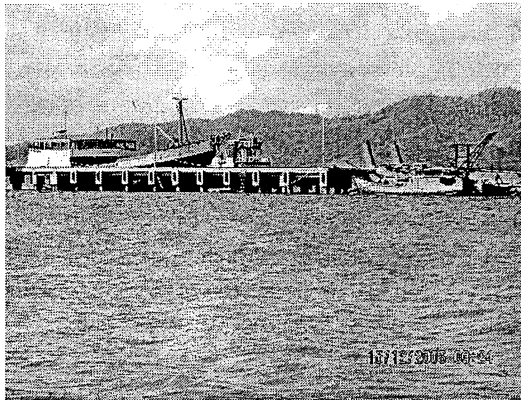
Selanjutnya permintaan tenaga kerja manual di Malaysia bisa diperoleh melalui pekerja asal Indonesia karena banyak tersedianya tenaga kerja yang tidak trampil di Indonesia. Dilihat dari tingkat pendidikan dari pekerja yang dipulangkan dari Indonesia lebih 70% dari mereka hanya memiliki pendidikan dasar (*elementary education*).

Tabel 5.4 Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	NTT		NTB		Kepulauan Bawean	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak taman sekolah dasar	27	15.3	63	38.7	39	20.9
Tamat sekolah dasar	110	62.5	57	35.0	86	46.0
Tamat sekolah menengah	29	16.5	24	14.6	38	20.3
Tamat pendidikan tinggi	10	5.7	19	11.7	24	12.8
Jumlah	176	100	163	100	187	100

Terbentuknya masyarakat baru dalam kaitan ini masyarakat Nunukan yang dahulunya belum dihuni tampaknya banyak diperankan oleh aktifitas perdagangan etnis-etnis yang ada di Indonesia itu. Untuk itu, untuk memahami terbentuknya masyarakat baru tersebut perlu didekati dari aspek migrasi dan historis yang berlaku di kawasan tersebut. Bugis misalnya yang mempunyai reputasi di bidang perdagangan dan ekonomi

telah memberikan kontribusi dalam terbentuknya sistem perekonomian dan perdagangan di kawasan itu khususnya di wilayah perairan laut di hampir sebagian Kalimantan Timur. Sementara etnis Dayak dalam hal ini etnis Tidung tampak memainkan perannya di perekonomian dan perdagangan di wilayah pedalaman melalui sepanjang aliran sungai di pedalaman sebagai tampak di desa Binusan. Etnis Jawa misalnya juga memberikan kontribusi di bidang perdagangan makanan sepanjang pelabuhan sebagaimana dilakukan etnis Bugis. Etnis Timor sebagai pemberi jasa juga berkontribusi di sektor pelayanan jasa. Peran semua etnis ini tampak membentuk masyarakat Nunukan yang dapat dilihat sepanjang sejarah migrasi mereka itu di Pulau Nunukan.



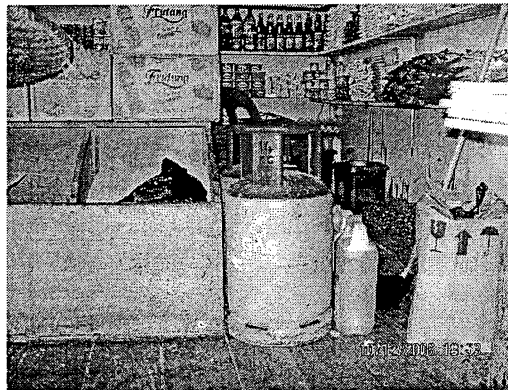
Gambar 5.2 Kapal-kapal Penangkap Ikan di Pulau Nunukan

Sebagaimana dengan daerah hulu yang berbatasan dengan Sarawak-Malaysia, maka daerah hilir di perairan Kalimantan seperti Pulau Nunukan juga berbatasan dengan negeri Sabah-Malaysia yang secara ekonomi sangat tergantung dengan negeri tetangga itu.

Meskipun demikian Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis. Dalam hal ini adanya garis pantai sepanjang 314.592 km, di samping memang wilayah ini kaya akan potensi sumberdaya ikan juga menyimpan kekayaan alam lainnya seperti minyak bumi, gas alam, dan pasir laut yang belum dieksplorasi secara maksimal. Adanya kekayaan alam ini menjadi daya penarik mengapa etnis lainnya juga bermigrasi ke wilayah ini. Misalnya saja bahwa sejak dulu diketahui bahwa orang Tidung sudah bermigrasi ke Nunukan yang berasal dari Sebakung dan Bulungan. Tahun 1949 sudah banyak tampak orang Jawa menghuni wilayah di Nunukan. Sejak dulu sudah ada hubungan dagang antara Nunukan dan Tawau. Terutama di masa konfrontasi dengan Malaysia tampak hubungan itu semakin terlihat. Hubungan dengan Tawau semakin berkembang karena ada hubungan famili yang tinggal di Tawau. Hubungan dengan daerah Indonesia lainnya misalnya sulit seperti dengan Surabaya dan Makassar karena di masa lalu kesulitan dalam masalah transportasi. Namun yang banyak terjadi dengan Pulau Tarakan terutama di masa-masa yang lalu. Saat itu hubungan perdagangan melalui sungai-sungai kecil di Tawau dari Indonesia. Selanjutnya barang-barang itu diangkut melalui sungai itu ke wilayah Malaysia. Sejak tahun 1993 dikatakan telah ada hubungan transportasi antara Nunukan dengan Surabaya dan Makassar secara intensif.

Di Nunukan misalnya ada migrasi Jawa yang melalui Tarakan. Ini dimungkinkan dengan mengadakan kunjungan ke daerah Nunukan beberapa hari lalu dilihat prospek ekonominya. Setelah mempertimbangkan kemungkinan keberhasilannya maka mereka pun memilih Nunukan sebagai basis ekonominya seperti membukan warung makanan tidak hanya di satu tempat bahkan ada yang mengembangkan usahanya di beberapa tempat. Dibandingkan dengan Tarakan misalnya memang Tarakan lebih maju, namun di Nunukan dikatakan perputaran uang lebih cepat. Bahkan kalau mereka berbelanja ke Tawau mereka menggunakan dua mata uang baik Ringgit (RM) maupun mata uang ru-

piah (Rp). Dikatakan selain hampir 50 % barang-barang dari Tawau Malaysia ke Nunukan misalnya bahan makanan dan minuman dan alat-alat elektronik. Sementara dari wilayah Indonesia misalnya dari Sulawesi seperti Pare-Pare dan Surabaya (Jawa Timur) yang mendatangkan beras yang menjadi bahan makanan pokok di Pulau Nunukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan Pulau Nunukan ini sangat ditentukan oleh tiga kota ini (*the Golden Triangle*) yaitu: Tawau, Surabaya dan Pare-Pare. Dapat dibayangkan bagaimana nasib masyarakat Nunukan apabila di saat krisis di bidang pelayaran misalnya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan berlayar maka tidak ada satu pun kapal-kapal dari Surabaya dan Pare-Pare yang datang ke Nunukan. Banyak produksi ikan yang dijual ke Tawau terutama dengan kualitas yang baik. Transaksi ikan biasanya dilakukan secara perorangan. Dari Tawau selain barang-barang makanan dan minuman, juga didatangkan barang berupa baju bekas (barang rombengan) yang transit sehingga diperoleh uang jasa di sampai di Nunukan. Akan tetapi dulu umumnya barang-barang itu masih bersifat illegal. Kondisi ini tentu sangat krusial dan menciptakan suasana ketergantungan ekonomi semakin kuat terhadap negeri tetangga Tawau-Sabah Malaysia, meskipun kesetiaan terhadap negara kesatuan Indonesia masih kuat.



Gambar 5.3 Gas yang berasal dari Malaysia dipasarkan di Pulau Nunukan

Tabel 5.5 Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga tidak akan menurunkan kesetiaan pada negara Indonesia.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Benar sekali	27	27.0	27.3	27.3
Benar	49	49.0	49.5	76.8
Kurang benar	17	17.0	17.2	93.9
Tidak benar	3	3.0	3.0	97.0
Samasekali tidak benar	3	3.0	3.0	100.0
Total	99	99.0	100.0	
System	1	1.0		

Hubungan Pulau Nunukan (Tanjung Sebatu) dengan daratan Kalimantan dapat dilalui dengan menumpang perahu seharga Rp. 25.000. Perahu itu hanya sampai di Tinabasan dan dari sana dapat menyeberang ke Kandangan yang sudah berbatasan dengan Sabah Malaysia. Sementara dengan perahu yang lebih besar biasanya datang dua kali seminggu dengan setiap menumpang membayar Rp. 70.000. Sementara kalau mencarter bisa membayar sampai Rp. 200.000 dan pulang pergi Rp. 400.000. Dari Kandangan berangkat di pagi hari kemudian kembali ke Nunukan dapat menumpang perahu jam 15.00 sore. Yang dapat diamati mengenai jalur perdagangan di sana adalah adanya pedagang kecil yang menjual hasil pertanian dalam skala kecil seperti jagung, ketela, pisang dan sebagainya. Sementara itu sejak setahun yang lalu di wilayah Simanggaris sudah diupayakan untuk menanam tanaman kelapa sawit yang masih taraf pengembangannya (wawancara dengan Salehuddin 10 April 2008).

Tabel 5.6 Alur perdagangan yang Anda ketahui.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tawau-Sebatik-Nunukan	61	61.0	63.5	63.5
	Tarakan-Nunukan-Tawau	8	8.0	8.3	71.9
	Tawau-Nunukan-Tarakan	26	26.0	27.1	99.0
	Nunukan-Sebatik-Tarakan	1	1.0	1.0	100.0
	Total	96	96.0	100.0	
Missing	System	4	4.0		
Total		100	100.0		

Dilihat dari kebutuhan masyarakat Nunukan memang sangat tergantung dengan persediaan barang dari Sabah Malaysia Timur terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak kelapa, gula, gas dan sebagainya. Harga gula di Surabaya Rp. 9000/ kilo, sementara harga gula ini di Malinau sudah Rp. 32.000 dan di Krayan Nunukan mencapai Rp. 40.000/ kilo. Harga gas di Malaysia misalnya telah mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia yang sebenarnya diperuntukkan dalam negeri Malaysia. Ini berarti subsidi yang diberikan pemerintah Malaysia terhadap gas ini sebenarnya dinikmati pula oleh masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah-wilayah perbatasan di sepanjang perbatasan Malaysia seperti Sarawak dan Sabah. Ini terjadi disebabkan tidak adanya distribusi gas dari Indonesia oleh Pertamina (“gas Indon” atau “gas dari Indonesia”) yang didatangkan ke daerah ini. “gas Indon” ini memang berbeda dibandingkan dengan gas Malaysia. Ini disebabkan karena gas Malaysia lebih besar isinya. Selain dibandingkan dengan isi “gas Indon” yang 14 kg dikatakan bahwa itu dapat dipergunakan selama 1 bulan sementara gas Malaysia dapat dipergunakan selama 2 bulan. Persediaan gas misalnya masih menghadapi kendala yang disebabkan oleh tidak adanya distribusi gas dari perusahaan Pertamina yang disampaikan sampai ke wilayah Nunukan. Masyarakat Nunukan mengharapkan dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mestinya

pemerintah memberikan pelayanan sampai ke wilayah ini. Meskipun diakui bahwa barang produk makanan kemasan Indonesia kualitasnya lebih rendah bila dibandingkan dengan barang-barang makanan dan minuman dari Malaysia seperti, cincau, milo, sprite, coklat, soya bean, jagung yang dikalengkan dan sebagainya. Disebutkan dibandingkan dengan Malaysia, milo Indonesia lebih rendah kualitasnya karena kalau kena angin atau dibuka sudah mengeras. Dapat dikatakan bahwa kemasan barang Malaysia lebih baik. Apabila barang-barang illegal dilarang tentu memunculkan masalah baru bagi Nunukan yang dari Tawau dilarang, namun dari Surabaya belum ada yang tersedia atau harganya bertambah mahal (wawancara dengan Ilham).



Gambar 5.4 Produk minuman dan makanan yang sebagian dari Malaysia

Kondisi ini terjadi mengingat penyaluran barang kebutuhan itu yang berasal dari Makassar (Sulawesi) dan Surabaya (Jawa Timur) tidaklah memadai. Kalau pun barang-barang itu didatangkan dari wilayah itu, tampaknya akan menambah biaya transportasi sehingga sampai di Nunukan harga barang-barang itu menjadi tidak terjangkau oleh mereka. Di samping memang akan menjadi sangat tergantung dengan musim atau kondisi cuaca yang di musim hujan akan menghadapi hambatan yang

merugikan bagi masyarakat Nunukan. Di masa lalu memang sudah ada angkutan seperti yang dilakukan kapal-kapal PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia), Tidar, Doben Solo, Kerinci dan sebagainya yang kebanyakan untuk mengangkut penumpang. Sementara untuk angkutan barang kebutuhan pokok dilakukan dengan partai besar dari Surabaya, sementara dari Sulawesi oleh pedagang-pedagang secara sendiri-sendiri. Hubungan dengan pedagang Sulawesi biasanya dilakukan bukan karena urusan perdagangan semata-mata tetapi karena menjalin hubungan famili yang lebih dekat dengan berdagang sambil mengunjungi sanak keluarga mereka di Sulawesi dengan istilah “pulang kampung”. Sementara yang berdagang dari Nunukan ke Tawau di Sabah Malaysia dilakukan oleh pedagang lokal dengan skala kecil (*long boat*), atau dengan kapal partai kecil yang disebut “*dompeng*”, bukan dengan kapal kecil (*speed boat*).

Tabel 5.7 Keterangan Penumpang Yang Datang Tahun 2007

Bulan	Fasilitas Batas				Kapal laut				Penumpang			
	Beringin		Sel Pancang		WNI		WNA		WNI		WNA	
	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk
Jan	892	986	2197	2197	150	148	88	85	10539	21991	514	638
Fen	899	892	1903	1903	164	164	109	95	10257	22684	468	490
Mar	492	235	1267	1607	185	192	88	86	46641	23101	965	842
Apr	662	771	2287	2287	248	249	77	72	14086	25038	528	565
Mei	9228	5930	2310	2310	74	75	180	183	14244	25871	676	485
Jun	5892	9257	2298	2298	173	177	76	76	15293	25139	514	576
Jul	6511	8764	2014	2014	185	185	70	68	15760	23293	505	435
Ags	1082	947	2315	2315	56	53	181	183	10539	21991	514	638
Sep	859	895	1995	1995	415	403	217	261	12794	22740	415	403
Okt	858	930	2290	2290	52	49	170	164	8839	12932	329	607
Nov	1365	1464	2212	2212	1431	56	177	184	18431	26676	1334	745
Des	791	797	2481	2481	184	188	43	43	16496	26004	1290	1436
Jlh	29531	31868	25569	25909	3317	1939	1476	1500	183919	277500	8052	7860

Sumber: Kasubdin Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

Memang sejak dulu terutama setelah berakhirnya masa konfrontasi melawan Malaysia pada tahun 1967 telah disepakati bahwa pengangkutan barang diperkenankan tidak melebihi dari RM (Ringgit Malaysia) 600.

Kebijakan pemerintah saat itu memberikan kebebasan dalam rangka impor sebesar RM 600. Ini artinya bahwa di bawah dari RM 600 bebas bayar, namun nilai barang yang melebihi nilai RM 600 itu haruslah dibayar oleh pedagang. Dikatakan hingga kini (setidak-tidaknya tahun 2007), peraturan itu masih berlaku akan tetapi kemudian direncanakan akan diadakan perubahan melalui tindakan di lapangan. Akan tetapi, kalau peraturan itu diimplementasikan akan menyilitkan bagi masyarakat Nunukan sendiri. Ini disebabkan karena kebutuhan sembilan pokok kebanyakan didatangkan dari Malaysia. Menurut rencana atau Peraturan Menteri Keuangan RI setidaknya hingga April 2008 akan dinaikkan menjadi US\$ 1500, namun peraturan itu belum dilaksanakan, bila perlu sampai US \$ 2000. Kalau dilihat kurs sekarang sekitar Rp. 1700. Ini artinya $1500 \times 9 = \text{Rp. } 13.500.000$. Jadi pajak yang dibayar cukup lumayan. Kalau ini disesuaikan dan diatur dengan peraturan lintas batas yang tinggal di perbatasan yang memakai PLB (Pos Lintas Batas) dimonitor dengan menggunakan buku pengawasan Lintas Batas. Kalau lebih RM 600 maka ada dokumenn tersendiri dan harus membayar kelebihan itu. Kalau lebih dari RM 600 dinilai dari nilai pabean, maka itu yang harus dibayar. Ini yang sudah berjalan, namun diterapkan secara 100% masih sulit, untuk itu perlu lebih disosialisasikan lebih jauh. Kalau di kepulauan diatur dengan peredaran barang lintas batas RM 600 perorangan dalam sebulan. Kalau melintasi laut RM 600 per satu trip contoh Sebatik adalah darat. Data-data tentang perdagangan dan jumlah sembilan bahan pokok seperti gula, tepung, gas elpiji masih sangat tergantung dengan Malaysia, kecuali beras. Dengan demikian apabila ini dibatasi oleh pemerintah maka masyarakat Nunukan akan mengalami kesulitan.

Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah apabila dikenakan bea masuk melebihi dari peraturan itu (RM 600) tentu masyarakat yang akan kesulitan membayarnya. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan di masyarakat Nunukan. Misalnya saja pernah terjadi didrop dengan pemulangan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) illegal yang dipulangkan dari

Malaysia ke Nunukan sebanyak 1500 orang TKI. Berikut data pemulangan TKI tahun 2007 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pemulangan TKI Tahun 2007

Bulan	Laki	Perempuan	Jumlah
Januari	896	332	1228
Februari	597	275	872
Maret	1099	469	1568
April	466	235	701
Mei	530	173	703
Juni	249	132	381
Juli	1566	894	2460
Agustus	785	462	1250
September	504	185	689
Oktober	398	178	576
November	503	198	701
Desember	705	361	1086
Jumlah	8301	3894	12195

Sumber: Kasubdin Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

Adanya pemulangan TKI ini menyebabkan kesulitan pada pemerintah Nunukan. Perlu dicatat bahwa peraturan yang ditetapkan dulu itu ternyata tidak dapat diimplementasikan secara 100% karena banyaknya keterlibatan aparat pemerintah dalam pemungutan illegal sepanjang perairan antara Malaysia dan Indonesia khususnya di kawasan Pulau Nunukan ini. Selain itu, masih banyaknya keterlibatan kewenangan institusi pemerintah yang saling tumpang tindih dalam mengelola pemungutan itu sehingga tampak tidak sinergis siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan. Di sini dapat dilihat misalnya apabila ada kelebihan muatan barang yang dibawa ternyata para awak kapal atau pedagang masih membayar lebih yang dianggap sebagai “pungutan liar”. Dapat dideskripsikan bahwa apabila pedagang dari Tawau mengangkut barang menuju Nunukan mereka harus menyinggahi beberapa post pembayaran dimana pungutan liar itu dilakukan. Bukannya di pos-pos pemeriksaan di Indonesia, tetapi justru di pos-pos pemeriksaan di

wilayah Indonesia lah yang banyak terjadi pemeriksaan itu. Ini menyebabkan semakin harga kemudian melambung, tetapi juga menyebabkan proses waktu tempuh yang semakin lama, terlebih-lebih cuaca yang tidak bersahabat. Katakanlah misalnya harga barang yang dibawa senilai Rp 50 juta, mereka akan dikenakan pungutan sekitar Rp. 1.700 (??). Situasi ini menyebabkan terjadinya benturan antara aparat pemerintah dan masyarakat pedagang di sekitar jalur perdagangan lintas batas ini. Perlu diketahui pula bahwa barang-barang yang dikeluarkan dari Malaysia itu sifatnya resmi dan tercatat dan bukannya illegal. Jadi ada nota dari para pegawai pabean (*custom*) dari Malaysia. Kondisi perdagangan internasional atau yang disebut dengan perdagangan lintas batas ini perlu mendapat perhatian maksimal dari berbagai kalangan birokrasi pemerintah yang secara lintas sektoral menangani masalah perdagangan dan perekonomian ini. Misalnya perlunya kerjasama yang baik antara Departemen Pekerjaan Umum (PU), Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan sebagainya. Harapan masyarakat memang mereka mengharapkan adanya perdagangan yang resmi dalam pelaksanaannya dan bukannya tidak resmi. Ada semacam keluhan dari masyarakat bahwa ketika di awal-awal perkembangan Nunukan sewaktu masih menjadi kecamatan banyak kemudahan yang diperoleh. Masyarakat yang umumnya memiliki profesi dagang dapat dengan mudah keluar masuk Malaysia. Tidak pernah ada peraturan yang dianggapnya cukup rumit di masa lalu. Namun, setelah perkembangan Nunukan itu hingga menjadi sebuah kabupaten, ternyata banyak muncul peraturan yang dianggapnya menghambat aktifitas perdagangan dan ekonomi mereka.

Tabel 5.9 Lalu Lintas Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Tahun 2008

Bln	LALU LINTAS WNI											
	Paspor		Pas Lintas Batas									
	Tunon Taka		Tunon Taka		Inhutani		S. Pancang		Lumbis		Jlh	
	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk
Jan	15665	7593	8867	4728	705	505	2315	2315	43	12	27595	15153
Feb	14371	8192	7310	6729	1150	1023	3725	3584	-	-	26556	19538
Mar	12644	7676	8405	7250	1140	1277	4947	4449	15	5	27151	20657
Jlh	42680	23461	24582	18707	2995	2805	10987	10348	58	17	81302	55348

Sumber: Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan

Tabel 5.10 Lalu Lintas Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Tahun 2008

Bl	LALU LINTAS WNA																	
	Izin tinggal kunjungan								T. Taka		Inhutani		S. Pancang		Lumbis		Jumlah	
	Bvks		Vksb		vku		Vkw											
	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg
Jan	336	312	-	-	7	-	-	-	144	123	1	-	12	14	6	13	163	150
Feb	236	259	-	-	11	11	13	31	233	246	-	-	11	15	-	-	504	562
Mar	299	324	-	-	7	10	6	33	210	238	-	-	9	6	4	5	535	616
Jlh	871	895	-	-	25	21	19	64	587	607	1	-	32	35	10	18	1202	1328

Sumber: Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan

Memang pernah terjadi ketumpangtindihan dalam penggeledahan terhadap kapal-kapal masyarakat Nunukan yang mengangkut barang-barang oleh pihak Angkatan Laut Indonesia yang menggiring kapal-kapal itu ke pelabuhan. Tindakan ini terjadi pada tanggal 2 April 2008 yang diprotes oleh pihak imigrasi karena kewenangan itu sebenarnya berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pelabuhan Nunukan dalam pemeriksaan pelabuhan atau pabean dan bukan kewenangan Angkatan Laut. Sementara di pihak Angkatan Laut tampaknya memiliki

kewenangan dalam mengamankan perairan laut di sepanjang Pulau Nunukan itu. Tentu ini menjadi sebuah masalah karena sebelumnya sudah diperiksa di perairan lautan lalu kemudian baru digiring ke Bea dan Cukai. Imigrasi di pelabuhan memiliki kewenangan dalam menangani masalah pabean (*custom*), kewarganegaraan (*imigration*), dan masalah keamanan di pelabuhan atau pabean (*security*). Di samping itu, seringkali tampak kurang jelas koordinasi yang dilakukan, sehingga di lapangan sering terjadi tumpang tindih dalam kaitannya dengan perdagangan domestik dan internasional. Untuk itu, di pelabuhan internasional akan segera dipasang X-ray dan juga telah dilakukan pemisahan antara penumpang domestik dan internasional di pelabuhan.



Gambar 5.5 Perdagangan lintas Pulau di Pulau Nunukan



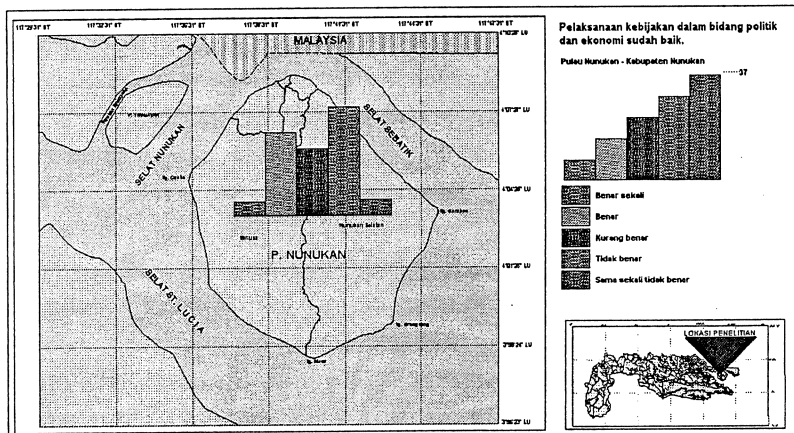
Gambar 5.6 Penjualan produk Malaysia di Pulau Nunukan



Gambar 5.7 Media mengcover perkembangan di Nunukan

Perdagangan skala makro perlu mengupayakan kebijakan yang baik dalam kaitannya dengan kebijakan dalam negeri. Meskipun disadari bahwa ke arah itu sudah mulai tampak sebagaimana hasil penelitian menunjukkan.

Diagram 5.2 Pelaksanaan kebijakan dalam bidang politik dan ekonomi sudah lebih baik.



Namun kalau berharap dengan produk dari luar perlu diupayakan bagaimana masyarakat menjangkau harga-harga luar tersebut. Dalam kaitannya perlu adanya izin resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Ini terjadi misalnya karena perdagangan illegal itu telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti mengenai kualitas barang khususnya makanan yang tidak terdeksi yang mengganggu masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan mengapa terjadi penyitaan barang-barang yang dilakukan oleh badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Ini disebabkan hampir semua barang makanan itu didatangkan dari Malaysia yang tidak diketahui dan perlu dilihat kandungan makanan tersebut. Memang barang-barang makanan itu bukanlah hal baru, tetapi telah didatangkan dan dibeli di Malaysia sudah secara turun temurun. Di samping itu memang pedagang-pedagang yang menjual makanan itu, dulunya adalah orang Indonesia yang migrasi dan berusaha di Tawau Malaysia. Memang ada wacana yang berkembang bahwa seolah-olah apabila orang yang mendiami wilayah perbatasan di Nunukan, kalau secara terus menerus mengkonsumsi barang-barang buatan Malaysia, dikhawatirkan akan mendegradasi masalah nasionalisme Indonesia di daerah perbatasan. Namun masalahnya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memecahkan masalah kebutuhan mereka, apabila pemerintah sendiri tidak mampu menjamin kebutuhan mereka itu. Dalam hal ini dapat dimengerti apabila barang-barang itu seperti gula, minyak goreng, Milo didatangkan dari Surabaya, Makassar, Balikpapan tentu memerlukan tambahan biaya transportasi yang tinggi dan sekaligus menyebabkan mahalnya barang-barang yang didatangkan itu sesampai di Nunukan. Apabila barang-barang itu tidak didatangkan dari Malaysia siapa yang akan menyediakan barang kebutuhan itu sementara masih ada beberapa kendala mendatangkan barang-barang dari Surabaya dan Makassar atau daerah lainnya dibandingkan dengan kemudahan yang diperoleh dari Tawau Malaysia?

Berkaitan dengan masalah ini perlu dijalin kerjasama perdagangan antara Malaysia dan Indonesia sehingga masyarakat Nunukan dapat menikmati hubungan itu. Sebenarnya upaya ke arah itu sudah dilakukan seperti yang dilakukan di Sebatik yang membahas masalah relokasi penduduk di Aji Kuning, masalah pengangkutan barang dan izin trayek dari Malaysia yang mana pada umumnya orang Malaysia membutuhkan juga barang-barang dari Indonesia. Umumnya barang-barang juga diangkut oleh kapal Malaysia dimana banyak juga orang Indonesia berada di atas kapal itu.

Apabila dilihat dari jumlah perusahaan atau usaha yang terdapat di Nunukan (Kabupaten) menurut hasil pendaftaran perusahaan/ usaha Sensus Ekonomi 2006 terdapat sebanyak 8.999 usaha. Hal ini terbagi menjadi 3.332 (37%) perusahaan/ usaha yang dilaksanakan pada lokasi permanen dan 5.667 perusahaan/ usaha yang dilakukan pada usaha lokasi yang tidak permanen. Di Kecamatan Nunukan sendiri terdapat sebanyak 5.192 perusahaan atau sekitar 58% dan di Kecamatan Sebatik hanya terdapat sebanyak 1.447 atau sekitar 16%, sementara yang lainnya tersebar di kecamatan lainnya. Selain itu, penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan mencapai 19.772 tenaga kerja. Dalam hal ini perusahaan yang berusaha di lokasi permanen dapat menyerap sekitar 15.764 (80%) tenaga kerja, sementara perusahaan yang berusaha di lokasi yang tidak permanen menyerap tenaga kerja sebanyak 4.008 orang. Dapat disebutkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor usaha terbesar mampu menyerap tenaga kerja 8.717 atau sekitar 44% . Adapun sektor yang menyerap tenaga kerja paling rendah adalah sektor listrik, gas dan air yang hanya mampu menyediakan sebanyak 165 tenaga kerja.⁸

⁸Dicatat bahwa secara kuantitas terdapat kegiatan usaha terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran terbanyak 5.445 perusahaan (usaha) atau sekitar 60% dan paling terbatas adalah perusahaan pada sector pertambangan dan penggalian yaitu 23 perusahaan (Lihat: "Potret Dunia Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006", dalam *Berita Resmi Statistik* (BPS Kabupaten Nunukan, No. 02/ 04/08/ Th. I, 14 April 2008).

Tabel 5.11 Jumlah perusahaan/ usaha menurut kategori lapangan usaha dan lokasi tempat usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006

Kategori lapangan usaha	Lokasi tempat usaha/ Tidak permanen	Lokasi tempat usaha/ Permanen	jumlah
Pertambangan dan penggalian	0	23	23
Industri pengolahan	10	478	488
Listrik, gas dan air	0	55	55
Konstruksi	0	286	286
Perdagangan besar dan eceran	2.297	3.148	5.445
Akomodasi dan makan minum	493	391	884
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	422	255	677
Perantara keuangan	40	23	63
Real estate dan usaha persewaan	0	283	283
Jasa-jasa	70	725	795
Jumlah	3.332	5.667	8.999

Sumber: "Potret Dunia Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006", dalam *Berita Resmi Statistik* (BPS Kabupaten Nunukan, No. 02/ 04/08/ Th. I, 14 April 2008).

Dari sudut sebaran perusahaan atau usaha Kabupaten Nunukan yang terpusat pada dua wilayah yaitu di Kecamatan Nunukan sebanyak 5.192 usaha atau sekitar 58%, sementara di Kecamatan Sebatik yang hanya terdapat 1.447 usaha, Kecamatan Lumbis 423 usaha dan yang paling rendah adalah di Kecamatan Krayan Selatan yang hanya terdapat 34 usaha.

Tabel 5.12 Perusahaan atau usaha menurut kecamatan dan lapangan usaha Sensus Ekonomi Tahun 2006

	Krayan	Krayan Selatan	Lumbis	Sebakung	Nunukan	Sebuku	Sebatik	Sebatik Barat	jumlah
Pertambangan dan penggalian	1	0	0	16	6	0	0	0	23
Industri Pengolahan	75	5	28	32	184	37	83	44	488
Listrik, gas dan air	13	0	3	1	34	0	4	0	55
Konstruksi	41	2	33	62	118	9	12	9	286
Perdagangan besar dan eceran	221	16	231	156	3184	233	977	427	5.445
Akomodasi dan perikanan	42	1	26	16	636	42	95	26	884
Transportasi pergudangan & Komunikasi	21	1	42	8	360	26	130	89	677
Perantara keuangan	1	0	1	0	53	0	6	2	63
Real estate, usaha persewaan	1	0	27	1	200	3	48	3	283
Jasa-jasa	52	9	57	55	417	73	92	40	795
Jumlah	468	34	448	347	5.192	423	1.447	640	8.999

Sumber: "Potret Dunia Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006", dalam *Berita Resmi Statistik* (BPS Kabupaten Nunukan, No. 02/ 04/08/ Th. I, 14 April 2008).

Dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang dapat terserap oleh semua usaha mencakup 19.772 tenaga kerja, perusahaan yang berusaha di lokasi permanen mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.764 tenaga kerja. Sementara perusahaan yang berusaha di lokasi yang tidak permanen menyerap 4.008 tenaga kerja. Tambahan pula, bahwa usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 8.717 tenaga kerja atau sekitar 44%. Kemudian diikuti sektor jasa-jasa yang menyerap 3.315 tenaga kerja mencapai sekitar 17%, diikuti sektor akomodasi dan makanan dan minuman 1.648 tenaga kerja, sektor pertambangan dan penggalian 1.417 tenaga kerja dan sektor yang paling rendah dalam menyerap tenaga kerja adalah listrik, gas dan air yang mampu menyerap sekitar 165 tenaga kerja.

Tabel 5.13 Jumlah tenaga kerja menurut kecamatan dan lapangan usaha Hasil Sensus Tahun 2006

	Krayan	Krayan Selatan	Lumbis	Sebakung	Nunukan	Sebuku	Sebatik	Sebatik Barat	Jumlah
Pertambangan dan penggalian	5	0	0	1324	88	0	0	0	1.417
Industri Pengolahan	170	10	62	112	580	81	140	81	1.236
Listrik, gas dan air	28	0	7	3	109	0	18	0	165
Konstruksi	145	8	196	187	650	80	72	54	1.392
Perdagangan besar dan eceran	439	34	308	296	4982	531	1406	722	8.717
Akomodasi dan perikanan	89	2	41	21	1168	102	189	36	1.648
Transportasi pergudangan & Komunikasi	33	2	67	10	611	48	220	118	1.109
Perantara keuangan	7	0	2	0	141	0	27	8	185
Real estate, usaha persewaan	2	0	32	2	490	7	52	3	588
Jasa-jasa	282	76	191	250	1727	263	380	146	3.315
Jumlah	1200	132	906	2204	10546	1112	2504	1168	19.772

Sumber: “Potret Dunia Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006”, dalam *Berita Resmi Statistik* (BPS Kabupaten Nunukan, No. 02/ 04/08/ Th. I, 14 April 2008).

Dari tabel di atas dapat disebutkan bahwa di Kabupaten Nunukan mayoritas usaha termasuk usaha mikro. Ini ditunjukkan dengan adanya 7.595 unit usaha yang berada pada skala usaha mikro. Sementara usaha kecil terdapat 1.108 usaha, skala usaha menengah 281 unit usaha dan termasuk usaha skala besar hanya 15 unit usaha. Adanya usaha mikro yang mencapai sekitar 85% dari keseluruhan usaha yang ada di Kabupaten Nunukan ini, maka wilayah ini dipertimbangkan sangat potensial apabila usaha mikro dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nunukan yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan Sabah, Malaysia Timur ini.

Table 5.14. Perencanaan pembangunan di Nunukan telah mempertimbangkan pendapat dan harapan masyarakat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Benar sekali	6	6.0	6.0	6.0
Benar	35	35.0	35.0	41.0
Kurang benar	36	36.0	36.0	77.0
Tidak benar	13	13.0	13.0	90.0
Samasekali tidak benar	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dicatat, bahwa selama tiga tahun terakhir, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebagaimana dilihat dari tabel di bawah ini.

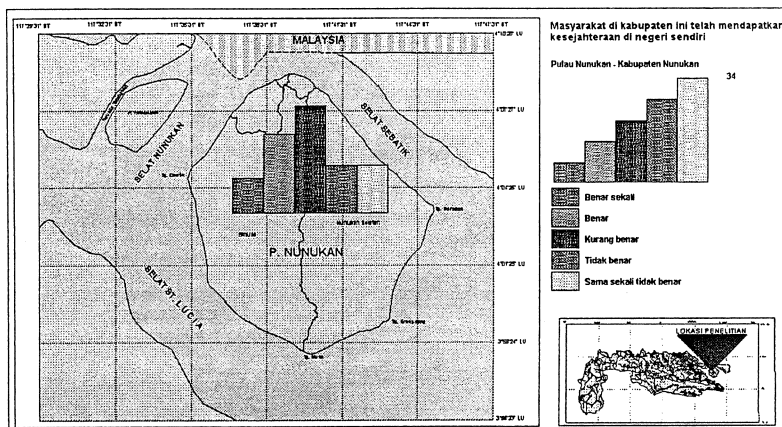
Tabel 5.15 Perkembangan IPM dan Komponen Indikatornya Kabupaten Nunukan Tahun 2004—2006

Komponen Indikator	2004	2005	2006
Angka harapan hidup (tahun)	70,2	70,5	70,6
Angka Melek Huruf (persen)	52,9	93,3	93,3
Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,3	7,4	7,4
Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (Rp.000)	610,2	623,0	625,8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4	71,7	72,0

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya angka IPM yang menaik yaitu pada tahun 2004 angka IPM mencapai 70,4, tahun 2005 mencapai 71,7 dan tahun 2006 mencapai 72,0. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2006 angka IPM Kabupaten Nunukan hanya mencapai peringkat ke-7 dari 13 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur. Tambahan pula, dari kelima kabupaten pemekaran yang ada di Kalimantan Timur, ternyata IPM Kabupaten Nunukan mempunyai peringkat yang tertinggi. Sementara yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Balikpapan. Keberhasilan

pembangunan manusia di wilayah ini tentu dapat menjadi pemicu bagi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Diagram 5.3 Masyarakat di kabupaten ini telah mendapatkan kesejahteraan di negeri ini



Sebagaimana diketahui bahwa potensi pesisir Kabupaten Nunukan masih merupakan hutan mangrove yang subur yang diperoleh dari Interpretasi Data Citra Landsat Tahun 2001 yaitu masih memiliki luasan 101.538 ha. Ini berarti bahwa masih terbukanya luas lahan untuk pengembangan areal budi daya udang, ikan air payau, meskipun diperlukan penanganan yang sebaik-baiknya. Dalam kaitannya dengan potensi Kabupaten Nunukan dapat dikatakan bahwa wilayah ini mempunyai 9 (sembilan) pulau dan 2 (dua) diantaranya termasuk Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makasar. Keduanya ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 sebagai Pulau kecil Terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hendaknya mendapat perhatian lebih banyak baik oleh pemerintah daerah (PEMDA) maupun pemerintahan pusat di Jakarta.

Tabel 5.16 Daftar Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Kabupaten Nunukan-Tawau Tahun 1999-2000 (s.d Desember)

No	Th.	Ekspor	Impor	Trade Balance	Trend %
1.	1999	Rp. 250.233,073,00	Rp.422.601,980,00	Rp. 172.368.907,00	-
2.	2000	Rp.2.088.958.897,00	Rp.270.321.695,00	Rp.1.818.637.202,00	+1055.08
3.	2001	Rp.4.739.554.000,00	Rp.100.615.508,00	Rp.4.638.938.492,00	+52.93
4.	2002	Rp.2.585.510.300,00	Rp.130.031.748,00	Rp.2.455.469.552,00	-158.86
5.	2003	Rp.4.132.837.458,00	Rp.231.992.568,00	Rp.3.900.844.890,00	+72.54
6.	2004	Rp.2.926.706.000,00	Rp. 97.074.323,00	Rp.2.829.631.672,00	-60.73
7.	2005	Rp.1.863.131.362,00	Rp.144.559.323,00	Rp.1.718.572.039,00	-32.95
8.	2006	Rp. 975.189.425,00	Rp.441.045.369,00	Rp.534.144.056,00	-
	Jlh.				

Keterangan:

Ekspor terdiri dari antara lain: ikan segar, udang

Impor terdiri dari antara lain: telur ayam, kilo, wafer apolo, sabun, penutup lantai, kaca jeruk segar, potongan ayam, ayam hidup, dan air mineral

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan

Tabel 5. 17 Rekapitulasi Antar Pulau Kabupaten Nunukan Tahun 2007

No	Komoditi	Volume (kg)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Daerah Asal	Tujuan Pemasaran
1	Kepiting	126.050	52.03	6.559.000.00	Kab. Nunukan dan Tarakan	Tawau, Malaysia Timur
2	Udang segar	168.128	245.00	41.225.300.30	Nunukan	Tarakan
3	Ikan segar	-	-	-	-	-
4	Rumput laut	-	-	-	-	-
5	Betutu	-	-	-	-	-
6	Labi-labi	-	-	-	-	-
7	Udang beku	-	-	-	-	-
8	Ikan campur	1.377.095	69.84	96.173.100.00	Kab. Nunukan dan Tarakan Tawau	Tawau, Malaysia Timur Kab. Nunukan
9.	Ebi / ikan asin	116.825	68.92	8.051.500.00	Kab. Nunukan	Tawau, Malaysia Timur
	Jumlah					

Sumber: Data Pengiriman Hasil Perikanan dikeluarkan tanggal 11 Maret 2008

Produk makanan dan minuman Malaysia banyak yang dapat masuk ke wilayah Nunukan, namun dibandingkan dengan produk itu, tampak produk makanan dan minuman Indonesia masih belum berkembang yang masuk ke sana. Ikan dan produk pertanian dapat diekspor ke Malaysia. Tidak mengherankan pula bahwa daging ikan dan daging lainnya banyak yang diimpor. Akan tetapi, di Nunukan sendiri sebenarnya ada juga tempat pemotongan daging ayam segar yang penyalurnya sendiri adalah “orang tempatan” juga.

Tabel 5.18 Laporan Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Bulan Maret 2007

Kegiatan	Negara Tujuan	Mata Dagang	STN	Volume	Nilai	
Ekspor	Dari Nunukan Indonesia Ke Tawau (Malaysia Timur)	Ikan	KG	4,260	Rp.38.503.769,20	
		Udang	KG	690	Rp.10.733.173,80	
Impor	Dari Tawau (Malaysia Timur) Ke Nunukan (Indonesia)	Minyak Kelapa sawit	KG	637	Rp.3.767.177,00	
		Biskuit atau roti kering	KG	225	Rp.3.522.110,00	
		Minuman susu kedelai	KG	748	Rp.2.028.699,00	
		Penyemprot hama	KG	189	Rp.5.622.002,00	
		Buah-buahan	KG	4.200	Rp.3.631.218,00	
		Spare part of generator	KG	30	Rp. 141.823,00	
		Wafer	KG	114	Rp.1.038.971,00	
		Susu bubuk milo	KG	535	Rp.12.903.257,00	
		Barang Pecah belah	KG	150	Rp.1.118.826,00	
		Cypermethrin (Pembasmi hama)	KG	900	Rp.4.330.508,00	
		Uninterrupted Power Supply (UPS)	KG	18	Rp.1.870.014,00	
					Jumlah	Rp.39.974.605,00
			Jumlah Maret 2007			
			Ekspor			Rp.49.236.943,00
			Impor			Rp.39.974.605,00
			Kondisi Neraca Perdagangan Lintas Batas			Rp.89.211.548,00

Keterangan:

Ekspor dilakukan oleh orang perorangan dengan menggunakan buku Perahu oleh nelayan
Impor dilakukan tanpa menggunakan PIB

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan

Tabel 5.19 Laporan Perkembangan Perdagangan Lintas Batas Bulan April 2007

Kegiatan	Negara Tujuan	Mata Dagang	STN	Volume	Nilai
Ekspor	Dari Nunukan Indonesia Ke Tawau (Malaysia Timur)	Ikan	KG	4.430	Rp.40.648.468,30
		Udang	KG	730	Rp.11.459.984,00
				Jumlah	Rp.52.108.453,00
Impor	Dari Tawau (Malaysia Timur) Ke Nunukan Indonesia	Wafer	KG	1,568	Rp.31.164.901,00
		Biskuit atau roti kering	KG	7,060	Rp.129.309.360,00
		Lemari es	KG	90	Rp.3.036.000,00
		Penyemprot hama	KG	748	Rp.41.688.725,00
		Buah-buahan	KG	172	Rp.2.238.720,00
		Barang dari plastik	KG	80	Rp.3.150.000,00
		Minyak kelapa sawit	KG	5,814	Rp.33.171.950,00
		Air conditioner	KG	25	Rp.2.508.000,00
		Tikar plastic		125	Rp.2.904.000,00
		Kotak plastic		240	Rp.3.107.280,00
		Tabung gas		2,745	Rp.7.274.250,00
				Jumlah	Rp.259.553.186,00
	Jumlah Maret 2007				-
	Ekspor				Rp.52.108.453,20
	Impor				Rp.259.553.186,00
	Kondisi neraca perdagangan lintas batas				Rp.311.661.639,20

Keterangan:

Ekspor dilakukan oleh orang perorang menggunakan buku perahu

Impor dilakukan tanpa menggunakan PIB

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kabupaten Nunukan

Data-data dikeluarkan oleh Kepala Dinas Drs. Hasnan Sofyan di Nunukan pada tanggal 7 Juni 2007.

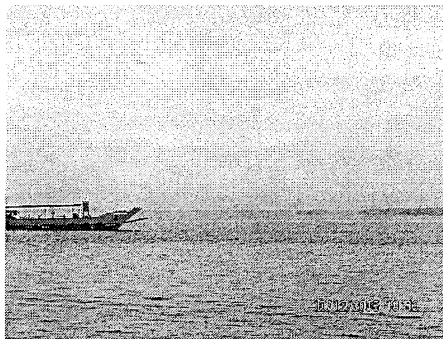
Sebetulnya perlu perhatian yang lebih cepat dari pemerintah pusat di Indonesia karena masyarakat Nunukan menganggap mereka siap bersaing dalam konteks perdagangan internasional di Nunukan. Dalam kaitan ini

ada yang menginginkan agar Nunukan dijadikan “daerah terbatas” sehingga masyarakat Nunukan dapat menyetarakan kehidupan mereka melalui peran yang lebih besar pada pelabuhan Nunukan sebagai pelabuhan bebas “*free port*”. Umumnya mereka menganggap bahwa lebih baik mengembangkan Pulau Nunukan karena adanya gelombang samudra yang dianggap tidak kondusif dalam pelayaran yang mengangkut barang-barang perdagangan. Dapat dikatakan bahwa untuk bisa menyeberang laut dari Tinabasan ke Kandunguan (Malaysia) hanya dibutuhkan waktu 15 menit dari wilayah Indonesia ini.

5.3. Arah Pengembangan Kebijakan Perbatasan: Masyarakat Nunukan dalam Perdagangan Lintas Batas (Internasional)

Umumnya kebijakan diartikan sebagai ketentuan yang disepakati oleh pihak yang terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintahan. Dalam kaitannya dengan kebijakan pengembangan pembangunan masyarakat Nunukan tampaknya telah berjalan cukup lama. Namun sebagai sebuah kabupaten, Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan pesat setelah dibentuknya kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Oktober 1999. Sejak saat itu, Pulau Nunukan dibagi menjadi 4 kecamatan. Dari empat kecamatan itu tampak ramai merata. Selain itu Nunukan juga dibagi menjadi 5 kelurahan dan 3 desa. Kelima kelurahan itu adalah kelurahan Nunukan Timur, Nunukan Barat, Nunukan Tengah, Nunukan Utara dan Nunukan Selatan. Di Nunukan Selatan dan Sedadap misalnya ada pusat kantor pemerintahan seperti Kantor Bupati, Kantor Polisi dan yang lainnya. Di Nunukan Barat terdapat pemusatan pelayanan kesehatan dan Angkatan Darat. Di Nunukan Timur dan Nunukan Selatan terdapat pusat perdagangan dan perekonomian, sementara di Nunukan

Tengah terdapat pelabuhan yang cukup besar. Ketiga desa yang ada yaitu Desa Binusan, Srinanti, Tampur dan Lestari. Untuk pengembangan lebih jauh ada rencana membentuk kelurahan Nunukan Selatan dijadikan Kecamatan Nunukan Selatan yang terdiri dari Kelurahan Selisun, Kelurahan Nunukan Selatan dan Kelurahan Sedadap.



Gambar 5.8 Perairan Pulau Nunukan

Dari keseluruhan Nunukan itu, tampaknya berpotensi untuk dikembangkan pusat perdagangan dan perekonomian terutama dalam kaitannya melibatkan perdagangan dan perekonomian lokal ke tingkat yang lebih luas dalam hal ini dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini terlihat dari posisi strategis Nunukan Tengah yang memiliki pelabuhan besar dan pusat perkembangan perdagangan sehingga mempunyai potensi untuk perdagangan internasional. Selain potensi pariwisata belum dikembangkan secara maksimal, padahal ada beberapa lokasi yang potensi untuk dapat dikembangkan dalam menarik kunjungan wisatawan tidak hanya domestik, tetapi internasional khususnya dari negeri tetangga Malaysia (wawancara dengan Suhadi). Sebagaimana diketahui sejak menjadi kabupaten kebutuhan masyarakat Nunukan semakin tergantung dengan Tawau Malaysia. Selama ini memang dalam berbagai aspek masih dikelola di Tarakan misalnya adanya diolah di sana. Akan tetapi, di masa yang akan datang diharapkan untuk memikirkan kembali bagaimana pengolahan ikan juga diadakan di Nunukan.

Selain untuk perdagangan internasional juga diharapkan mendapat keuntungan dari jasa TKI itu. Sempat pula terjadi peningkatan pengangguran ketika mereka dideportasi dari Tawau pada tahun 2002. Pengangguran umumnya tidak disebabkan oleh orang Nunukan itu sendiri tetapi dengan datangnya pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia lalu dideportasikan ke Nunukan di sanalah lalu mereka menjadi penganggur, sebelum mereka memperoleh pekerjaan yang tetap. Sementara perekonomian Nunukan banyak dikembangkan oleh orang pendatang seperti Bugis dari Sinjae dan Bone, Jawa khususnya dari Jawa Timor seperti Bojonegoro, Ponorogo dan sebagainya. Sementara etnis Cina tidaklah terlalu banyak yang hanya bergerak di perdagangan bahan-bahan material atau bangunan. Di bidang pertanian banyak dilakukan oleh orang Tator dan ada juga orang Bugis. Ada keinginan untuk mengembangkan pusat perdagangan di Nunukan ini. Misalnya ada keinginan agar TKI yang dikirim ke Malaysia, apabila mereka pulang ke Indonesia dapat berbelanja di Nunukan, dan bukan hanya berbelanja di Tawau Malaysia. Dalam kaitannya dengan perusahaan yang mengelola TKI ini dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. 20 Jumlah TKI Per PJTKI (Dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2007)

No.	Nama PJTKI	Jumlah
1	Alfira Perdana Jaya	3005
2	Amira Prima	114
3	Pratama Karya	1257
4	Andalan Mitra Prestasi	450
5	Andromeda Graha	1244
6	Antar Tenaga Mandiri	832
7	Aula Graha	3259
8	Bagoes Bersaudara	731
9	Buana Safira Abadi	1832
10	Cahaya Dewi Primadona	1434
11	Ceger Sari Buana	1362
12	Dharma Karya Raharja	648

No.	Nama PJTKI	Jumlah
13	Dharma Persada	3652
14	Duta Anandasetia	368
15	Duta Wibawa Manda Putra	804
16	Elkarim Makmur Santosa	1132
17	Falia Sinatria Sejati	516
18	Fortuna Tama Insani	1210
19	Hikmah Surya Jaya	212
20	Muhara Perdana	233
21	Sejati	1133
22	Kurnia Bina Rizki	2235
23	Lansima Employment	2339
24	Luhur Asa	1091
25	Madaso International	2575
26	Mafan Samudra Jaya	1612
27	Mahabaraka Rizki	0
28	Muhkota Ulfah Sejahtera	3519
29	Megah Buana	811
30	Mekarjaya Wanayasa Putra	3325
31	Miktra Harta Insani	572
32	Putra Perkasa	324
33	Ilman Jaya	655
34	Pamor Saptadarma	1329
35	Pnca Banyuaji Sakti	433
36	Persada Duta Utama	2842
37	Prima Duta Persada	18
38	Putra Alwini	649
39	Rahman Pratama Sejati	4211
40	Rayani Saputra	2179
41	Reka Wahana Mulya	578
42	Ruyung Karya Mandiri	2439
43	Daha Jaya	2066
44	Satria Parangtritis	1251
45	Indah Abadi	222
46	Persada	2239
47	Sentosa	425
48	Kelana	324
49	Utama Mandiri	1024
50	Tri Tunggal Nuansa Utama	224
51	Citra Lestari	793
52	Kaltim Nusa Etika	822
53	Citra Bahari	2162
Jumlah		72636

Sumber: Kasubdin Penempatan dan Pendayagunaan TK

Berikut data tenaga kerja asal Indonesia tahun 2007 yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.21 TKI Menurut Daerah Asal Tahun 2007 (Data ini dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2007 di Nunukan).

Bulan		jan	feb	mar	apr	mei	Jun	jul	ags	sep	okt	nov	des	jumlah
Sulsel	L	3097	2977	4035	3408	3248	1673	2114	1948	1472	1363	2129	1315	28780
	P	1396	1068	1694	1368	1047	243	147	312	105	128	562	252	8324
Sulteng	L	93	28	43	36	23	114	37	74	43	43	49	73	656
	P	24	29	39	11	7	36	22	50	14	24	32	47	325
Sultra	L	102	83	159	322	137	155	564	119	38	61	113	94	1977
	P	69	73	100	192	107	98	460	77	33	33	61	63	1386
Sulbar	L	197	194	305	153	404	443	166	368	251	218	226	211	3136
	P	104	139	235	86	256	333	321	258	173	151	152	183	2228
NTT	L	378	150	361	408	1020	1713	2661	1247	753	1111	1302	867	12007
	P	253	285	275	335	674	1220	1746	1065	697	852	902	679	9023
NTB	L	109	32	94	148	137	153	148	93	69	85	105	111	1284
	P	30	32	78	81	95	121	105	64	30	40	63	77	809
Kaltim	L	9	0	50	44	6	37	42	21	12	20	21	13	275
	P	5	1	31	16	1	13	24	8	1	6	8	4	118
Kalbar	L	9	0	5	7	6	7	2	0	3	3	3	24	69
	P	1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	6
Kalsel	L	0	0	12	1	0	0	2	5	0	1	1	1	23
	P	2	0	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12
Kalteng	L	0	0	14	4	1	4	4	0	1	0	3	1	32
	P	0	0	8	3	1	3	1	0	2	0	2	0	20
Jatim	L	78	37	62	56	35	39	29	28	19	15	53	25	477
	P	35	25	33	21	16	16	15	14	4	4	25	9	
Jateng	L	28	1	10	4	14	4	2	7	1	4	11	9	254
	P	40	14	6	0	5	1	0	1	1	4	7	4	63
Jabar	L	3	9	4	11	8	3	3	0	3	7	9	19	79
	P	3	13	1	0	4	0	1	0	1	1	3	2	29
Jogya	L	0	0	1	3	4	0	4	4	7	3	3	2	31
	P	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	6
DIY	L	23	24	37	52	107	65	137	122	56	32	36	27	--
	P	20	26	27	29	54	35	99	72	25	15	20	10	434
Jumlah	L	4126	3535	5222	4659	5152	4412	5935	4006	2728	2966	4059	2799	46629
	P	1952	1707	2533	2142	2270	2118	2767	1964	1087	1298	1638	1327	73237
Jumlah		6108	5243	7765	6801	7432	6528	6696	5980	3815	4254	5907	4120	72539

Sumber: Kasubdin Penempatan dan Pendayagunaan TK

Tabel 5.22 TKI Ke Sabah Tahun 2007

Bulan	Laki	Perempuan	Jumlah
Januari	4105	1981	6086
Februari	3535	1707	5242
Maret	5222	2533	7755
April	4659	2142	6801
Mei	5150	2270	7420
Juni	4410	2118	6528
Juli	5935	2761	8696
Agustus	4016	1964	5960
September	2728	1087	3615
Oktober	2966	1298	4264
November	4069	1838	5907
Desember	2793	1327	4120
Jumlah	49588	23026	72614

Sumber: Kasubdin Penempatan dan Pendayagunaan TK

Dalam mengimplementasikan harapan menuju perkembangan perdagangan internasional itu tampaknya harus mengalami proses yang lebih solid. Seringkali konflik-konflik pribadi dipolitisir menjadi konflik yang lebih luas yang mengaitkan persoalan penduduk asli dan pendatang yang tentu merupakan masalah sosial yang harus diatasi. Dalam hal ini Dayak Tidung yang sering disebut sebagai penduduk asli, sementara etnis Bugis yang disebut sebagai pendatang. Di masa lalu Dayak Tidung dikatakan mendatangi wilayah Pulau Nunukan namun kemudian mereka dikatakan terdesak dan pindah kembali ke daratan Pulau Kalimantan. Selain itu, terdapat kelompok etnis lainnya seperti etnis Jawa, etnis Bajau, etnis Tanah Toraja (Tator), etnis Timor, etnis Flores, etnis Lombok dan sebagainya. Etnis Tidung kebanyakan mendiami wilayah Binusan.

Diantara kelompok lainnya itu dapat disebutkan misalnya etnis Flores yang setelah Perang Dunia II, bahwa tentara Jepang yang telah menduduki bagian timur Indonesia berkumpul di Sabah sebelum kembalinya Jepang.

Namun demikian, ketika mereka meninggalkan Indonesia ke Sabah mereka berkunjung dan mengambil beberapa migran orang Indonesia dari Flores Timur. Sejak saat itu terdapat proses migrasi yang berlanjut dari daerah ini ke Sabah. Sekarang, banyak migran Indonesia dari Flores Timur di Sabah yang menempati beberapa daerah tertentu (*Mantra, Ida Bagoes*. "Indonesian Labour Mobility to Malaysia: A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island Of Bawean", Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Nasional tentang Migrasi Internasional yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 9-11 Maret 1998). Sekarang ini persoalan sosial budaya masih merupakan kendala dalam pengembangan kawasan ini. Dalam arti bahwa bagaimana menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat terhadap penduduk yang dianggap minoritas di kawasan ini. Selain itu, pendistribusian barang diharapkan maksimal karena dapat menjadi masalah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan RI. Misalnya akhir-akhir ini tidak beroperasinya pesawat DAS (*Dirgantara Air Service*) sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah perbatasan seperti di Krayan. Misalnya harga seliter bensin di Nunukan Rp. 3000, di Krayan seharaga Rp. 15.000. Lebih-lebih sekarang tidak ada lagi penerbangan ke Krayan. Mereka dikatakan bahkan sempat datang ke kantor Bupati dengan mengatakan bahwa meskipun mereka menghuni wilayah perbatasan namun mereka juga merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia.

Baru-baru ini terjadi konflik antara etnis Tidung (Dayak) dan etnis Bugis. Hal ini disebabkan pula bahwa di masa lalu telah terjadi riak-riak kecil berkaitan dengan masalah pembagian yang adil tentang penggarapan proyek pembangunan jalan. Data-data di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi konflik berkaitan dengan pembagian itu, yang telah terjadi tahun 2007. Konflik itu sebenarnya masalah konflik perseorangan namun seringkali dikaitkan dengan persoalan politik dan ras yang lebih luas. Misalnya dikatakan bahwa proyek dimenangkan oleh orang Bugis.

Namun dalam kericuhan itu dikatakan orang Bugis seorang pengusaha yang menang proyek itu mengatakan anjing kepada orang Dayak yang kalah proyek. Padahal di kalangan masyarakat luas orang Dayak itu juga mempunyai peran dan kontribusi besar juga terhadap pembangunan masyarakat Nunukan. Inilah isu yang cukup sensitif sehingga dikatakan bahwa pada malam hari itu pukul 19.00 sekelompok orang Dayak keluar dari rumah mereka dan berjalan keliling sampai membawa parang. Pada saat itu dikatakan bahwa pemimpin yang berasal dari orang Bugis meninggalkan Nunukan. Namun kenyataannya jauh sebelum peristiwa terjadi mereka sudah berada di Samarinda karena menjalankan tugas. Persoalan-persoalan seperti ini mestinya tidak terjadi apabila kesadaran di kalangan berbagai etnis yang mendiami Nunukan menyadari “kenunukan” orang Nunukan (*Nunukness*) yang artinya dapat saling bahu membahu dikala dalam kesulitan dan toleransi terhadap berbagai etnis, kebiasaan dan tradisi yang ada di Nunukan. Pernikahan antara orang Tidung dan Orang Bugis atau Jawa sering dilakukan karena kesamaan agama yaitu Islam. Orang Bugis menikahi orang dayak lainnya dengan mengikuti agama sang suami. Namun demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada pelaksanaan hukum adat asli karena kebanyakan sebagai pendatang. Oleh karena itu hukum pemerintah yang berlaku yang diikuti masyarakat. Sementara di Sebuku, Lumbis masih melaksanakan hukum adat secara kuat. Namun tradisi seperti kebudayaan lokal dalam bentuk kerajinan lokal seperti membuat tas, topi dan hiasan lainnya masih sangat terbatas perkembangannya yang berbeda dengan kebudayaan di Krayan. Kemiskinan di Pulau Nunukan tidak kentara, justru yang tampak miskin adalah orang pendatang, padahal di daerah asalnya mereka sudah memiliki tanah, sawah dan sebagainya.

Untuk mendamaikan masyarakat Nunukan yang bertikai bahkan telah dilaksanakan upacara selamatan dengan menanam kepala kerbau sebagai salah satu keyakinan di antara mereka di Taman Kota yang terletak di tengah Kota Nunukan, yang sekaligus telah mendatangkan tokoh-tokoh agama dan adat dari etnis Dayak dan dari etnis Bugis di Makassar.

Tabel 5.23 Keterlibatan tokoh dan masyarakat dalam program pembangunan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Benar sekali	3	3.0	3.0	3.0
Benar	35	35.0	35.4	38.4
Kurang benar	31	31.0	31.3	69.7
Tidak benar	11	11.0	11.1	80.8
Samasekali tidak benar	19	19.0	19.2	100.0
Total	99	99.0	100.0	
System	1	1.0		

Oleh karena itu banyak dapat dilihat poster yang bertuliskan “*Budaya boleh beda, namun semangat persatuan harus tetap utuh*”. Poster ini dipasang berkaitan dengan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Oktober 2007. Peringatan perayaan ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Umumnya kalau ada pelaksanaan kegiatan dapat diinformasikan kepada kepala paguyubannya masing-masing. Misalnya HKSS yang memiliki kebanggaan mereka masing-masing. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Nunukan diangkat sebagai sebuah “cermin bagi bangsa melihat Indonesia”.

Pembangunan di Nunukan setelah dibentuknya kabupaten itu, telah membawa pembangunan ke tahap kemajuan misalnya pertama pada tahun 2002 telah dibangun jalan yang meskipun belum selesai sepenuhnya sampai ke ujung selatan sampai di Tanjung Harapan. Kemudian di Lamijung telah dibangun pusat-pusat pertokoan pada tahun 2006 yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Namun hingga kini masih menghadapi masalah karena masih terbatasnya sarana listrik yang diharapkan mampu untuk mengembangkan kawasan ini. Harga sebuah unit toko Rp. 450 juta dan uang muka Rp. 5 juta dan pembangunan pelabuhan Lamijung dilaksanakan pada tahun 2007. Pusat pertokoan itu menurut rencananya akan dibuka pada tahun 2008. Kedua, dengan adanya rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Nunukan

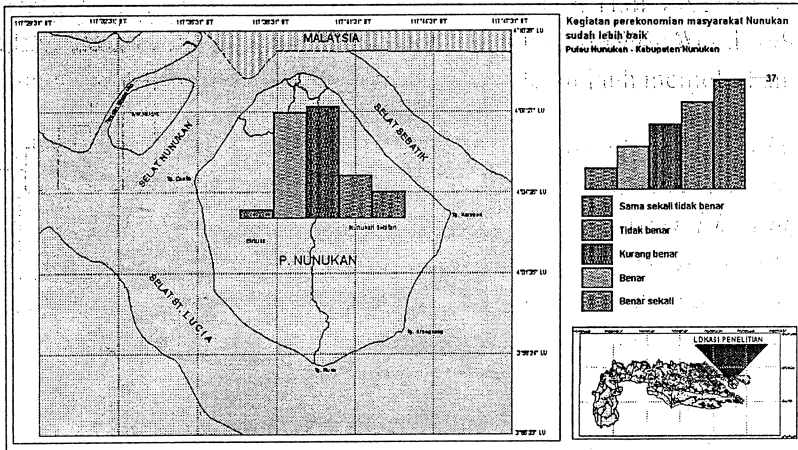
dengan Pulau Tinabasan hingga menghubungkan beberapa daerah pengembangan kelapa sawit di Simanggaris. Ketiga, bandara udara akan dibangun sehingga mampu buat mendaratkan pesawat-pesawat yang lebih besar. Keempat akan dibuat jalan lingkar sepanjang pantai namun belum selesai. Dikatakan pembangunan infrastruktur jalan masih belum fokus, karena belum selesai yang satu proyek sudah membangun proyek yang lainnya sehingga kesannya belum direnakan dengan baik.



Gambar 5.9. Kondisi jalan di pedalaman Pulau Nunukan

Kelima, dikatakan lebih berperannya Angkatan Laut yang ikut mengontrol masalah lalu lintas yang ramai di perairan Pulau Nunukan. Keenam, selain itu juga dibangun Pasar Lamijung yang diharapkan tetap dapat menampung aktifitas bagi perdagangan kecil dan tradisional di Nunukan. Di samping itu masih terjadi persoalan-persoalan sekitar masalah pengaturan tata ruang, persoalan reklamasi pantai yang diharapkan dapat segera diwujudkan bagi perkembangan pembangunan Nunukan yang asri dan utuh di masa depan.

Diagram 5.4 Kegiatan perekonomian masyarakat Nunukan sudah lebih baik



Infrastruktur pembangunan yang dibangun misalnya adanya pembangunan jembatan yang dimulai dari Tanjung Sebatu menyeberang menuju Kanduangan. Dari daerah ini dapat dicapai jalan yang menuju Simanggaris yang menghubungkan wilayah itu dengan Samarinda di Kalimantan Daratan. Selain itu, munculnya *Star Emerging Industries* yang mengeksploitasi di wilayah pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan. Tambahan pula telah dilakukan uji sistemik tentang kandungan minyak di wilayah Nunukan dan Sebatik. Untuk pemekaran misalnya telah ada rencana untuk membentuk Propinsi Kalimantan Utara yang ibukotanya akan dipusatkan di Bulungan. Ini didasari atas penelitian Universitas Mulawarman yang dilakukan sebelumnya (Lihat lebih lanjut: Ismit Mado, *Bunga Rampai Kaliman Utara*, 2008).

Tabel 5.24 Jumlah unit penangkapan perikanan laut menurut jenis alat tangkap per kecamatan tahun 2005, 2006, dan 2007

No	Kecamatan	2005	2006	2007
1	Krayan	-	-	-
2	Krayan Selatan	-	-	-
3	Lumbis	-	-	-
4	Sembakung	278	271	281
5	Nunukan	499	480	473
6	Sebatik	1452	1437	2915
7	Sebatik Barat	-	-	788
8	Sebuku	-	-	-

Sumber: Sub sektor penangkapan

Meskipun sering dianggap Pulau Sebatik bagian Indonesia sendiri kurang berkembang dibandingkan dengan Pulau Nunukan, namun berdasarkan tabel di atas yang dilihat dari pengembangan sektor perikanan Pulau Sebatik memang lebih memiliki potensi dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan. Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Nunukan belum menunjukkan peningkatan. Tidak hanya itu, dalam hal pemasaran hasil perikanan sejak dahulu masyarakat Nunukan mengalami hambatan dalam pengembangannya. Hal ini disebabkan karena umumnya pemasaran langsung dilakukan dengan pihak pedagang ke Tawau Malaysia dengan memanfaatkan fasilitas “*Border Trade*”. Dalam konteks perdagangan lintas batas ini dapat dilihat adanya perjanjian bersama antara Indonesia dan negeri bagian Sabah Malaysia dalam konteks perdagangan tradisional lintas batas. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa akhirnya tidak menggunakan dokumen ekspor dan impor. Mekanisme ini tidak dapat dibiarkan berkembang, disebabkan kemasan yang beredar di pasaran internasional adalah produk perikanan buatan Malaysia, akan tetapi pada dasarnya bahan bakunya yang berasal dari Indonesia (Lihat: *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2006*).

Selain itu, membandingkan perkembangan Nunukan dan Sebatik misalnya dapat disebutkan bahwa pengolahan hasil perikanan misalnya masih terkonsentrasi di pesisir Pulau Sebatik misalnya pengeringan, pembuatan ebi dari tepung ikan. Dicatat, bahwa pengolahan hasil perikanan dengan sistem industri rumah tangga baru terdapat satu unit pengolahan yang dikerjakan oleh kelompok Mina Barokah. Perkembangan di Sebatik ini menyebabkan adanya keinginan mandiri dari Sebatik terlepas dari Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, melihat posisinya yang berhadapan langsung dengan wilayah Sabah Malaysia ini, pernah diwacanakan kemudian kalau Sebatik ingin memiliki kabupaten sendiri, karena posisinya paling berhadapan secara langsung dengan Sebatik Malaysia.

Tabel 5.25 Realisasi Pengapalan Tahun 2005

Pembeli	Tanggal Pengapalan	Nama Kapal	Tujuan	Total (ton)
Noble Energy Inc.	10-2-2005	MV DAPENG HAI	Hong Kong	47,061
Noble Energy Inc.	10-3-2005	MV NEDIM BEY	India	52,410
Noble Energy Inc.	18-3-2005	MV PACIFIC PRIMATE	Hong Kong	42,806
Noble Energy Inc.	28-3-2005	MV DALIOR	Jepang	47,641
Tan Gee Beng PTE LTD	19-4-2005	MV ALONA	Hong Kong	45,160
Noble Energy Inc.	15-5-2005	MV SCANDINAVIA EXPRESS	Jepang	45,105
Noble Energy Inc.	21-5-2005	TB NITYA1/BG RMN 327	Korea via Samarinda	8,205
Noble Energy Inc.	22-5-2005	TB MINERVA/MHKL 327	Korea via Samarinda	7,803
Noble Energy Inc.	17-6-2005	MV GREAT SUN	Korea	60,300
Noble Energy Inc.	20-6-2005	MV NAVIOS APOLLON	Jepang	44,086
Noble Energy Inc.	27-6-2005	MV GLEN MOOAR	Jepang	45,065
Noble Energy Inc.	23-7-2005	Mv Lowlands Ghent	Korea	65,999

Pembeli	Tanggal Pengapalan	Nama Kapal	Tujuan	Total (ton)
Noble Energy Inc.	10-8-2005	Mv Mama	Taiwan	63,801
Noble Energy Inc.	30-8-2005	Mv Mama	Taiwan	63,560
Noble Energy Inc.	9-9-2005	Mv Jin An	Hong Kong	15,283
Taiwan Power Comp.	3-10-2005	Mv Ikan Kerisi	Taiwan	61,254
Taiwan Power Comp.	12-10-2005	Mv Torm Bornhoim	Taiwan	65,139
Noble Energy Inc.	25-10-2005	Mv Innovator	Hong Kong	54,009
Korea Southern Power Co. Ltd.,	15-11-2005	Mv Maricobber	Korea	50,626
Noble Energy Inc.	19-11-2005	Mv Alam Aman II	Hong Kong	46,329
Korea Southern Power Co. Ltd.,	7-12-2005	Mv Golden Glow	Korea	54,525
Korea Southern Power Co. Ltd.,	20-12-2005	Mv Nord Star	Korea	67,181
Noble Energy Inc.	28-12-2005	Mv Ocean Prince	Hong Kong	50,635
	Total			1.103.983

Sumber: Laporan Triwulan IV (Okt-Des 2006), PT Mandiri Intiperkasa

Tabel 5.26 Realisasi Pengapalan dan Negara Tujuan Pemasaran Tahun 2006

Pembeli	Tanggal Pengapalan	Nama Kapal	Tujuan	Total (ton)	Harga/ton (US\$)
Tan Gee Beng PTE LTD	15-1-2006	MV SPAR CORONA	Korea	68,943,000	26 \$
Noble Energy Inc.	9-2-2006	MV HEBET MERCY	Korea	69,579,000	29 \$
Tan Gee Beng PTE LTD	21-2-2006	MV ALDEBARAN	Korea	65,015,000	26 \$
PT Permata Alam Abadi	17-4-2006	BG MITRA JAYA 2	Filipina	8,112,620	37 \$
Tan Gee Beng PTE LTD	19-4-2006	MV URMILA	Korea	47,365,000	26 \$
Noble Energy Inc.	28-4-2006	MV HARDAR	Korea	48,358,000	30 \$
Tan Gee Beng PTE LTD	27-5-2006	MV SWIFT FAVOUR	Taiwan	65,999,000	26 \$

Pembeli	Tanggal Pengapalan	Nama Kapal	Tujuan	Total (ton)	Harga/ton (US\$)
PT Permata Alam Abadi	1-6-2006	BG WOODMAN 37	Filipina	8,151,000	37 \$
Tan Gee Beng PTE LTD	11-6-2006	MV FAR EASTERN SILO	Korea	67,004,000	26 \$
Noble Energy Inc.	27-6-2006	MV MENGZHOU 28	Korea	48,007,000	30 \$
Noble Energy Inc.	12-7-2006	MV BANOWATI	Korea	47,958	33 \$
PT Glencore	12-8-2006	MV CEMTEX THRIFT	Taiwan	76,999,000	30 \$
PT Glencore	17-8-2006	MV MARITIME KING	Thailand	24,017,000	30 \$
Noble Energy Inc.	27-8-2006	MV LIBRE	Jepang	44,499,000	33 \$
PT Glencore	10-9-2006	TB ADANG BAY/ APOL 3001	Pakistan	8,039,382	30 \$
Korea Southern Power Co. Ltd.,	11-10-2006	MV C JOURNEY/ BG APOL 3006	Korea	8,417,391	33 \$
Chettinad Logistics Private Limited	20-10-2006	MV PASIFIK MERCURY	India	47,729,000	33 \$
PT Hasil Bumi Kalimantan	20-10-2006	TB INDOMARINA SATU/ APOL 3009	Indonesia	8,052,000	37,5 \$
PT Glencore	7-11-2006	MV JIA HO	Thailand	29,698,000	33 \$
PT Glencore	7-11-2006	MV JIA HO	Thailand	40,300,000	33 \$
PT Hasil Bumi Kalimantan	11-11-2006	TB TUBAN/ APOL 3008	Indonesia	8,033,000	37,5 \$
Noble Energy Inc.	7-12-2006	MV DA PENG HAI (IN 2/3001	India	8,340,000	33 \$
PT Hasil Bumi Kalimantan	8-12-2006	TB GANDA/ JANE	Indonesia	8,091,000	37,5 \$
Noble Energy Inc.	21-12-2006	MV ORIENTAL PEARL	Jepang	10,998,000	33 \$
PT Glencore	22-12-2006	MV GREAT WELL	Korea	57,610,000	33 \$
Noble Energy Inc.	31-12-2006	TB MITRA JAYAI/ MITRA JAYA 2	Filipina	4,177,584	33 \$
	Total			929,544,482	

Sumber: Laporan Triwulan IV (Okt-Des 2006), PT Mandiri Intiperkasa

Memang sebelumnya pernah dikunjungi oleh Menteri pada Kementerian daerah Tertinggal ke Nunukan yang berasal dari aparat Nunukan, Malinau dan Kutai Barat pada tahun 2007. Pertemuan itu dimaksudkan memperlihatkan kepada pemerintah pusat sebatas mana ketertinggalan dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya dan jaraknya yang sangat jauh dari Tawau Malaysia. Di sini diperhatikan dari perkembangan kampung yang ada dan juga jumlah penduduknya (wawancara dengan Firdaus). Kabupaten Nunukan yang baru dibentuk ini sebenarnya menjadi kabupaten terdepan di Indonesia dan yang letaknya paling bagian utara. Dalam kaitan ini Undang-undang tentang otonomi daerah perlu dicermati kembali, karena wewenang yang terlalu luas. Misalnya dikedepankan konsep daripada perdagangan illegal secara terus menerus memang perlu dipikirkan alternatif konsep perdagangan yang berbasiskan *free port*.

Selama telah diketahui bahwa adanya PT Nunukan Jaya Lestari (NJL) juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi di Nunukan. Perusahaan ini ada penanaman modal asing yang dulu sahamnya juga milik Indonesia. Perdagangan saat itu masih memperhatikan keberadaan sumber daya alam terutama dalam pengelolaan CVO meskipun skalanya dalam jumlah yang terbatas. PT Nunukan Jaya Lestari selain mengembangkan perekonomian dalam arti luas, juga mengembangkan usaha pekebunan dan pabrik pengolahan yang tenaga pekerjanya adalah orang-orang Indonesia. Disebutkan bahwa yang memperlancar usaha-usaha perdagangan dengan Malaysia adalah peran yang dimainkan oleh etnis Bugis di samping memang masalah transportasi cukup lancar ke Tawau itu. Sebagaimana diketahui perkembangan perdagangan internasional ini tidak dapat dilepaskan dengan persoalan perkembangan tradisional yang sudah ada di era sebelumnya. Dulu misalnya disepakati pengangkutan barang senilai RM 600. akan tetapi munculnya masalah bagaimana masyarakat perlu dipikirkan agar mampu membayar kelebihan nilai barang dari RM 600 itu? Bagaimana barang-barang pokok itu dapat diatur secara baik

mengenai tata niaganya? Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana tidak hanya masyarakat kita yang perlu belajar mengenai negara tetangga, tetapi bagaimana mereka mau belajar tentang kehidupan di masyarakat Nunukan? Misalnya adanya potensi pengembangan sayur mayur, adanya beras adan dan sebagainya?

Tabel 5.27 Peningkatan ekonomi di Nunukan perlu ditingkatkan sehingga orang Indonesia tidak perlu bekerja ke Malaysia.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar sekali	81	81.0	81.0	81.0
	Benar	17	17.0	17.0	98.0
	Tidak benar	1	1.0	1.0	99.0
	Samasekali tidak benar	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Namun dengan perkembangan keadaan tampaknya tidak mencukupi lagi dan oleh karena itu ditargetkan sekitar US\$ 1500. Memang diakui sekarang ini bahwa sementara di daerah-daerah lainnya di Indonesia diberitakan adanya krisis pangan seperti sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok), namun di Nunukan ini sendiri tampaknya belum pernah terjadi karena persediaan akibat pengiriman barang yang mencukupi dari Tawau Malaysia. Kecuali di Krayan khususnya di desa-desa sekitarnya masih mengalami masalah karena adanya bargaining position yang lemah dari penduduk di sana dibandingkan dengan Malaysia. Misalnya dalam hal penjualan beras adan, penduduk mengalami kesulitan dengan masalah pemasaran, sehingga beras produk mereka itu diklaim sebagai beras Bario (beras Malaysia), padahal sebenarnya beras itu adalah beras adan produk masyarakat Krayan sendiri. Untuk membuka kawasan yang terisolir ini dengan daerah-daerah Indonesia lainnya khususnya di Kalimantan Indonesia sendiri, maka pemerintah pusat diberitakan telah menyediakan anggaran sekitar 100 Milyar untuk membangun infrastruktur jalan dari Long Midang (Krayan Indonesia) ke Ba Kelalan (Sarawak Malaysia).

Kebijakan pemerintah Indonesia selanjutnya adalah adanya upaya menanam 9000 sampai 12000 ha untuk penanaman coklat (*cacao*). Selain itu dapat dilihat adanya impor satu-satunya adalah batu porselin yang bukan dilakukan secara perorangan tetapi dilakukan oleh perusahaan. Sementara ekspor dari kawasan ini khususnya Simanggaris Kalimantan Timur adalah CVO (kelapa sawit).

Hingga saat ini ada beberapa persoalan kebijakan pembangunan yang masih menjadi kendala. Pertama misalnya masalah tata ruang dalam kaitannya dengan Nunukan sebagai wilayah perdagangan dan pelayanan jasa (*service*). Misalnya masalah pembangunan di Lamijung yang sudah selesai namun masih menghadapi kendala persediaan listrik.

5. 4. Simpulan

Dari pembahasan terhadap masalah perdagangan internasional atau lintas batas di Pulau Nunukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pulau Nunukan telah mengalami dinamika sosial ekonomi yang cukup signifikan dari masa awal menuju Nunukan sebagai kecamatan Nunukan menuju terbentuknya kabupaten Nunukan. Dari era perkembangan selama beberapa dekade itu telah menunjukkan perkembangan atau kemajuan yang telah mengalami beberapa proses adaptasi dari perkembangan perdagangan tradisional menuju perdagangan yang sifatnya internasional atau lintas batas. Tampak pula bahwa dari proses setingkat kecamatan sampai kabupaten telah dialami proses sosialisasi yang cukup panjang dari pelaksanaan berbagai peraturan sehingga masyarakat Nunukan diharapkan dapat memahaminya dalam implementasinya. Namun demikian perlu dicatat bahwa apabila ini diterapkan secara sinergis dan transparan diharapkan bahwa akan mampu meningkatkan daya saing masyarakat Pulau Nunukan dan juga para pedagang dari kawasan lainnya di Indonesia baik yang berasal dari Pare-

Pare (Sulawesi Selatan), maupun Surabaya (Jawa Timur) dalam melaksanakan aktifitas perdagangan internasional yang berhadapan dengan Tawau (Sabah) secara kompetitif dan sehat, demi kemajuan masyarakat perbatasan di wilayah perbatasan ini.

Selain itu, dengan adanya agenda kebijakan ekonomi nasional tahun 2008 yaitu dengan menjadikannya tahun infrastruktur, tahun pemberdayaan UMKM diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor riil di masyarakat Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan dengan negeri tetangga Sabah Malaysia Timur. Untuk itu, perlu tindakan proaktif dan inovatif dari berbagai sektor agar usaha baik yang mikro maupun lainnya dapat lebih ditingkatkan perkembangannya.

Tambahan pula, memang bantuan permodalan dan pembinaan yang sifatnya terus menerus dan program peningkatan ketrampilan dari pemerintah daerah Nunukan kepada pelaku usaha akan berpengaruh secara signifikan karena usaha mikro yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan ini memiliki kontribusi besar pada perkembangan perekonomian dan perdagangan di wilayah yang berdekatan dengan kawasan perbatasan ini. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat bahwa sebagian masyarakat negeri tetangga seperti Tawau secara sosial dan budaya memang dahulunya sebenarnya adalah masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke sana yang terdiri dari berbagai etnis.

Daftar Pustaka

- “Achmad Amins Ketika Berkunjung ke Nunukan: “Nunukan Harus Sama Dengan Tawau. Malu Dong Kalau Nggak Sama”, dalam (Metro–Kaltara) *Radar Tarakan*, Selasa 8 April 2008, hal. 9.
- Kecamatan Nunukan Dalam Angka 2006. Kantor Camat Nunukan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan (Katalog BPS: 1403.6408.040). Nunukan: Oktober 2006.
- Kabupaten Nunukan Dalam Angka (Nunukan Regency in Figures)*. Nunukan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan (Regional Development Planning Board-Nunukan), 2005.
- Kusworo, W. *Upacara Bedewa: Sebuah Deskripsi Kebudayaan Suku Tiding*. Kalimantan Timur: Pemda Kabupaten Nunukan, 2005.
- Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2006*.
- Laporan Triwulan IV (Okt-Des 2006), PT Mandiri Intiperkasa*
- Mantra, Ida Bagoes. “Indonesian Labour Mobility to Malaysia: A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island Of Bawean”, Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Nasional tentang Migrasi Internasional yang diselenggarakan Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 9-11 Maret 1998.
- “Potret Dunia Usaha Kabupaten Nunukan Tahun 2006”, dalam *Berita Resmi Statistik* (BPS Kabupaten Nunukan), No. 02/ 04/08/ Th. I, 14 April 2008.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nunukan 2006 (Menurut Lapangan Usaha) (PDRB 2006). Kabupaten Nunukan: Bappeda-BPS, 2006.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nunukan 2006 (Menurut Penggunaan) (PDRB 2006). Kabupaten Nunukan: Bappeda-BPS, 2006.

Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Nunukan 2007 (Menurut Penggunaan). Kabupaten Nunukan: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-Badan Pusat Statistik, 2007.

Selamat Datang di Bumi Penekindi Debaya: Rasakan Sentuhan Alam & Budayanya: Potensi Wisata Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dinas Pariwisata dan Seni Budaya. Kabupaten Nunukan. 2006.

Welcome to Bumi Penekindi Debaya (Tourism Object). Kalimantan Timur: Dinas Pariwisata dan Seni Budaya (Brosur).

